BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Kemiskinan adalah salah satu masalah yang dihadapi manusia yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat. Standar kehidupan yang rendah ini secara langsung dampak pengaruhnya terhadap tingkat keadaan kesehatan, kehidupan moral, dan rasa harga diri dari mereka yang tergolong sebagai orang miskin. Kondisi Indonesia yang beragam dengan keadaan geografis, ekonomi dan sosial yang berbeda menyebabkan karakteristik kemiskinan disetiap daerah berbeda. Penanggulangan kemiskinan secara menyeluruh tidak dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat saja tetapi harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah, Kota Malang juga menjadi pelaku strategis untuk langsung melakukan upaya penanggulangan kemiskinan diwilayahnya. Pemerintah Kota lebih mengenal secara dekat karakteristik dan tingkat kemiskinan di wilayahnya, sehingga untuk menyusun strategi, kebijakan dan program yang bersifat khusus tidak dapat mengandalkan strategi dan kebijakan di tingkat pusat. Strategis Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kota Malang Tahun 2019-2023 yang bersifat menyeluruh akan berguna sebagai acuan semua pelaku di tingkat kota, baik Pemerintah, kelompok usaha swasta, maupun masyarakat, dalam menjalankan kegiatannya, sesuai fungsi dan tugas masing-masing. Strategi ini juga dapat menjadi sarana pemersatu semua pelaku dalam upaya penanggulangan kemiskinan serta dapat dimanfaatkan sebagai bahan/ masukan untuk membangun kesepakatan dan mengintegrasikan dengan uapaya penanggulangan kemiskinan di tingkat nasional, atau dalam membangun kerjasama dengan wilayah lain yang memiliki permasalahan yang sama, serta melakukan sinergi potensi yang dimiliki.

Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kota Malang Tahun 2019-2023 merupakan dokumen acuan bersama mengenai langkah strategis yang mampu

dilaksanakan oleh pemerintah, swasta dan masyarakat Kota Malang dalam mengatasi persoalan kemiskinan sesuai dengan kewenangan, sumber daya dan semangat kebersamaan yang diwujudkan melalui proses yang realistis.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan (SPKD) Kota Malang Tahun 2019-2023 adalah:

1. Menegaskan komitmen pemerintah beserta seluruh jajaran Organisasi Perangkat daerah, swasta, masyarakat dan berbagai pihak yang peduli untuk memecahkan masalah kemiskinan.
2. Membangun konsensus bersama untuk mengatasi masalah kemiskinan melalui pendekatan hak-hak dasar dan pendekatan pertisipatif dalam perumusan strategi dan kebijakan serta rumusan indikator keberhasilan program penanggulangan kemiskinan.
3. Menegaskan komitmen dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Develpoment Goals/SDGs) terutama tujuan penanggulangan kemiskinan.
4. Mendorong sinergi dan penyelarasan berbagai upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, swasta, masyarakat dan pihak yang peduli.

Tujuan dalam penyusunan SPKD Kota Malang tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut.

1. Menyusun strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Malang sebagai acuan untuk memasukkan program- program penanggulangan kemiskinan (Pronangkis) baik untuk program jangka menengah (PJM) maupun rencana tahunan (Renta) dalam kegiatan pembangunan di Kota Malang.
2. Sebagai pedoman seluruh pemangku kepentingan (pemerintah daerah, swasta, masyarakat) dan pihak yang peduli secara sinergi dan selaras dalam penanggulangan kemiskinan.
3. Menyusun Naskah Akademis Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Malang

4. Menyusun Draft Peraturan Walikota Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Malang

1.3 ACUAN KEBIJAKAN

Aturan perundangan yang menjadi acuan kebijakan penyusunan SPKD antara lain:

1. UU 17/2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU 25/2004 tentang SPPN.
3. UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah.
4. UU 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
5. UU 11/2005 tentang pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.
6. UU 17/2007 tentang RPJPN tahun 2005- 2025.
7. UU 13/2011 tentang Fakir Miskin
8. Peraturan Presiden No. 166 Tahun 2014 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
9. Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan sebagai arah implementasi program-program percepatan penanggulangan kemiskinan.
10. Keputusan Presiden No. 10 Tahun 2011 tentang Tim Koordinasi Peningkatan dan Perluasan Program Pro-Rakyat.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 42 Tahun 2010 tentang TKPK Provinsi dan Kabupaten/Kota.
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025.
13. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2010 tentang rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025.
14. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang Tahun 2013-2018.

15. Keputusan walikota Malang Nomor:188.45/234/35.73.112/2017 tentang Tim Koordinasi Penaggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Malang.

1.4 ISU STRATEGI

Tabel 1.1 Isu Strategsi Menurut RPJMD Kota Malang Tahun 2013-2018

Substansi	Proses	Konteks
Dinamika Kota Malang yang terus berkembang menuju kota metropolis	Kota Malang sebagai kota besar yang menuju kota metropolis,saat ini sudah dirasakan problematika perkotaan yang berkaitan dengan sarana transportasi, persampahan ,kependudukan ,dan drainase perkotaan. Dalam rangka mengatasi problematika tersebut perlu sinergitas dengan wilayah yang berbatasan, dalamhal ini Pemerintah Kabupaten Malang dan Pemerintah Kota Batu , melalui penguatan kelembagaan, sumberdaya manusia, tatalaksana, peningkatan sistem informasi, penegakan hukum dan kerjasama regional.	Kota malang sebagai kota besar perlu perencanaan dalam mengantisipasi perkembangan kota menuju ke arah yang positif.
Masih tingginya angka kemiskinan	Pengurangan angka kemiskinan menjadi prioritas utama di setiap wilayah di Indonesia.	Perlunya penurunan angka kemiskinan di Kota Malang yan sampai saat ini mencapai 4,7 %.
Tingginya angka pengangguran	Pengangguran yang tinggi mengakibatkan banyak permasalahan lain seperti kriminalitas dan kesejahteraan masyarakat.	Penanganan angka pengangguran di Kota Malang. Penyediaan lapangan kerja yang terbuka untuk seluruh masyarakat Kota Malang dapat memperluas kesempatan kerja bagi angkatan kerja.
Pelaksanaan pelayanan pemerintahan yang belum optimal	Pelaksanaan good governance yang belum optimal berpengaruh terhadap pelayanan publik yang disediakan	Pengoptimalan sistem good governance yang lebih sistematis dan dapat melayani dengan baik kepada seluruh elemen masyarakat
Kualitas lingkungan hidup yang menurun	Sarana dan prasarana pengelola limbah dan persampahan yang belum tersedia secara menyeluruh menjadi salah satu penyebab penurunan kualitas lingkungan yang terjadi di Kota Malang	Penyediaan pengelolaan sampah dan limbah domestik dan industri di Kota Malang sebagai langkah antisipatif penurunan kualitas lingkungan
Belum optimalnya pengendalian penataan ruang	Melalui peningkatan pengendalian penataan ruang dan pengentasan ketimpangan pembangunan antar wilayah di Kota Malang.	Perlunya penanggulangan ketimpangan pembangunan pusat kota di Kota Malang
Peran perempuan yang belum optimal dalam pembangunan	Perempuan adalah elemen masyarakat yang perlu dipertimbangkan dalam proses pembangunan, melalui aspirasi dan peran serta perempuan dapat mengarahkan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat	Perlunya pemberdayaan perempuan dalam setiap proses pembangunan mulai dari perencanaan hingga pengawasan implementasi pembangunan.

Substansi	Proses	Konteks
Derajat kesehatan Kota Malang belum optimal	Melalui peningkatan pelayanan kesehatan yang dapat menjangkau setiap elemen masyarakat dan peningkatatan tenaga kesehatan yang merata di setiap kecamatan di Kota Malang	Perlunya peningkatan pelayanan dan perluasan tenga kesehatan di setiap kecamatan di Kota Malang
Potensi kepariwisataan daerah yang belum termanfaatkan dengan baik	Melalui pembardayaan kelompok wisata dan pengoptimalan potensi wisata di Kota Malang berpotensi untuk membantu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.	Perlu adanya pemberdayaan kelompok wisata di setiap objek potensi wisata dan pengoptimalan potensi objek wisata
Pelaku sektor ekonomi informal yang belum terberdayakan dengan baik	Dalam rangka pengembangan ekonomi kreatif di Kota Malang, maka perlu dikembangkan sektor koperasi, UKM, dan sektor informal. Pembangunan koperasi, Usaha kecil menengah , dan sektor informal memiliki potensi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat	Perlunya pemberdayaan pelaku sektor ekonomi informal yang belum terbedayakan
Belum adanya pemberdayaan ekonomi sektor informal dan perbaikan iklim investasi	Investasi merupakan faktor penting dalam peningkatan pertumbuhan perekonomian Kota Malang dan memerlukan jaminan keamanan dan kepas tian hokum serta penyediaan sarana prasarana pendukung investasi.	Perlunya perbaikan iklim investasi melalui proses perijinan yang lebih memudahkan bagi investor untuk dapat melakukan investasi di Kota Malang.
Sarana transportasi dan manajemen transportasi yang belum memadai	Pengembangan sistem transportasi masal dapat mengurai kejenuhan transportasi di Kota Malang. Melalui transportasi masal yang baik dapat meningkatkan aksesbilitas barang dan manusia di Kota Malang	Perlunya pengembangan sistem transportasi masal di Kota Malang yang melayani ke seluruh wilayah di Kota Malang.
Peningkatan kualitas prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan kawasan permukiman kota	Peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan Permukiman kota dilakukan secara sistematis dengan Menerap kan prinsip-prinsi previtalisasi dalam bentuk Perbaikan lingkungan maupun pembangunan kembali. Dalam memenuhikebutuhan akan rumah perlu Diupayakan pembangunan rumah secara vertikal,baik Pada kawasan baru maupun pada kawasan kumuh Berat yang pelaksanaannya disesuaikan dengan daya Dukung lingkungan setempat.Sedangkan pada Kawasan kumuh perlu ditingkatkan kualitas hunian, Prasarana sarana lingkungan,serta,perbaikanRumah Tidak Layak Huni(RTLH).	Perlunya peningkatan kualitas prasarana dan sarana perumahan dan revitalisasi kawasan permukiman kota yang mengalami penurunan kualitas lingkungan yang terjadi.
Peningkatakan kualitas pendidikan	Pembangunan sektor pendidikan mempunyai peran	Perlunya peningkatan kualitas pendidikan dengan peningkatan sumberdaya pengajar dan

Substansi	Proses	Konteks
	penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat . Mengingat kemajemukan warga Kota Malang terutama dari aspek sosial ekonomi, maka perlu dibangun Sinergitas antara pemerintah , dunia usaha , dan Masyarakat guna terselenggara nya pelayanan pendidikan yang merata dan berkualitas bagi masyarakat Kota Malang.	peningkatan sarana pendidikan yang merata pada setiap kecamatan di Kota Malang
Peningkatan ketentraman dan ketertiban	Melalui iklim yang kondusif, tentram dan tertib dengan melibatkan semua elemen masyarakat secara optimal melalui kerjasama pemerintah, dunia usaha dan masyayrakat dan penguatan kelembagaan, sumberdaya manusia, infrastruktur dan tata laksana yang handal.	Penegakan kebijakan melalui penegakan hukum pengendalian ketentraman dan ketertiban yang konsisten shingga kondisi Kota Malang yang aman, tertib dan teratur serta diperlukan juga strategi dan langkah-langkah antisipasi mitigasi bencana
Penguatan ketahanan pangan	Melalui penguatan ketahanan pangan dengan menjamin ketersediaan bahan pokok, lancarnya distribusi pangan dan konsumsi yang bermutu.	Perlunya diversifikasi bahan pangan dan olahan pangan pengganti bahan pokok serta menjamin kelancaran distribusi barang pokok menuju Kota Malang
Pengembangan kerjasama antar kota dan kabupaten	Melalui kerjasama antar kota dan kabupaten akan terjalin hubungan yang saling menguntungkan yang dapat membawa Kota Malang menjadi penyangga pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur.	Pengembangan kerjasama antar kota dan kabupaten diperlukan dengan ddukung oleh kelembagaan, sumber daya manusia, dan tata laksana dengan mengedepankan semangat pro aktif dan berwawasan ke depan serta untuk kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan
Pengelolaan pembiayaan pembangunan	Melalui sistem pembiayaan pembangunan non konvensional dapat mengurangi beban pemerintah dalam pembangunan serta dapat mengalokasikan anggara untuk kebutuhan yang lain	Skema pembiayaan pembangunan non konvensional melalui *public private partnership* (PPP) maupun CSR dapat meringankan beban APBD pemerintah dalam melaksanakan pembangunan.

BAB 2
METODOLOGI

Metodologi menjelaskan mengenai metode yang digunakan, alat analisis yang digunakan dan indikator-indikator yang menjadi acuan dalam identifikasi kemiskinan di Kota Malang. Metodologi menyajikan kerangka alur pemikiran yang tersusun secara sistematik dalam memahami Buku Strategi Penanggulangan Kemiskinan Kota Malang Tahun 2019-2023.

2.1 PROFIL KEMISKINAN

Kemiskinan menurut BPS dibedakan secara asal penyebabnya menjadi dua macam yakni kemiskinan kultural dan kemiskinan struktural. Kemiskinan kultural yakni kemiskinan yang disebabkan oleh adanya faktor-faktor adat atau budaya suatu daerah tertentu yang membelenggu seseorang atau sekelompok masyarakat tertentu sehingga membuatnya tetap melekat dengan kemiskinan. Sedangkan kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang terjadi sebagai akibat ketidakberdayaan seseorang atau sekelompok masyarakat tertentu terhadap sistem atau tatanan sosial yang tidak adil, karenanya mereka berada pada posisi tawar yang sangat lemah dan tidak memiliki akses untuk mengembangkan dan membebaskan diri mereka sendiri dari perangkap kemiskinan.

Sedangkan secara konseptual kemiskinan dapat dibedakan menjadi dua macam yakni kemiskinan relatif dan kemiskinan absolut. kemiskinan relatif merupakan standar kehidupan yang ditentukan dan ditetapkan secara subyektif oleh masyarakat setempat dan bersifat lokal serta mereka yang berada dibawah standar penilaian tersebut dikategorikan sebagai miskin secara relatif. Sedangkan kemiskinan absolut yakni standar kehidupan minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhaan dasar yang diperlukan, baik makanan maupun non makanan. Standar kehidupan minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar ini disebut sebagai garis kemiskinan.

2.2 KRITERIA KEMISKINAN

2.2.1 Pendekatan Kemiskinan Multidimensi

Kriteria kemiskinan pada strategi penanggulangan kemiskinan Kota Malang menggunakan kriteria pengukuran MPI (Multidimensional Poverty Index). MPI melihat struktur kemiskinan secara lebih luas bukan sekedar pengeluaran atau konsumsi tapi mendefiniskan secara multidimensi seperti keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan dan kualitas hidup. Konsep ini sebanarnya sudah diutarakan oleh Amartya Sen, yang menyebutkan bahwa kemiskinan itu harus dilihat dari berbagai dimensi seperti pendidikan, kesehatan, kualitas hidup, demokrasi dan kebebasan masyarakat terhadap akses ekonomi (Sen, 1981; Sen, 2000).

MPI meliputi tiga dimensi yang diantaranya adalah dimensi pendidikan, kesehatan dan kualitas hidup serta terdapat sepuluh indikator dalam mengukur tingkat kemiskinan suatu wilayah yang diantaranya dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

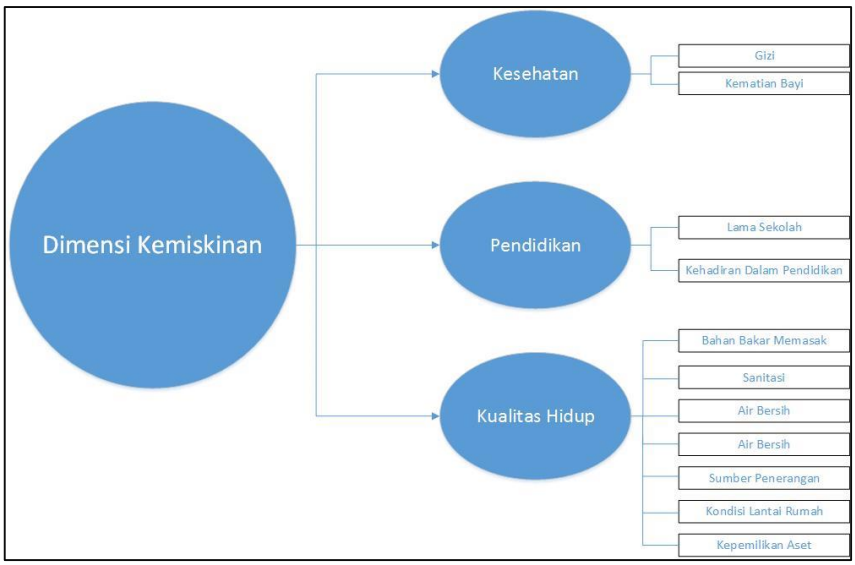

Gambar 2.1 DImensi MPI

2.3 ANALISIS PERKEMBANGAN ANTAR WAKTU

Analisa perkembangan antar waktu digunakan untuk mengetahui perkembangan indikator dalam waktu ke waktu. Hasil dari analisa perkembangan antar waktu akan memberikan input pada analisa posisi relatif. Sehingga dengan analisa perkembangan

antar waktu ini dapat dijelaskan apakah capaian suatu indikator di tahun terakhir lebih baik, sama atau lebih buru daripada capaian tahun-tahun sebelumnya, terutama dalam tiga hingga lima tahun sebelumnya. Selain itu juga analisa perkembangan antar waktu dapat menjelaskan apakah capaian indikator tersebut dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi, konsistensi membaik atau memburuk untuk kemudian menjadi input dalam perencanaan dan penentuan wilayah prioritas. Berikut adalah contoh grafik analisa perkembangan antar waktu.

Contoh Grafik Analisis Perkembangan Antar Waktu Persentase Penduduk Miskin (P0) kabupaten Brebes Tahun 2008-2012.

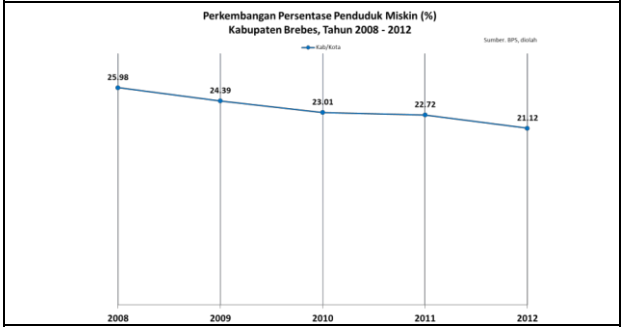

Dari tahun ke tahun terjadi penurunan tingkat kemiskinan di kabupaten Brebes. Pada tahun 2008 tingkat kemiskinan mencapai 23,98 persen dan pada tahun 2012 menjadi 21.12 persen. Dengan kata lain dalam 5 tahun terakhir terjadi konsistensi penurunan P0 di kabupaten Brebes.

Gambar 2.2 Analisa Perkembangan Antar Waktu

Sumber: Buku Petunjuk Teknis Penyusunan SPKD TNP2K

2.4 ANALISIS POSISI RELATIF

Analisa posisi relatif digunakan untuk melihat seberapa jauh capaian indikator terhadap rata-rata capaian di tahun tertentu. Dengan demikian dapat dinilai capaian suatu indikator di tahun terakhir lebih baik, sama atau lebih buruk jika dibandingkan dengan pencapaian pada tingkat provinsi atau nasional. Berikut merupakan contoh analisis posisi relatif terhadap kondisi pada tingkat administrasi diatasnya.

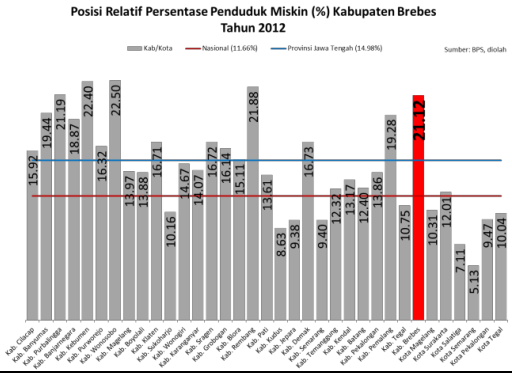

Dilihat dari posisi relatif, Kabupaten Brebes termasuk daerah yang memiliki Persentase Penduduk Miskin (P0) yang tinggi di provinsi Jawa Tengah. Pada tahun 2012 persentase kemiskinan di kabupaten Brebes mencapai 21,12 persen dan termasuk ke dalam 5 kabupaten/kota dengan P0 yang paling tinggi dari total 35 kabupaten/kota di provinsi

Gambar 2.3 Analisa Posisi Relatif

Sumber: Buku Petunjuk Teknis Penyusunan SPKD TNP2K

2.5 ANALISIS EFEKTIVITAS

Analisis efektivitas bertujuan untuk melihat efektivitas kebijakan daerah terhadap capaian indikator yang digunakan. Analisa ini melihat dari hasil analisa perkembangan antar waktu pada kurun waktu tertentu untuk dilihat efektivitasnya, apakah pada periode tersebut program yang dilakukan pada indikator sudah berjalan dengan baik dalam artian adalah merubah pada kondisi yang lebih baik atau lebih buruk. Hasil dari analisa efektivitas menjadi acuan kebijakan selanjutnya dalam menanggapi perencanaan kebijakan pada periode kedepan. Pada gambar 3.4 berikut adalah contoh analisa efektivitas yang dapat digunakan.

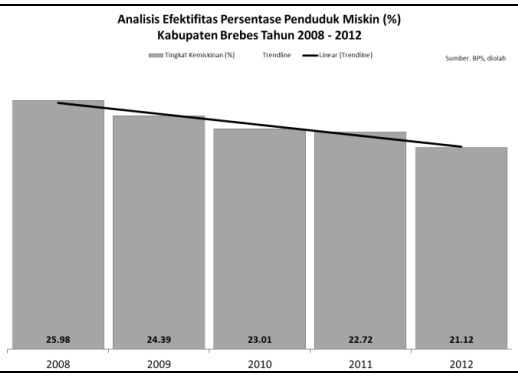

Penurunan Persentase Penduduk Miskin (P0) kabupaten Brebes dalam 5 tahun terakhir menunjukkan penurunan yang cukup konsisten dengan besar penurunan rata-rata satu persen per-tahun.

Gambar 2.4 Analisa Efektivitas

2.6 ANALISIS RELEVANSI

Analisis relevansi adalah muara dari ketiga analisis sebelumnya yakni efektivitas, perkembangan antar waktu dan efisiensi. Oleh karena itu analisis ini dapat digunakan untuk melihat relevansi hasil kebijakan pada berbagai level pemerintahan.Analisis ini dilakukan dengan cara membandingkan arah trend line capaian indikator kemiskinan tertentu antara kabupaten/kota, provinsi, dan nasional. Berikut adalah contoh analisa relevansi yang diterapkan dalam penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Malang.

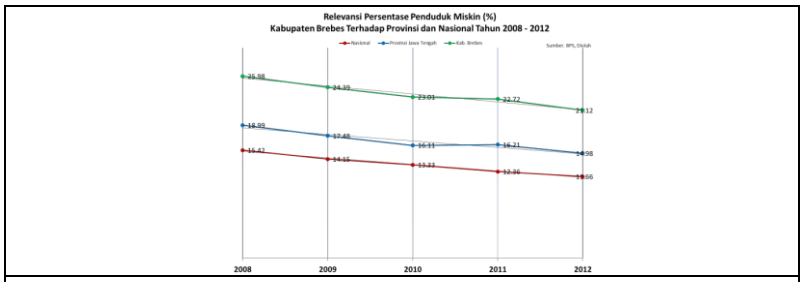

Kecenderungan penurunan Persentase Penduduk Miskin (P0) yang terjadi di kabupaten Brebes juga terjadi di provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Artinya tampak relevansi penuruan capaian P0 dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, provinsi dan pemerintah daerah kabupaten

Gambar 2.5 Analisa Relevansi

Sumber: Buku Petunjuk Teknis Penyusunan SPKD TNP2K

2.7 KERANGKA PEMIKIRAN

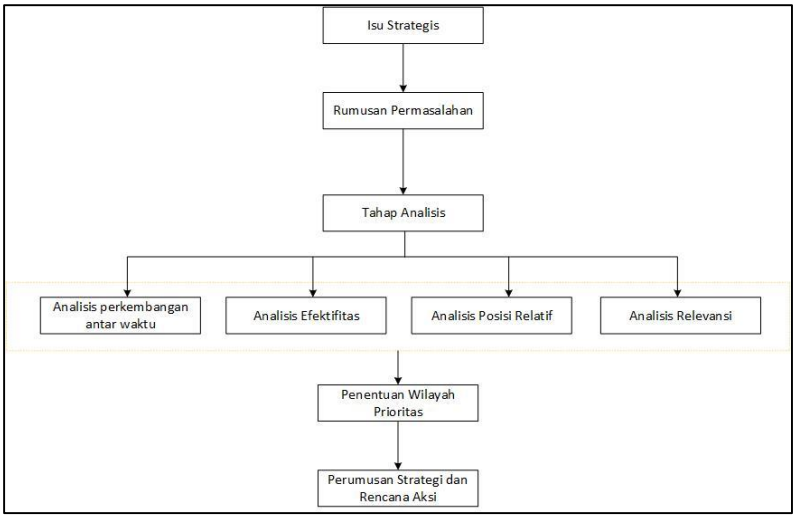

Gambar 2.6 Kerangka Pemikiran

Halaman Ini Sengaha Dikosongkan

BAB 3
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

3.1 GAMBARAN UMUM KOTA MALANG

3.1.1 Kondisi Geografis Wilayah

Secara geografis Kota Malang berada pada koordinat wilayah 112°06'-112°07' Bujur timur dan 7°06'-8°02' Lintang selatan. Kota Malang adalah kota kedua terbesar di Jawa Timur dengan lokasi wilayah berada di dataran tinggi. Secara administratif Kota Malang memiliki batas wilayah yang meliputi :

- Sebelah Barat : Kabupaten Malang (Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau)
- Sebelah Selatan : Kabupaten Malang (Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji)
- Sebelah Timur : Kabupaten Malang (Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang)
- Sebelah Utara : Kabupaten Malang (Kecamatan Karangploso dan Kecamatan Singosari)

Selain itu Kota Malang secara administratif terbagi menjadi 5 Kecamatan, 57 Kelurahan, 514 Unit RW dan 3.842 Unit RT. Pembagian wilayah administrasi Kota Malang dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini.

Tabel 3.1 Luas Wilayah Administrasi Kota Malang

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km^2)	Proporsi Luas (%)	Jumlah Kelurahan	Jumlah RW	Jumlah RT
1	Klojen	8,83	8,02	11	89	675
2	Blimbing	17,77	16,15	11	127	920
3	Kedung Kandang	39,89	36,24	12	114	864
4	Lowokwaru	22,60	20,54	11	94	865
5	Sukun	20,97	19,0	12	120	774
Total		110,06	100,00	57	544	4098

Sumber: Kota Malang Dalam Angka, 2017

Berdasarkan tabel 4.1 diatas dapat diketahui bahwa luas wilayah terbesar Kota Malang berada pada Kecamatan Kedungkandang dengan luas 39,89 km2 atau 36% dari total luas wilayah di Kota Malang. Kondisi geografis Kota Malang dapat dilihat pada gambar 4.1 wilayah administrasi Kota Malang.

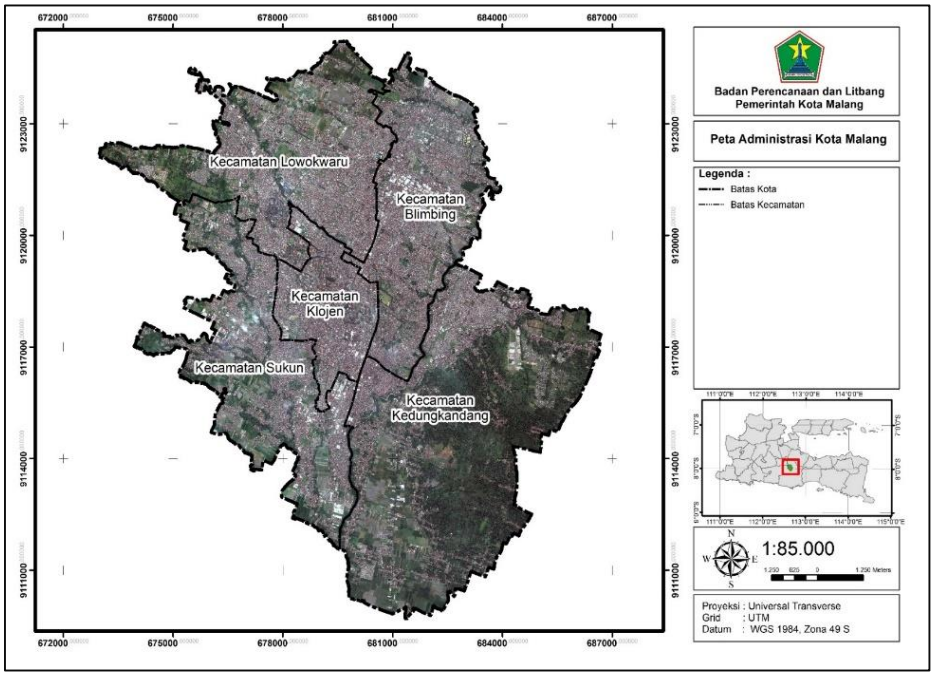

Gambar 3.1 Peta Administrasi Wilayah Kota Malang

3.1.2 Kondisi Fisik Dasar

Kondisi fisik dasar menggambarkan kondisi fisik geografis wilayah Kota Malang yang meliputi topografi wilayah, penggunaan lahan, dan Infrastruktur wilayah.

1. Penggunaan Lahan

   Kota Malang adalah kota terbesar ke dua di Jawa Timur dengan intensitas kegiatan masyarakat kota yang tinggi pada kegiatan ekonomi. Hal ini juga berpengaruh pada pola penggunaan lahan di Kota Malang yang akan mengikuti pola aktifitas yang berjalan di Kota Malang. Pada tabel 4.2 berikut adalah penggunaan lahan di Kota Malang pada tahun 2016 dirinci pada setiap kecamatan.

Tabel 3.2Penggunaan Lahan Kota Malang Tahun 2016

Kecamatan	Penggunaan Lahan			
	Sawah	Pertanian Bukan Sawah	Bukan Pertanian	Total Luas Lahan
Kedungkandang	591	1271	2127	3989
Sukun	226	704	1167	2097
Klojen	-	6	877	883
Blimbing	85	6	1686	1777
Lowokwaru	240	88	1932	2260
Kota Malang	1142	2075	7789	11006

Sumber: BPS Kota Malang, 2017

Berdasarkan tabel 4.2 diatas dapat disimpulkan bahwa penggunaan lahan bukan pertanian merupakan luas lahan dominan di Kota Malang. Hal ini dipengaruhi oleh pola kegiatan ekonomi Kota Malang yang dominan pada sektor perdagangan dan jasa menurut PDRB Kota Malang Tahun 2017, sehingga berpengaruh pada pola penggunaan lahan di Kota Malang yang dominan oleh lahan terbangun.

2. Topografi

Kota Malang berada pada wilayah dengan ketinggian diatas 400 meter diatas permukaan laut dengan topografi yang berfariasi. Kecamatan Lowokwaru dan Kecamatan Kedungkandang berada pada lokasi tertinggi dengan wilayah ketinggian mencapai 570 – 700 meter diatas permukaan laut. Gambaran ketinggian di Kota Malang dapat dilihat pada gambar 4.2 peta ketinggian Kota Malang.

3. Infrastruktur

Kondisi infrastruktur kota malang meliputi infrastruktur pendidikan, kesehatan, perdagangan, dan Koperasi. Gambaran infrastruktur menggambarkan kondisi ketersediaan infrastruktur Kota Malang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di Kota Malang.

a. Infrastruktur Pendidikan

Salah satu komponen penyebab kemiskinan adalah akses terhadap pendidikan yang rendah, baik akses secara fisik dan kemampuan finansial masyarakat. Kondisi infrastruktur pendidikan di Kota Malang bisa dikatakan sudah mencukupi dalam memberikan pelayanan kepada seluruh

masyarakatnya. Pada tabel berikut adalah jumlah infrastruktur pendidikan di Kota Malang.

Tabel 3.3 Jumlah Sekolah Taman Kanak-kanak Negeri dan Swasta Tahun 2016

Kecamatan	Taman Kanak-Kanak			
	Taman Kanak-Kanak Negeri	Taman Kanak Kanak Swasta	Taman Kanak Kanak Luar Biasa Swasta	Rodlotul Athfal Swasta
Kedung Kandang	2	63	1	36
Sukun	1	68	1	18
Klojen	1	64	1	6
Blimbing	1	66	2	15
Lowokwaru	-	75	2	26
Jumlah	5	336	7	101

Sumber: Kota Malang Dalam Angka, 2017

Tabel 3.4 Jumlah Sekolah Dasar Negeri dan Swasta Tahun 2016

Kecamatan	Sekolah Dasar					
	Sekolah Dasar Negeri	Sekolah Dasar Swasta	Sekolah Dasar Luar Biasa Negeri	Sekolah Dasar Luar Biasa Swasta	Madrasah Ibtidaiyah Negeri	Madrasah Ibtidaiyah Swasta
Kedung Kandang	45	11	1	-	-	21
Sukun	42	16	-	1	1	10
Klojen	19	24	-	1	1	4
Blimbing	44	13	-	3	-	4
Lowokwaru	45	15	-	2	-	2
Jumlah	195	79	1	7	2	41

Sumber: Kota Malang Dalam Angka, 2017

Tabel 3.5 Jumlah Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Swasta Tahun 2016

Kecamatan	Sekolah Menengah Pertama					
	Sekolah Menengah Pertama Negeri	Sekolah Menengah Pertama Swasta	Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa Negeri	Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa Swasta	Madrasah Tsanawiyah Negeri	Madrasah Tsanawiyah Swasta
Kedung Kandang	6	11	1	-	1	13
Sukun	4	12	-	1	-	4
Klojen	9	16	-	1	1	5
Blimbing	6	15	-	3	-	2
Lowokwaru	7	14	-	2	-	8
Jumlah	32	68	1	7	2	32

Sumber: Kota Malang Dalam Angka, 2017

Tabel 3.6 Jumlah Sekolah Menengah Atas Negeri dan Swasta Tahun 2016

Kecamatan	Sekolah Menengah Atas (SMA)					Sekolah Menengah Kejuruan	
	Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri	Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta	Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) Swasta	Madrasah Aliyah Swasta	Madrasah Aliyah Negeri	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri	Sekolah Menengah Kejuruan Swasta
Kedung Kandang	2	4	1	5	-	3	5
Sukun	-	5	1	1	-	3	9
Klojen	5	13	1	3	1	2	9
Blimbing	-	5	1	1	-	2	9
Lowokwaru	3	8	1	3	1	3	10
Jumlah	10	35	5	13	2	13	42

Sumber: Kota Malang Dalam Angka, 2017

Berdasarkan data jumlah sekolah di Kota Malang terdiri dari sekolah taman kanak-kanak hingga SMA dan Perguruan Tinggi Baik Swasta dan Negeri. Taman kanak-kanak sudah tersedia pada setiap kecamatan baik swasta dan negeri. Sedangkan kebutuhan akan sekolah luar biasa baik negeri dan swasta masih tersebar tidak pada setiap kecamatan. Sebaran SMA negeri terdapat 10 SMA yang berada di Kecamatan Kedungkandang, Sukun dan Lowokwaru sedangkan SMA swasta sudah ada pada setiap kecamatan.

b. Infrastruktur kesehatan

Infrastruktur kesehatan termasuk adalah jumlah rumah sakit, rumah bersalin puskesmas dan sarana kesehatan lainnya. Akses terhadap pelayanan kesehatan adalah kebutuhan dasar bagi seluruh masyarakat. Pada tabel berikut adalah sebaran sarana kesehatan di Kota Malang.

Tabel 3.7 Jumlah Infrastruktur Kesehatan Kota Malang Tahun 2016

Fasilitas Kesehatan	Kedung Kandang	Sukun	Klojen	Blimbing	Lowokwaru	Kota Malang
Rumah Sakit	4	1	9	-	-	**14**
Rumah Bersalin	-	-	-	-	-	**-**
Puskesmas	3	3	3	3	3	**15**
Klinik/Balai Kesehatan	7	11	22	15	13	**68**

Fasilitas Kesehatan	Kedung Kandang	Sukun	Klojen	Blimbing	Lowokwaru	Kota Malang
Posyandu	140	153	97	145	112	**647**

Sumber: Kota Malang Dalam Angka, 2017

Berdasarkan data pada tabel diatas diketahui bahwa di Kota Malang terdapat 14 rumah sakit yang tersebar pada Kecamatan Kedung Kandang, Sukun dan Klojen. Kecamatan Klojen yang berada pada pusat kota memiliki sarana kesehatan yang lebih banyak dari kecamatan lain. Sedangkan Kecamatan Sukun, Kedungkandang, Belimbing dan Lowokwaru lebih banyak terdapat puskesmas dan posyandu sebagai pembantu pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

c. Infrastruktur Perdagangan

Infrastruktur perdagangan berfungsi untuk tempat berkembangnya ekonomi masyarakat kota. Beberapa infrastruktur perdagangan di Kota Malang meliputi pasar, tempat usaha, dan koperasi. Pada tabel 4.8 berikut adalah jumlah pasar di Kota Malang.

Tabel 3.8 Jumlah Pasar di Kota Malang Tahun 2016

Kecamatan	Kelas				
	I	II	III	IV	V
Kedung Kandang	1	2	3	-	-
Sukun	2	1	-	-	1
Klojen	6	4	1	3	
Blimbing	2	-	-	-	-
Lowokwaru	2	-	-	-	-
Kota Malang	13	7	4	3	1

Sumber: Kota Malang Dalam Angka, 2017

Berdasarkan tabel 4.8 diatas bahwa pasar di Kota Malang diklasifikasikan menjadi lima kelas. Infrastruktur pasar terbanyak pada kelas I dan Kecamatan Klojen memiliki jumlah pasar terbanyak dengan total 13 pasar. Sedangkan Kecamatan Lowokwaru dan Blimbing hanya memiliki masing-masing 2 pasar kelas I yang tersedia. Kegiatan ekonomi perdagangan juga dirinci berdasarkan tempat usaha yang digunakan.

Tabel 3.9 Jenis Tempat Usaha

Kecamatan	Bedak		Los/Emper		PKL	Jumlah	
	Unit	Pedagang	Unit	Pedagang		Unit	Pedagang
Kedungkandang	406	327	1.410	1.157	867	1.816	1.484
Sukun	166	117	3.234	2.633	605	3.400	2.750
Klojen	1.628	1.332	6.512	4.711	433	8.140	6.043
Blimbing	218	152	2.464	2.027	21	2.682	2.179
Lowokwaru	340	190	2.168	1.025	325	2.508	1.215
Jumlah/Total	2.758	2.118	15.788	11.553	2.251	18.546	13.671

Sumber: Kota Malang Dalam Angka, 2017

Berdasarkan tabel 4.9 diketahui bahwa kegiatan usaha perdagangan di Kota malang terbanyak merupakan los/emper. Sedangkan jumlah PKL di Kota Malang mencapai jumlah 2.251 PKL, yang terbanyak berada di Kecamatan Kedungkandang. Perdagangan juga terkait dengan koperasi dalam memberikan bantuan pendanaan bagi setiap pelaku usaha. Berikut adalah gambaran jumlah dan sebaran koperasi di Kota Malang.

Tabel 3.10 Jumlah Koperasi Menurut Jenis Koperasi dan Kecamatan di Kota Malang, 2015

Kecamatan	KUD	KPRI	KOPKAR	KSU	KSP	KOPWAN	lainnya	Jumlah
Kedungkandang	1	14	4	6	5	13	63	106
Sukun	-	13	9	53	6	11	16	108
Klojen	-	36	41	80	17	14	44	232
Blimbing	1	14	21	91	16	12	44	199
Lowokwaru	2	16	12	56	7	14	74	181
Kota Malang	4	93	87	286	51	64	241	826

Sumber: Kota Malang Dalam Angka, 2017

Berdasarkan tabel 4.10 diketahui bahwa persebaran koperasi sudah ada pada setiap Kecamatan di Kota Malang. Sedangkan KUD tidak terdapat pada Kecamatan Sukun dan Klojen. Sehingga di Kota Malang sudah terdapat 826 unit koperasi di Kota Malang yang berada di seluruh kecamatan di Kota Malang.

3.1.3 Kondisi Sosial dan Kependudukan

1. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kota Malang pada tahun 2016 tercatat mencapai 856.410 jiwa penduduk yang tersebar kedalam 5 Kecamatan di Kota Malang, yang mana Kecamatan Lowokwaru menjadi kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar yang mencapai 194.521 jiwa penduduk atau secara proporsi mencapai 22,7 % dari total penduduk di Kota Malang, sedangkan Kecamatan Klojen menjadi wilayah dengan penduduk terendah yang mencapai 103.637 jiwa. Pada tabel. berikut adalah data sebaran penduduk Kota Malang pada setiap kecamatan nya.

Tabel 3.11 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Malang

Kecamatan	Jumlah Penduduk				Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	
	2010	2014	2015	2016	2010 – 2016	2014 - 2016
Kedung Kandang	174.477	183.927	186.068	188.175	1,51	1,27
Sukun	181.513	188.545	190.053	191.513	1,14	0,90
Klojen	105.907	104.590	104.127	103.637	-1,03	-0,36
Blimbing	172.333	176.845	177.729	178.564	0,84	0,59
Lowokwaru	186.013	192.066	193.321	194.521	0,99	0,75
Kota Malang	820.243	845.973	851.298	856.410	0,81	0,72

Sumber: Kota Malang Dalam Angka 2017

Berdasarkan data Kota Malang Dalam Angka 2017 pada Tabel 4.11 diketahui bahwa jumlah penduduk Kota Malang terbesar berada pada Kecamatan Lowokwaru dengan jumlah penduduk sebesar 194.521 jiwa penduduk. Berdasarkan tabel tersebut juga dapat diketahui bahwa kecenderungan bermukim penduduk Kota Malang pada pinggiran kota diantaranya adalah Kedungkandang dengan laju pertumbuhan paling tinggi yang mencapai 1,51% dari tahun 2010 – 2016, dan kecenderungan lain adalah semakin menjauhi pusat kota atau pusat kota sebagai aktifitas bisnis bukan untuk bermukim. Hal demikian dapat dilihat dari laju pertumbuhan penduduk di Kecamatan Klojen yang semakin menurun dari tahun 2010 – 2016 sebesar -1,03%. Hal ini dapat menggambarkan bahwa nilai permukiman di pusat kota akan memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan pinggiran kota. Sehingga kilai permukiman di pusat kota akan memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan pinggiran kota. Sehingga kecenderungan masyarakat akan bermukim di pinggir kota untuk biaya bermukim yang lebih rendah.

2. Kepadatan Penduduk

Kota Malang memiliki luas wilayah 110,06 Km^2 dengan total jumlah penduduk sebesar 856.410 Jiwa penduduk pada tahun 2017. Sehingga dapat diketahui kepadatan di Kota Malang adalah sebesar 7.781 jiwa/km2 atau dapat dikategorikan sebagai kota dengan kepadatan penduduk yang cukup padat. Pada tabel 4.12 berikut adalah rincian kepadatan penduduk Kota Malang pada setiap Kecamatan nya.

Tabel 3.12 Kepadatan Penduduk Kota Malang

Kecamatan	Luas Wilayah (Km^2)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km^2)
Kedungkandang	8,83	4.717
Sukun	17,77	9.133
Klojen	39,89	11.737
Blimbing	22,60	10.049
Lowokwaru	20,97	8.607
Total Kota Malang	110,06	7.781

Sumber: Kota Malang Dalam Angka, 2017

Tabel telah menjelaskan sebaran kepadatan penduduk Kota Malang pada setiap kecamatan nya. Dapat diketahui kecamatan dengan kepadatan penduduk terbesar adalah Kecamatan Klojen yakni sebesar 11.737 Jiwa/Km2. Meskipun Kecamatan Klojen secara laju pertumbuhan sudah mulai ditinggalkan oleh penduduknya namun masih banyak penduduk Kota Malang yang bermukim di Kecamatan Klojen. Sedangkan kecamatan dengan kepdatan penduduk ter-rendah adalah Kecamatan Kedungkandang dengan kepadatan penduduk 4.717 Jiwa Km2.

3. Mata Pencaharian

Kota Malang didominasi oleh penduduk dengan mata pencaharian pada bidang perdagangan dan jasa Sebanyak 34 % sedangkan paling sedikit masyarakat Kota Malang bekerja pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan presentase 2%.

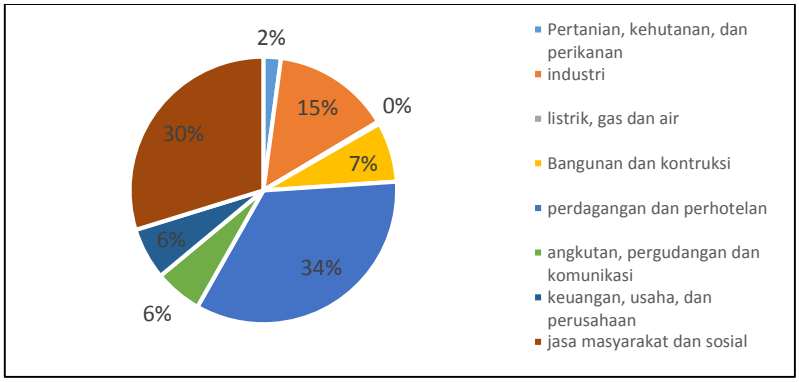

Gambar 3.2 Jenis Mata Pencaharian Penduduk Kota Malang

Sumber: Kota Malang Dalam Angka 2017

Dominasi pekerjaan penduduk pada sektor perdagangan berimplikasi pada perkembangan kota. Dimana Kota Malang kini semakin tumbuh menjadi kota perdagangan dan jasa dengan sektor perdagangan juga menyumbang kontribusi terhadap PDRB Kota Malang pada tahun 2017 sebesar 16.890,3 miliar rupiah, terbesar diantara sektor perekonomian yang lain. Selain tu jika dirincikan pekerjaan penduduk di Kota Malang berdasarkan aktifitasnya maka didapatkan data sebagai berikut.

Tabel 3.13 Pekerjaan Masyarakat Kota Malang Berdasarkan Status Pekerjaan

Status pekerjaan	Kelompok Umur					Jumlah
	15-24	25-34	35-44	45-54	55+	
Berusaha Dibantu Buruh Tetap	1.768	4.643	6.091	6.241	4.474	23.217
Buruh/Karyawan/ Pegawai	43.335	75.422	52.756	42.936	26.096	240.545
FORMAL	45.103	80.065	58.847	49.177	30.570	263.762
Berusaha Sendiri	8.122	9.832	19.690	21.886	13.725	73.255
Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap	967	3.327	4.463	9.752	11.621	30.130
Pekerja Bebas Pertanian	-	-	-	481	-	481
Pekerja Bebas Non Pertanian	3.296	5.022	4.429	6.207	3.906	22.860
Pekerja Keluarga/ Tidak Dibayar	4.107	4.957	2.534	6.248	2.708	20.554
INFORMAL	16.492	23.138	31.116	44.574	31.960	147.280

Sumber: Laporan Eksekutif Ketenagakerjaan Kota Malang, 2017

Berdasarkan hasil data diatas diketahui bahwa pekerja formal di Kota Malang menempati jumlah terbanyak yakni sebanyak 263.762 penduduk Kota Malang bekerja sebagai pekerja formal. Sedangkan pekerja informal jumlahnya mencapai 147.280 jiwa penduduk yang terdiri dari pekerja keluarga, pekerja bebas dan berusaha.

4. Kondisi Sosial

Kondisi sosial meliputi kondisi kesejahteraan masyarakat Kota Malang. Pada tabel 4.14 berikut adalah rincian penduduk diklasifikasikan berdasarkan tingkat kesejahteraan keluarganya.

Tabel 3.14 Klasifikasi Keluarga Kota Malang

	Kecamatan	Pra Sejahtera	Keluarga Sejahtera				Jumlah Total
			I	II	III	III +	
1	Kedungkandang	5004	9206	11939	15868	7061	49078
2	Sukun	6831	8598	11567	14743	5034	46755
3	Klojen	2003	6428	4916	9127	4359	26833
4	Blimbing	3617	5106	9368	16610	7659	42363
5	Lowokwaru	2537	5244	7895	16758	6716	39150
Kota Malang		19974	34585	45685	73106	30829	204179

Sumber: Kota Malang Dalam Angka, 2017

Berdasarkan tabel 4.14 dapat kita ketahui bahwa tingkat kemiskinan di Kota Malang dapat dilihat dari jumlah keluarga pra sejahtera. Dimana keluarga pra sejahtera di Kota Malang jumlah total sebesar 19.974 keluarga yang berarti adalah 9,7 % dari total keluarga di Kota Malang. Kecamatan dengan kontribusi penduduk pra sejahtera terbanyak adalah Kecamatan Sukun dan Kecamatan Kedungkandang dengan jumlah masing-masing keluarga pra sejahtera adalah 6831 keluarga dan 5004 keluarga. Sedangkan jumlah keluarga pra sejahtera terkecil berada di Kecamatan Klojen yang merupakan pusat Kota Malang. Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat pra sejahtera lebih banyak bermukim di pinggiran kota.

Tabel 3.15 Jumlah Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan Kota Malang Tahun 2017

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp)	Penduduk Miskin	
		Jumlah Total (jiwa)	Presentase
2012	330765	43500	5,21
2013	362162	41000	4,87
2014	381400	40600	4,8
2015	411709	39100	4,6

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp)	Penduduk Miskin	
		Jumlah Total (jiwa)	Presentase
2016	426527	37030	4,33

Sumber: Kota Malang Dalam Angka, 2017

Berdasarkan tabel 4.15 diatas bahwa penduduk miskin di Kota Malang pada tahun 2016 sejumlah 37.030 jiwa penduduk atau 4,33 % penduduk di Kota Malang. Secara trend kemiskinan penduduk di Kota Malang dari tahun 2012 hingga tahun 2016 mengalami penurunan.

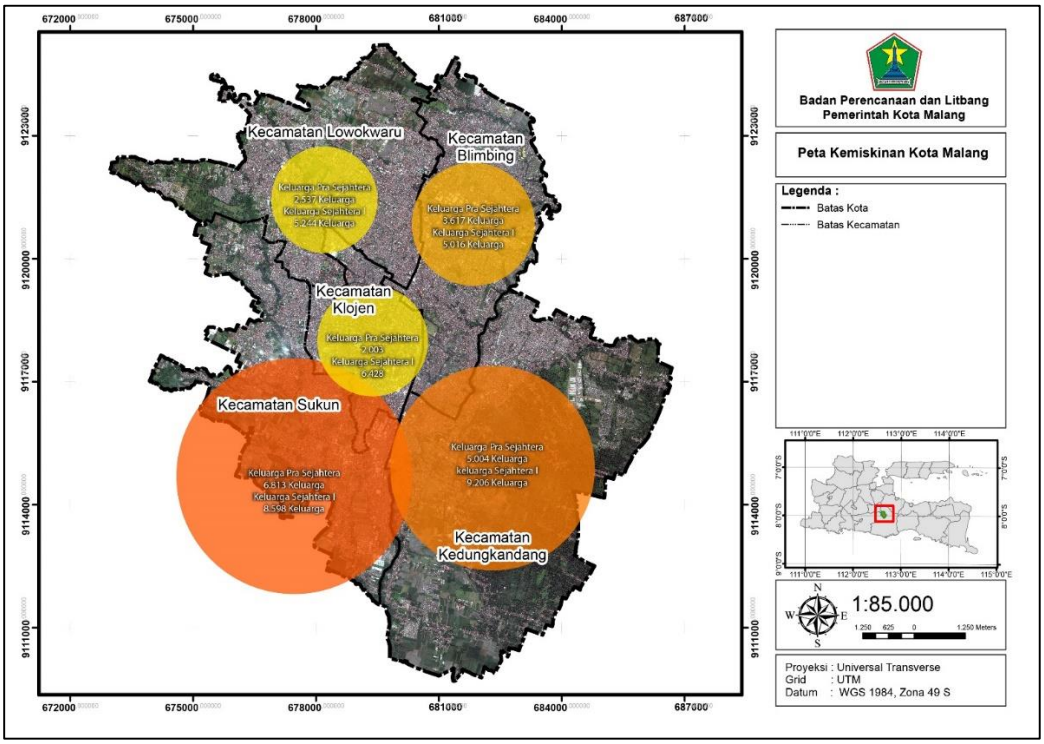

Gambar 3.3 Peta Persebaran Masyarakat Berpenghasilan Rendah Kota Malang

Sumber : Kota Malang Dalam Angka, 2017

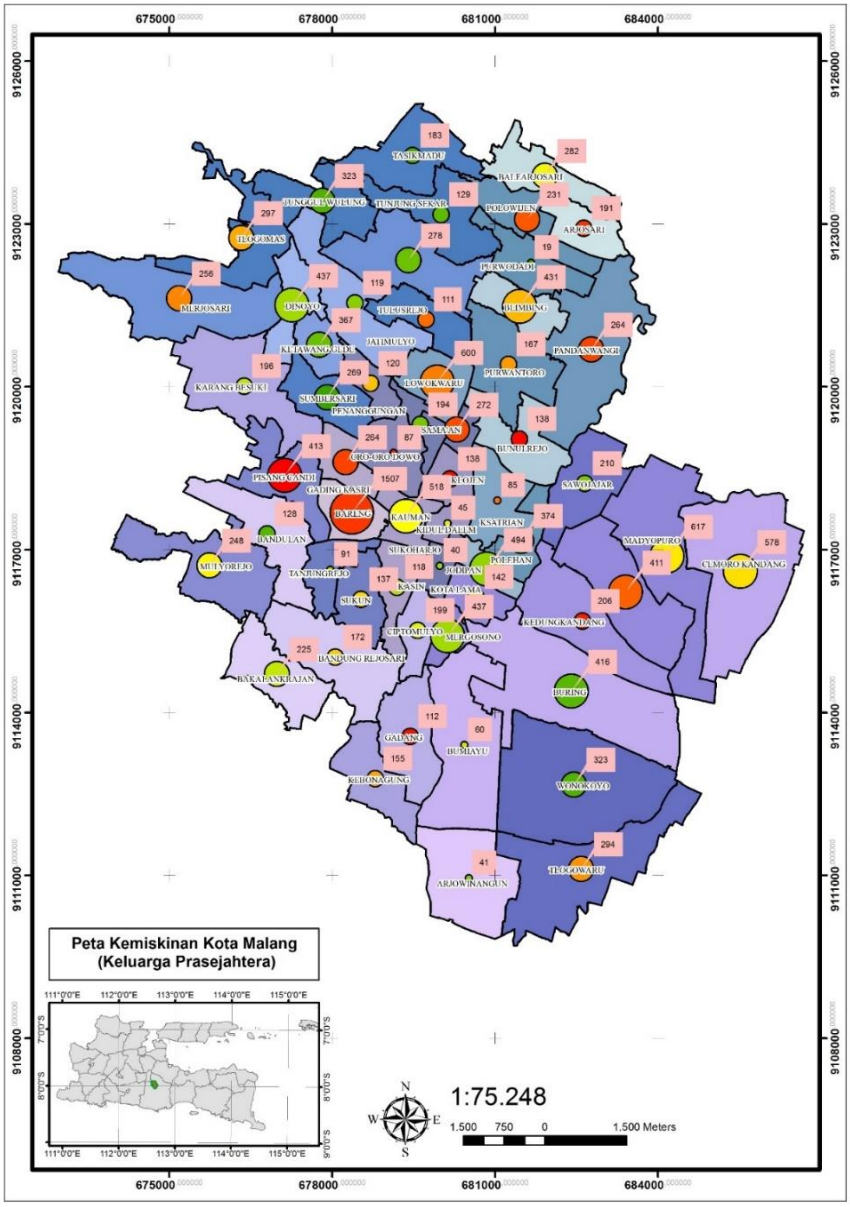

Gambar 3.4 Peta Kemiskinan Kota Malang Tahun 2018

Sumber: Kompilasi Kecamatan di Kota Malang Dalam Angka Tahun 2018

3.2 PEREKONOMIAN

Ekonomi menjelaskan struktur perekonomian di Kota Malang untuk mengetahui sektor apa yang memiliki kontribusi terbesar dalam menyumbang pendapatan daerah. Perekonomian kota juga erat kaitannya dengan kemiskinan kota, karena dapat mencerminkan kemampuan masyarakat di daerah tersebut untuk memenuhi

kebutuhan hidupnya, selain itu juga mencerminkan kemampuan dan keberpihakan daerah dalam mengembangkan program-program untuk kesejahteraan masyarakatnya.

Secara perekonomian perkembangan ekonomi dapat dilihat dari presentase sektor perekonomian di Kota Malang melalui PDRB Kota Malang. Berikut adalah presentase PDRB Kota Malang pada tahun 2017.

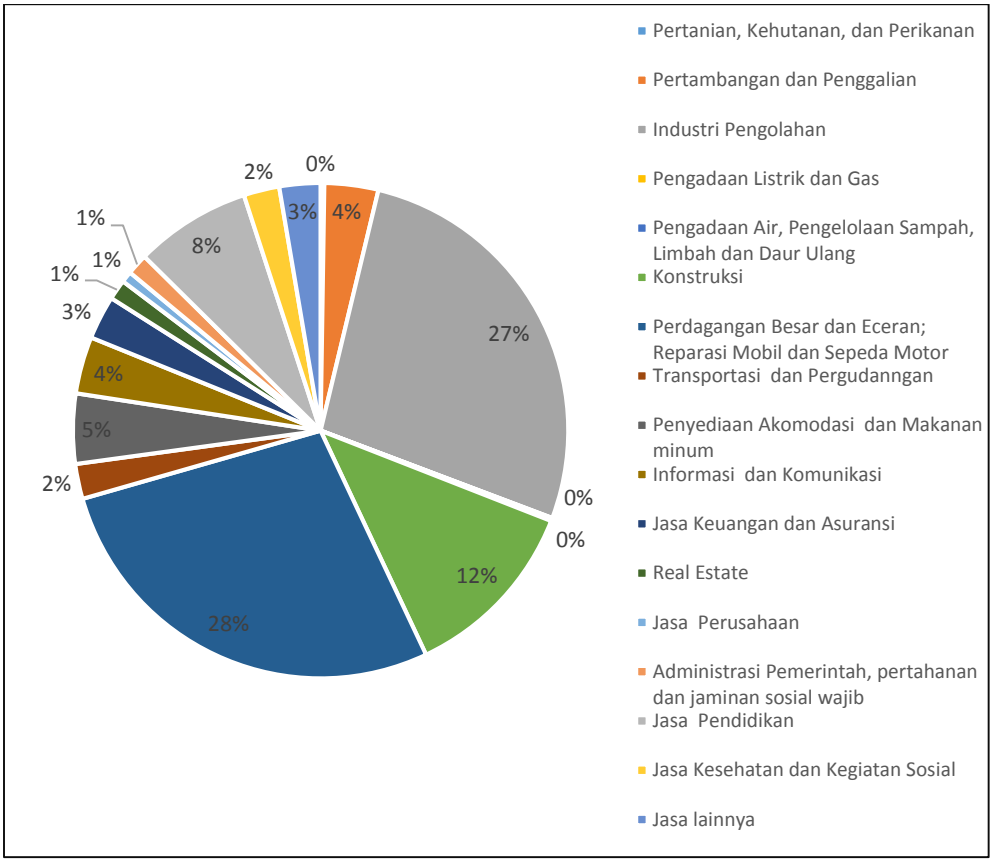

Gambar 3.5 PDRB Kota Malang Atas Dasar Harga Konstan 2017

Sumber : Kota Malang Dalam Angka, 2017

Berdasarkan gambar 4.7 diatas dapat dijabarkan bahwa lapangan usaha yang paling besar berkontribusi atau dominan di Kota malang adalah sektor perdagangan besar dan eceran dan sektor industri pengolahan. Berdasarkan gambaran tersebut bahwa masyarakat Kota Malang dominan bekerja pada sektor industri pengolahan dan perdagangan dan jasa.

Sedangkan secara pertumbuhan perekonomian menurut jenis lapangan usaha juga perlu diketahui untuk dapat mengetahui sektor apa yang mengalami pertumbuhan dalam 5 tahun terakhir dan sektor apa yang mengalami pertumbuhan pesat pada 5 tahun terakhir. Penjabaran pertumbuhan perekonomian dapat dilihat pada gambar 4.8 berikut.

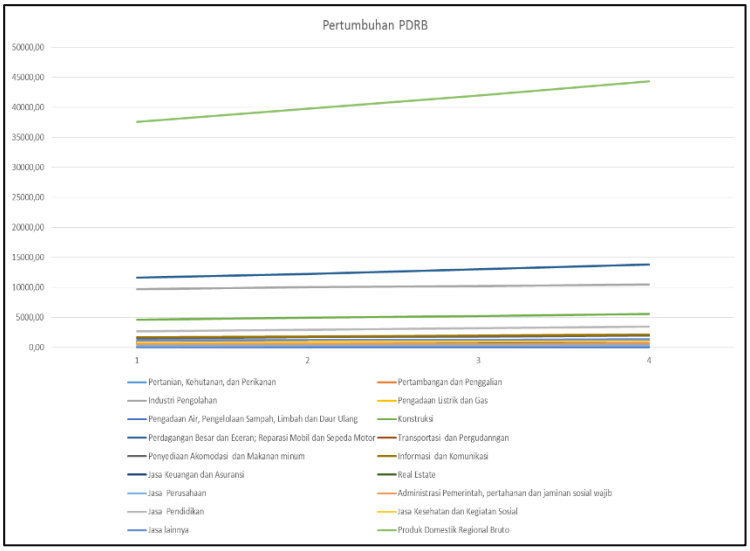

Gambar 3.6 Laju Pertumbuhan PDRB Kota Malang Atas Dasar Harga Konstan Tahun
Sumber: Kota Malang Dalam Angka Tahun 2017

Berdasarkan gambar 4.8 diatas dapat diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi menurut PDRB Kota Malang atas dasar harga konstan terus mengalami peningkatan pada setiap sektor ekonomi mulai dari tahun 2014. Sektor perdagangan menjadi sektor dengan pertumbuhan tertinggi diantara sektor lainnya. Sehingga dengan demikian gambaran perekonomian Kota Malang sudah tergambarkan pada konsentrasi ekonomi dengan tingkat kontribusi pada PDRB Kota Malang. Pada tabel 4.16 berikut adalah rincian nilai PDRB Kota Malang atas dasar harga konstan.

Tabel 3.16 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha di Kota Malang (miliar rupiah), 2013-2016

Lapangan Usaha	Tahun			
	2013	2014	2015	2016
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	103,20	105,10	107,40	107,50
Pertambangan dan Penggalian	40,50	39,80	38,40	36,20

Lapangan Usaha	Tahun			
	2013	2014	2015	2016
Industri Pengolahan	9738,00	10011,80	10261,70	10463,30
Pengadaan Listrik dan Gas	15,40	15,50	15,50	16,80
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	81,40	83,90	87,00	91,30
Konstruksi	4592,70	4998,50	5263,40	5612,10
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11586,30	12221,50	13022,70	13844,80
Transportasi dan Pergudanngan	912,20	977,50	1044,30	1122,30
Penyediaan Akomodasi dan Makanan minum	1549,80	1712,00	1851,00	1997,10
Informasi dan Komunikasi	1704,00	1843,10	1993,10	2174,20
Jasa Keuangan dan Asuransi	977,00	1042,60	1117,00	1205,10
Real Estate	545,70	585,30	627,80	674,30
Jasa Perusahaan	262,80	285,80	310,80	333,00
Administrasi Pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib	602,70	603,40	625,80	636,50
Jasa Pendidikan	2730,40	2957,30	3203,10	3456,80
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	887,30	967,80	1062,90	1152,10
Jasa lainnya	1217,90	1273,30	1319,60	1380,40
Produk Domestik Regional Bruto	**37.547,74**	**39.724,31**	**41.951,56**	**44.303,90**

Sumber: Kota Malang Dalam Angka, 2017

3.3 APBD KOTA MALANG

Laporan APBD Kota Malang tahun 2010 – 2016 mengalami peningkatan pada setiap tahun dari tahun 2010 hingga tahun 2015 dan mengalami penurunan pada tahun 2017. Perbandingan pendapatan dan belanja Kota Malang juga terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dengan ditunjukan pada gambar 4.8 pertumbuhnan APBD Kota Malang tahun 2010-2016 dimana perbandingan pendapatan dan belanja Kota Malang terus mengalamai defisit tiap tahun dan semakin besar defisit yang terjadi pada tahun 2015 hingga tahun 2016.

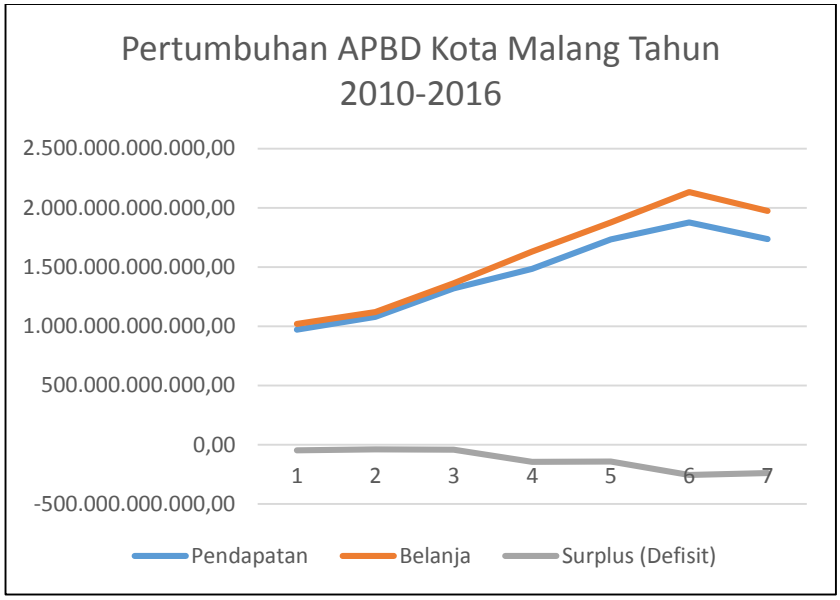

Gambar 3.7Pertumbuhan APBD Kota Malang Taun 2010-2016

Sumber: BKAD Kota Malang

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN

BAB 4
ANALISA DAN PEMBAHASAN

4.1 KONDISI UMUM KEMISKINAN DAERAH

4.1.1 Kondisi Umum Kemiskinan

Kondisi umum kemiskinan Kota Malang digambarkan dalam grafik tingkat kemiskinan dan persentase penduduk miskin Kota Malang (P0). Persentase kemiskinan adalah indikator yang digunakan untuk memotret besaran porsi penduduk miskin pada suatu wilayah. Tingkat kemiskinan atau sering juga disebut sebagai persentase penduduk miskin merupakan nilai yang menunjukan proporsi penduduk miskin terhadap total penduduk disuatu wilayah. Garis kemiskinan adalah nilai pendapatan yang menjadi standar pendapatan minimum masyarakat pada suatu daerah untuk memenuhi kebutuhan dasar.

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan Kota Malang

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (000)	P0 (Persentase Penduduk Miskin) %	Garis Kemiskinan (Rp/kapita/Bulan)	P1 (Indeks Kedalaman Kemiskinan) %	P2 (Indeks Keparahan Kemiskinan) %
2008	57,20	7,22	249.320	1,54	0,44
2009	44,37	5,58	252.024	1,14	0,33
2010	48,40	5,90	274.863	1,17	0,34
2011	45,44	5,50	302.103	0,73	0,17
2012	43,40	5,19	330.765	0,96	0,27
2013	40,90	4,85	362.162	0,48	0,07
2014	40,64	4,80	381.400	0,43	0,06
2015	39,10	4,60	411.709	0,53	0,11
2016	35,89	4,17	454.061	0,56	0,12

Berdasarkan tabel 5.1 dapat dilihat bahwa penduduk miskin mengalami penurunan pada setiap tahunnya di Kota Malang. Pada tahun 2012 berada pada persentase penduduk miskin sebesar 5,19 % dengan garis kemiskinan sebesar Rp 330.765,00 tumbuh hingga 4,33 % dengan garis kemiskinan yang semakin tinggi mencerminkan tingkat belanja kebutuhan dasar penduduk juga mengalami peningkatan ke arah yang positif sebesar Rp 426.527,00. Sedangkan indeks kedalaman kemiskinan tahun 2016 berada pada angka 0,56 dimana semakin meningkat sejak mengalami

penurunan yang drastis pada tahun 2012 sebesar 0,96. Peningkatan ini diinterpretasikan bahwa semakin meningkatnya indeks kedalaman kemiskinan maka semakin jauh pengeluaran penduduk dari rata-rata garis kemiskinan daerah. Sedangkan indeks keparahan kemiskinan pada tahun 2016 berada pada angka 0,12 dimana ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin tidak besar dan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Berdasarkan gambaran ini kondisi kemiskinan Kota Malang terus mengalami perbaikan setiap tahun dan cukup stabil mengalami penurunan jumlah penduduk miskin pada tiap tahunnya.

1. Analisis Antar Wilayah

   Analisa antar wilayah untuk membandingkan dan mencari posisi relatif daerah terhadap daerah sekitarnya sehingga dapat tergambarkan sejauh mana kemiskinan absolut yang terjadi di daerah tersebut. Analisa antar wilayah dilakukan dengan membandingkan tingkat kemiskinan Kota Malang dengan daerah lain di Provinsi Jawa Timur. Tingkat kemiskinan berupa perbandingan persentase dan jumlah penduduk miskin antara Kota Malang dan daerah lain di Provinsi Jawa Timur. Gambaran kondisi kemiskinan dapat dilihat pada tabel berikut.

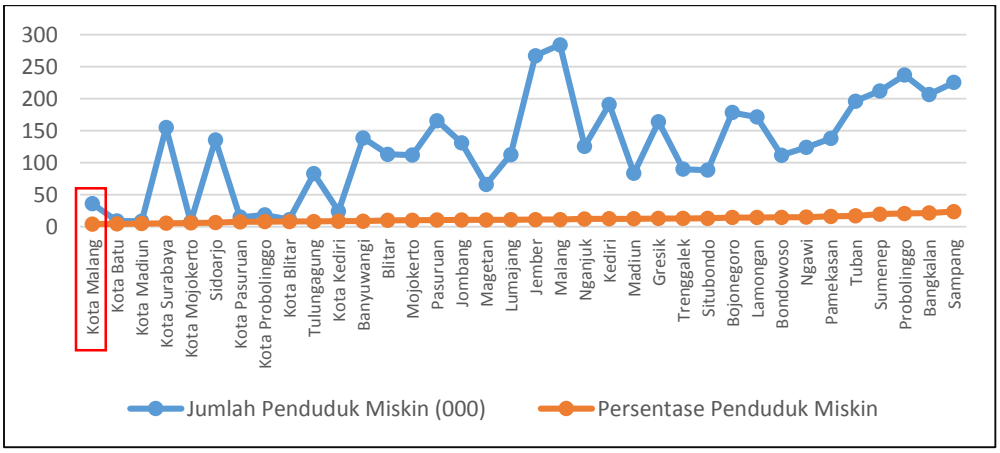

Gambar 4.1 Tingkat Kemiskinan Antar Wilayah

Sumber : Kota Malang Dalam Angka, 2017 dan BPS Jawa Timur

Tingkat kemiskinan antar wilayah di Provinsi Jawa Timur Kota Malang berada di posisi terbaik dengan persentase penduduk miskin terendah diantara wilayah kabupaten/kota lain di Provinsi Jawa Timur dengan persentase pada

tahun 2016 sebesar 4,17% dengan total jumlah penduduk miskin sebesar 35.890 jiwa penduduk. Indeks kedalaman kemiskinan Kota Malang akan dibandingkan dengan kondisi indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan yang terdapat di kabupaten/kota lain di Provinsi Jawa Timur. Berikut adalah gambaran perbandingan antar wilayah untuk indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan.

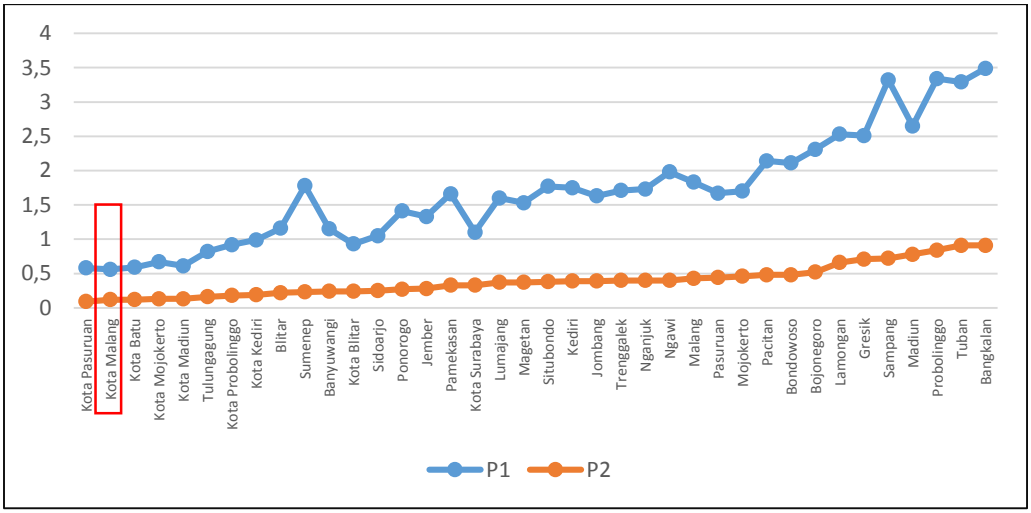

Gambar 4.2 Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2016

Sumber : Kota Malang Dalam Angka, 2017 dan BPS Jawa Timur

Berdasarkan hasil data indeks kedalaman kemiskinan pada gambar 5.3 posisi Kota Malang berada di posisi yang cukup baik yakni terendah setelah Kota Pasuruan dengan tingkat kedalaman kemiskinan sebesar 0,56 dan tingkat keparahan kemiskinan sebesar 0,12. Dengan demikian bahwa kemiskinan di Kota Malang sudah baik dari segi ketimpangan dan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk miskin yang ada. Tingkat kemiskinan Kota Malang dapat digambarkan pada jangka waktu kebelakang untuk mengetahui fluktuasi persentase jumlah penduduk miskin. Berikut adalah gambaran perkembangan tingkat kemiskinan Kota Malang.

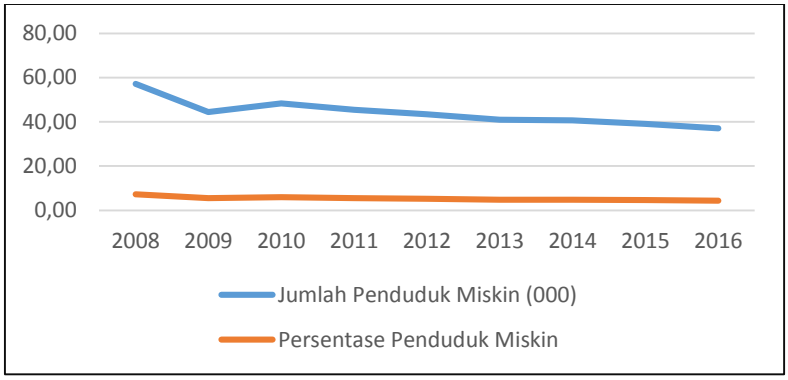

Gambar 4.3 Analisa Antar Waktu Tingkat Kemiskinan Kota Malang

Sumber : Kota Malang Dalam Angka, 2017

Gambar 5.3 menggambarkan bahwa jumlah pendudu dan persentase penduduk miskin di Kota Malang terus mengalami penurunan dari tahun 2008 hingga 2016 secara perlahan. Penurunan persentase penduduk miskin terbanyak pada tahun 2008 hingga 2009 dimana tingkat kemiskinan penduduk sebanyak 7,22 % dan turun hingga 5,58%. Rata-rata penurunan tingkat kemiskinan di Kota Malang sebesar 0,36 % yang cukup konsisten dan terbesar pada tahun 2008 hingga 2009 dimana tingkat pertumbuhan pengurangan penduduk miskin sebesar 1,64 %. Relefansi pengurangan angka kemiskinan Provinsi Jawa Timur relefan dalam pengurangan angka kemiskinan di Kota Malang.

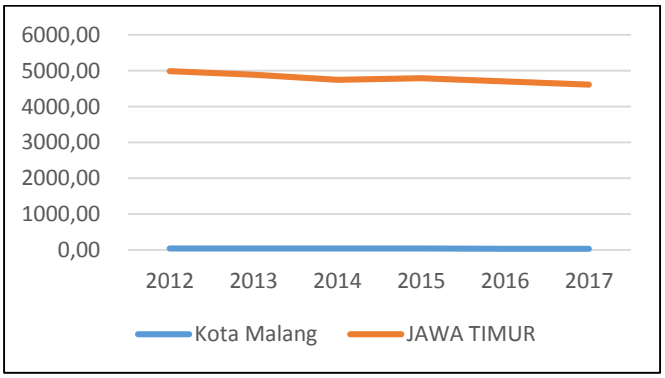

Gambar 4.4 Relefansi pengurangan Angka Kemiskinan Kota Malang

Sumber : Kota Malang Dalam Angka, 2017 dan BPS Jawa Timur

4.1.2 Bidang Ketenagakerjaan

Bidang ketenagakerjaan juga berpengaruh dalam penentuan tingkat kemiskinan suatu daerah. Angka pengangguran terbuka menggambarkan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Sehingga dapat dilihat sebesar apa pengangguran yang terjadi terhadap angkatan kerja di suatu daerah.

4.1.2.1 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja. (BPS)

1. Analisa Perkembangan Antar Waktu

   Tingkat pengangguran terbuka di Kota Malang dianalisa trend perkembangannya antar waktu kebelakang untuk mengetahui perkembangan tingkat pengangguran terbuka yang terjadi dan menjadi input untuk analisa efektifitas dan relevansi pengurangan pengangguran terbuka di Kota Malang terhadap Provinsi Jawa Timur dan Nasional. Pada gambar 3.5 berikut adalah tingkat pengangguran terbuka Kota Malang pada tahun 2001 – 2017.

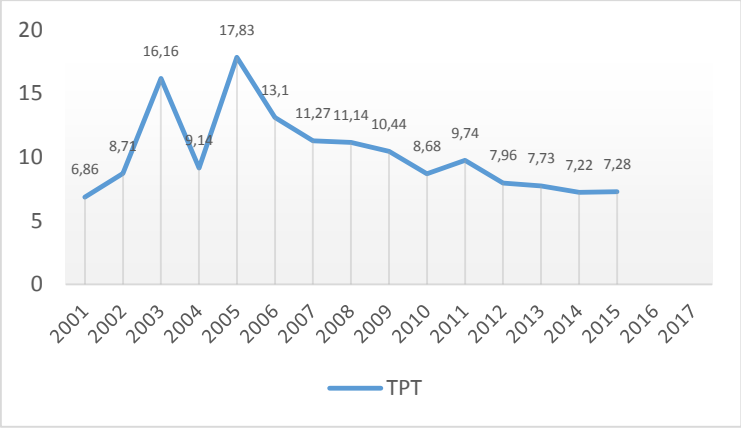

Gambar 4.5 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota malang 2001 – 2017

Sumber : Laporan Eksekutif Ketenagakerjaan Kota Malang, 2017

Berdasarkan gambar 5.5 tingkat pengangguran terbuka Kota Malang diketahui tingkat pengangguran tertinggi pada tahun 2005 dan terus

mengalami penurunan dan kenaikan secara fluktuatif hingga tahun 2012 mengalami penurunan perlahan secara stabil dengan rata-rata penurunan sebesar 0,37% dan kembali mengalami kenaikan sebesar 0,06% pada tahun 2015. Analisa antar wilayah tingkat pengangguran terbuka Kota Malang dilakukan untuk mengetahui posisi Kota Malang terhadap kabupaten/kota lain di Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan hasil pada gambar 5.6 bahwa Kota Malang berada di posisi terbesar kedua angka pengangguran terbuka yang dimiliki yakni sebesar 7,28 % lebih besar dari kabupaten atau kota yang lain di Jawa Timur.

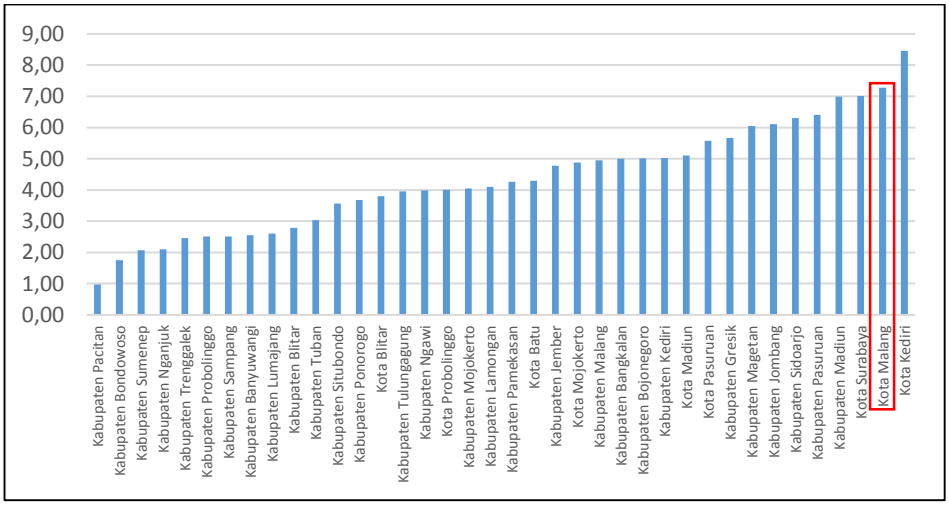

Gambar 4.6 Analisa Posisi Relatif Bidang Ketanagakerjaan

Sumber : Laporan Eksekutif Ketenagakerjaan Kota Malang, 2017

2. Relefansi dan Efektifitas

Relefansi dilihat dari sejauh mana pertumbuhan pengangguran terbuka yang terjadi di Kota Malang dan implikasinya terhadap pertumbuhan pengangguran terbuka di tingkat provinsi dan nasional. Secara relefansi pertumbuhan tingkat pengangguran terbuka di Kota Malang dengan provinsi dan nasional terdapat relefansi yang terjadi dimana pada tahun 2006 terjadi penurunan yang konstan hingga tahun 2010 di Kota Malang dan Provinsi Jawa Timur, serta terjadi peningkatan kembali pada akhir tahun 2015 dimana tingkat pengangguran terbuka mengalami peningkatan sebesar 0,06%.

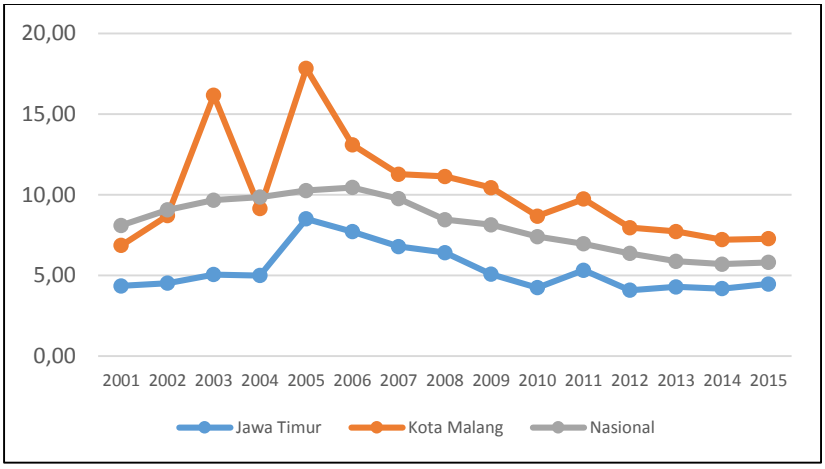

Gambar 4.7 Relefansi TIngkat Pengangguran Terbuka Kota Malang Terhadap Provinsi dan Nasional

Sumber : Laporan Eksekutif Ketenagakerjaan Kota Malang, 2017

Efektifitas program penurunan tingkat pengangguran terbuka di Kota Malang masih belum dapat dikatakan baik dimana laju penurunan masih dibawa 1% dan pada akhir tahun 2015 mengalami peningkatan kembali sebesar 0,06%. Laju pertumbuhan yang fluktuatif juga berpengaruh dalam menggambarkan efektifitas program yang kurang efektif dalam mengurangi tingkat pengangguran terbuka di Kota Malang dari tahun 2010 hingga 2015.

4.1.3 Bidang Kesehatan

Kesehatan adalah salah satu indikator dalam menerangkat tingkat kesejahteraan masyarakat suatu daerah. Pembahasan pada bidang kesehatan meliputi angka kematian bayi yang menggambarkan jumlah kematian bayi usia di bawah 1 tahun (0-11 bulan) per 1.000 kelahiran hidup dalam tahun tertentu. Angka balita penderita gizi buru dimana angka ini menunjukkan jumlah penderita gizi buruk yang terdapat di daerah terkait. Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.

4.1.3.1 Angka Kematian Bayi

Angka kematian bayi adalah angka yang menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada waktu tertentu atau dapat dikatakan sebagai probabilias bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun. Angka kematian bayi merupakan indikator untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat intensif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua bayi.

1. Analisa perkembangan antar waktu dan posisi relatif

   Angka kematian bayi di Kota malang mengalami penurunan secara stabil dari tahun 2012 hingga 2016 dimana kondisi awal pada tahun 2012 dengan tingkat kematian bayi yang lahir hidup sebesar 22,28 % turun hingga 17,04% pada tahun 2016. Rasio penurunan angka kematian cenderung stabil pada angka 1,2 % hingga 1,5 %.

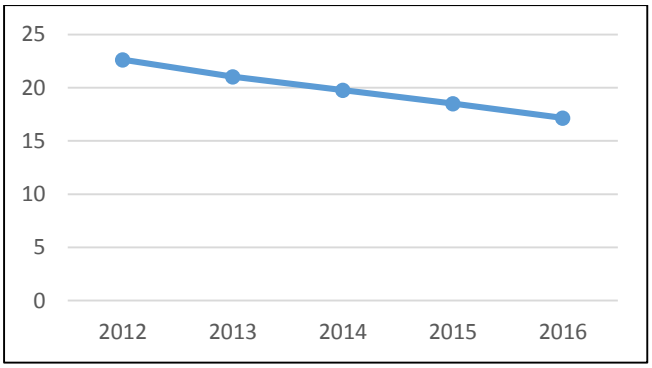

Gambar 4.8 Tingkat Kematian Bayi Lahir Hidup di Kota Malang

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Malang, 2017

Sedangkan jika dilihat posisi relatifnya terhadap kabupaten atau kota lain di Provinsi Jawa Timur, Kota Malang berada posisi yang sangat baik yakni terendah setelah Kota Blitar angka kematian bayi lahir hidup pada tahun 2016. Jauh dibandingkan dengan Kabupaten Probolinggo yang memiliki angka kematian bayi terbesar sebesar 56 %.

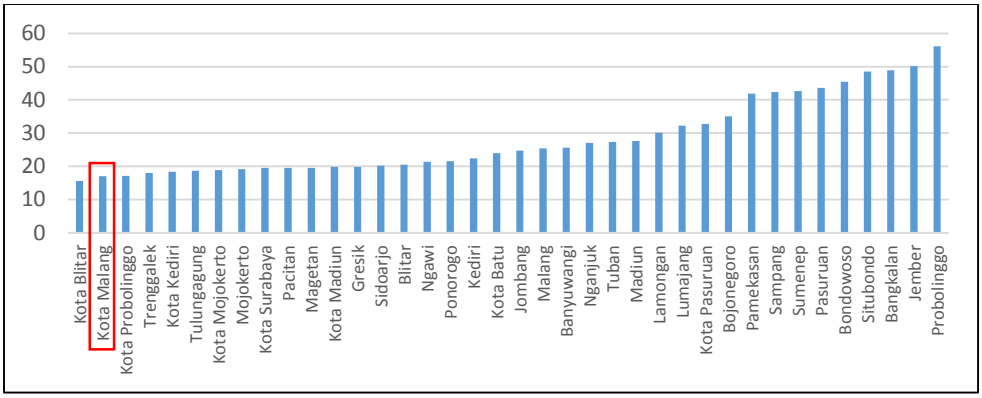

Gambar 4.9 Tingkat Kematian Bayi Lahir Hidup Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur

Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur, 2017

2. Relefansi dan efektifitas

Efektifias pengurangan angka kematian bayi lahir hidup di Kota malang pada setiap tahun terus mengalami penurunan secara stabil dimana rata-rata tingkat pengurangan angka kematian bayi lahir hidup sebesar 1,31 % setiap tahun. Hal demikian dapat dikatakan efektifitas program pengurangan angka kematian bayi telah tercapai di Kota Malang dengan semakin menurunnya angka kematian bayi pada setiap tahunnya. Sedangkan pada relefansi terhadap Provinsi Jawa Timur dimana setiap penurunan angka kematian bayi lahir hidup di Kota Malang juga relefan terhadap penurunan angka kematian di Jawa Timur. Data dapat dilihat pada gambar 5.11 berikut.

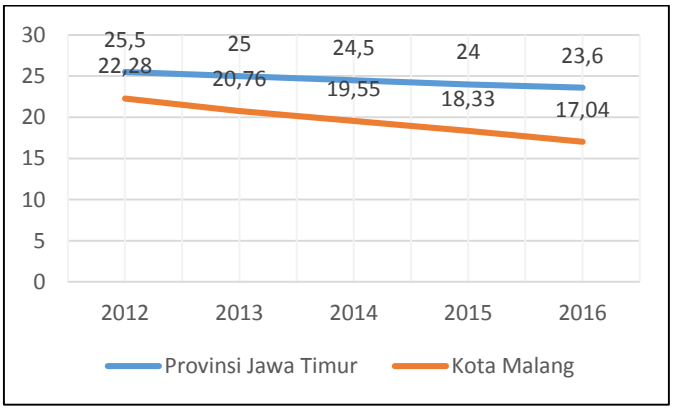

Gambar 4.10 Relefansi Tingkat Kematian Bayi Lahir Hidup

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur, 2017

4.1.3.2 Angka Harapan Hidup

Angka harapan hidup adalah rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkngan masyarakatnya. Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.

1. Analisa perkembangan antar waktu dan posisi relatif antar wilayah

   Angka harapan hidup mencerminkan panjang umur hidup masyarakat pada suatu daerah. Angka harapan hidup ini dapat mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang dapat bertahan hidup hingga umur tertentu. Kota Malang memiliki angka harapan hidup hingga usia 72,8 tahun pada tahun 2017. Terjadi peningkatan angka harapan hidup di Kota Malang yang terjadi setiap tahunnya mulai dari tahun 2010 hingga 2017. Tingkat peningkatan terjadi secara konstan setiap tahunnya. Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2010 – 2011 dimana meningkat sebesar 1,89 tahun dan secara konstan terus meningkat dengan rata-rata peningkatan angka harapan hidup sebesar 0,09 tahun pada setiap tahunnya.

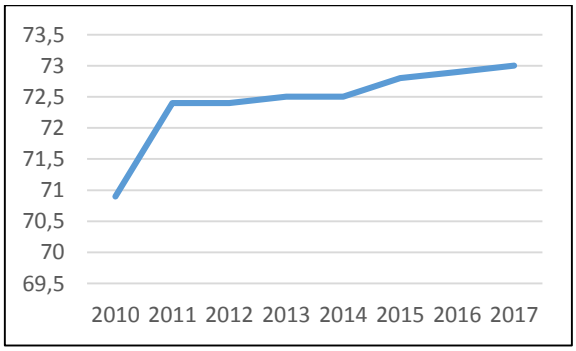

Gambar 4.11 Angka Harapan Hidup Kota Malang Tahun 2010-2017

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Malang, 2017

Secara posisi dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Jawa Timur Kota Malang berada pada posisi ke 9 diantara kabupaten kota lain. Angka harapan hidup

tertinggi didapat oleh Kota Surabaya dengan angka harapan hidup sebesar 73,9 tahun dibandingkan dengan Kota Malang sebesar 72,8 tahun. Berikut pada gambar 5.12 adalah posisi relatif angka harapan hidup Kota Malang terhadap kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur.

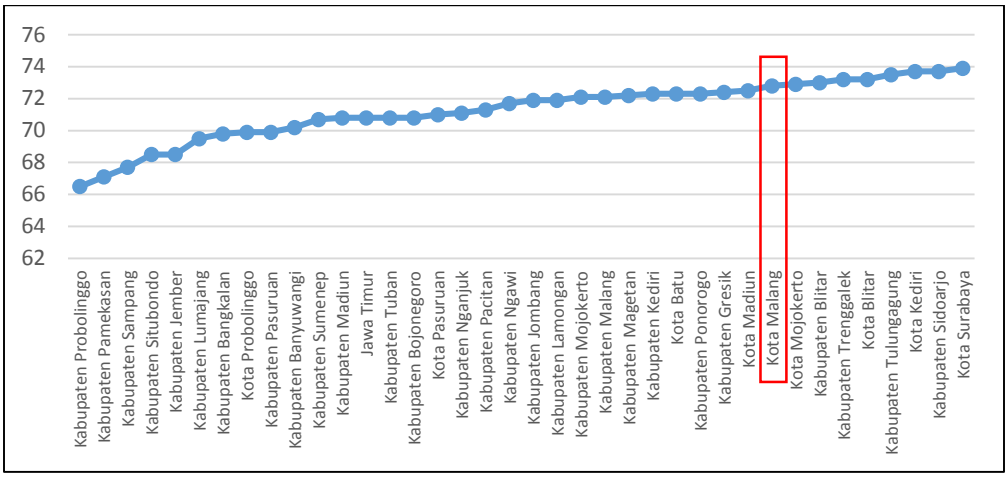

Gambar 4.12 Posisi Relatif Angka Harapan Hidup Kota Malang terhadap Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur, 2017

2. Relefansi dan efektifitas

Efektifitas angka harapan hidup di Kota Malang terus mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini dapat menggambarkan terjadinya peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Malang yang terjadi. Peningkatan angka harapan hidup terjadi setiap tahunnya dengan rata-rata peningkatan harapan hidup 0,09 tahun. Relefansi kenaikan angka harapan hidup Kota Malang juga

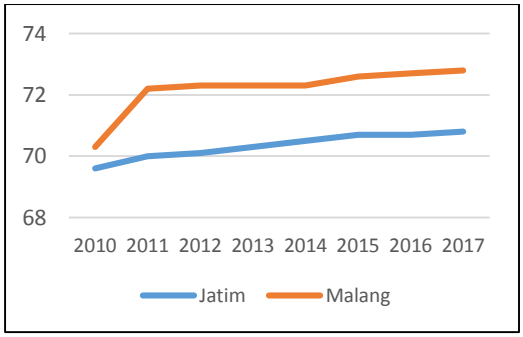

Gambar 4.13 Relefansi Angka Harapan Hidup Kota Malang - Provinsi Jawa Timur

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur, 2017

4.1.3.3 Konsumsi dan pengeluaran

Salah satu indikator kesejahteraan masyarakat adalah banyaknya kalori dan protein yang dikonsumsi. ngka kecukupan konsumsi kalori di Indonesia berdasarkan Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi VIII (2004) menetapkan patokan kecukupan konsumsi kalori sebesar 2000 kkal per kapita per hari. Sedangkan konsumsi protein berdasarkan Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi XI tahun 2012 rata-rata sebesar 57 gram protein. Kondisi di Kota Malang sendiri dapat digambarkan pada grafik dibawah ini.

Selain konsumsi dalam mengurai jumlah masyarakat sejahtera dan prasejahtera dapat menggunakan indikator jumlah pengeluaran. Pengeluaran rumah tangga dibedakan menurut kelompok makanan dan bukan makanan. Perubahan pendapatan seseorang akan berpengaruh pada pergeseran pola pengeluaran. Semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi pengeluaran bukan makanan. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat dipakai sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, dimana perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan

Konsumsi protein di Kota Malang sebesar 62,33 gram protein perkapita perhari sudah memenuhi standar rata-rata pemenuhan kebutuhan protein. Secara posisi konsumsi protein masyarakat Kota Malang lebih rendah dari 14 kabupaten/kota lain yakni Kota Surabaya, Kota Madiun dan Kota Probolinggo. Sedangkan dalam konsumsi kalori perkapita perhari di Kota Malang sendiri masyarakat rata-rata mengkonsumsi kalori sebanyak 2046,85 kkal perkapita perhari. Angka tersebut berada pada posisi rata-rata minimal kecukupan konsumsi kalori perhari yang sebanyak 2000 kkal. Dengan angka tersebut Kota Malang tentu saja tertinggal oleh kota-kota dan kabupaten lain di Jawa Timur seperti Kabupaten Malang dengan konsumsi 2184 kkal perhari dan tertinggi Kabupaten Sumenep dengan 2585,43 kkal perhari.

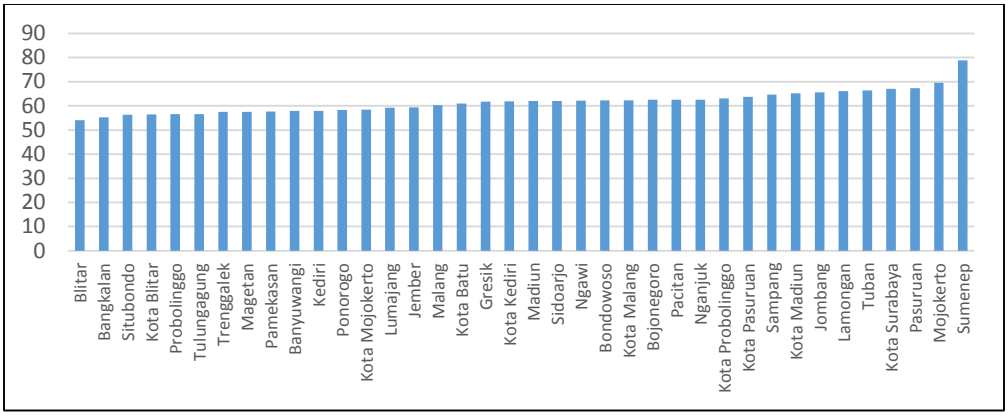

Gambar 4.14 Konsumsi Protein Perkapita Perhari Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur 2017

Sumber : Statistik Pengeluaran Untuk Konsumsi Rumah Tangga Provinsi Jawa Timur, 2017

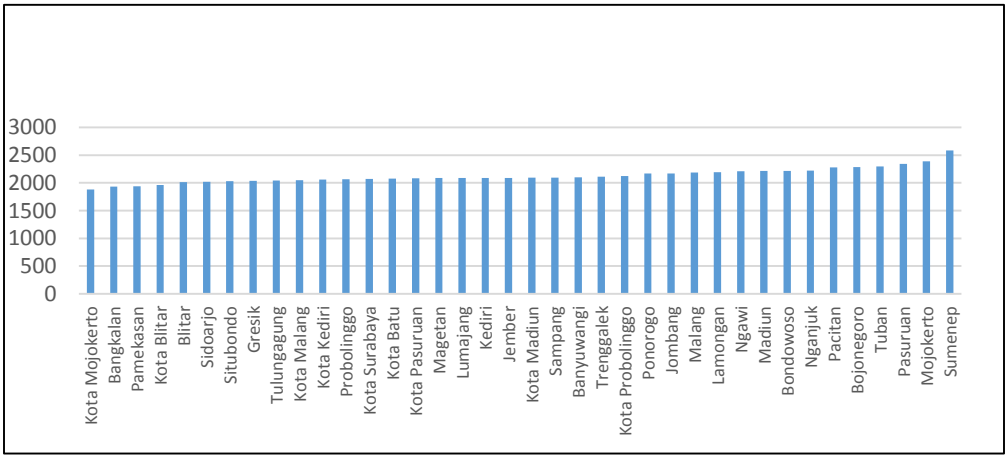

Gambar 4.15 Konsumsi Kalori Perkapita Perhari Kabupaten/Kota Provinsi Jawa timur 2017

Sumber : Statistik Pengeluaran Untuk Konsumsi Rumah Tangga Provinsi Jawa Timur, 2017

Secara pengeluaran Kota Malang dibedakan menjadi dua yakni konsumsi dan bukan konsumsi untuk menggambarkan sejauh mana kesejahteraan masyarakat Kota Malang. Pengeluaran penduduk Kota Malang dapat dilihat pada grafik dibawah ini. pada grafik tersebut diketahui bahwa proporsi angka pengeluaran makanan dan non makanan didominasi oleh pengeluaran non makanan. Hal ini mengindikasikan bahw rata-rata masyarakat Kota Malang dengan pendapatan yang diterima sudah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dengan condong untuk mulai melakukan pengeluaran non makanan untuk penunjang daripada kebutuhan dasar.

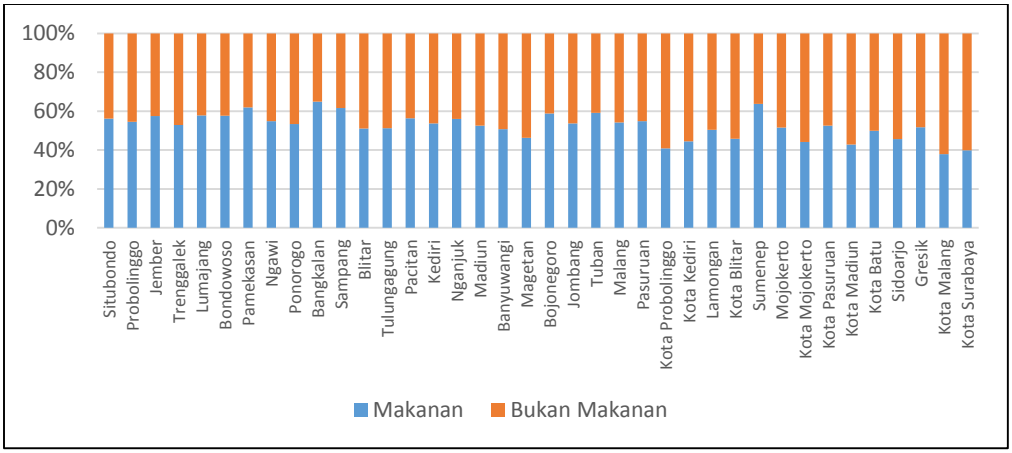

Gambar 4.16 Pengeluaran Makanan dan Bukan Makanan Masyarakat Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur

Sumber : Statistik Pengeluaran Untuk Konsumsi Rumah Tangga Provinsi Jawa Timur, 2017

4.1.4 Bidang Pendidikan

4.1.4.1 Angka Partisipasi Kasar

APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Jika nilai APK mendekati atau lebih dari 100 persen menunjukkan bahwa ada penduduk yang sekolah belum mencukupi umur dan atau melebihi umur yang seharusnya. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa wilayah tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya.

1. Analisi perkembangan antar waktu dan posisi relatif antar wilayah

   Angka partisipasi kasar Kota Malang tahun 2008 hingga 2016 terus mengalami fluktuasi yang tinggi. Pada setiap jenjang sekolah tidak mengalami peningkatan yang stabil. Jenjang SD mengalami peningkatan setiap tahun sebesar 0,3% pertahun, jenjang SMP mengalami penurunan hingga 2,4 % pertahun dan jenjang SMA mengalami peningkatan setiap tahun sebesar 1,73% pertahun. Posisi Kota Malang diantara Kabupaten/kota lain pada tingkat angka partisipasi kasar pada setiap jenjang pendidikan menunjukkan angka yang tidak terlalu baik dimana angka partisipasi kasar pada tingkat SD Kota Malang masih dibawah rata-rata Kabupaten/kota lain dengan tingkat APK sebesar 107,12 sedangkan rata-rata APK SD Kabupaten/kota di Provinsi

Jawa Timur mencapai 108. Pada tingkat SMP berada sedikit diatas rata-rata yakni sebesar 95,63 sedangkan rata-rata Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur adalah sebesar 92. Pada jenjang SMA masih dibawah rata-rata kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur dengan tingkat APK sebesar 83,15 sedangkan rata-ratanya adalah sebesar 84,4.

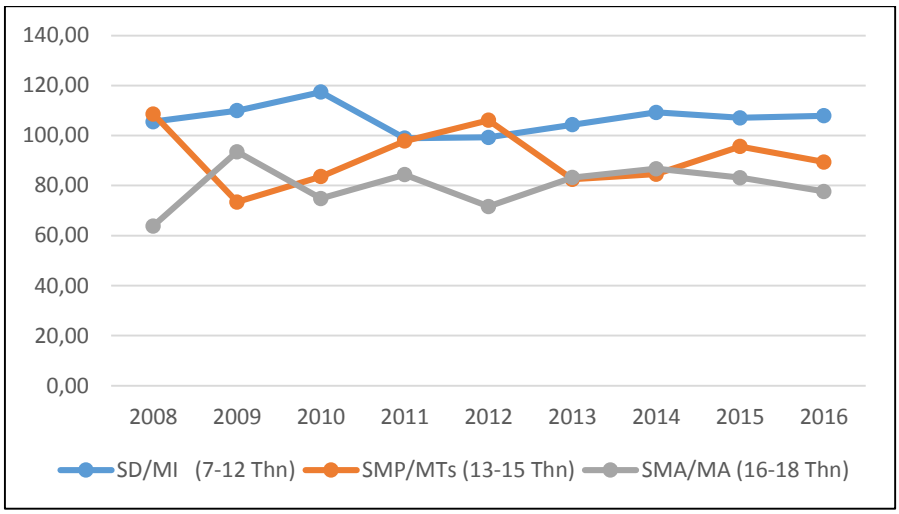

Gambar 4.17 Angka Partisipasi Kasar Kota Malang Tahun 2008 – 2016

Sumber : BPS Kota Malang

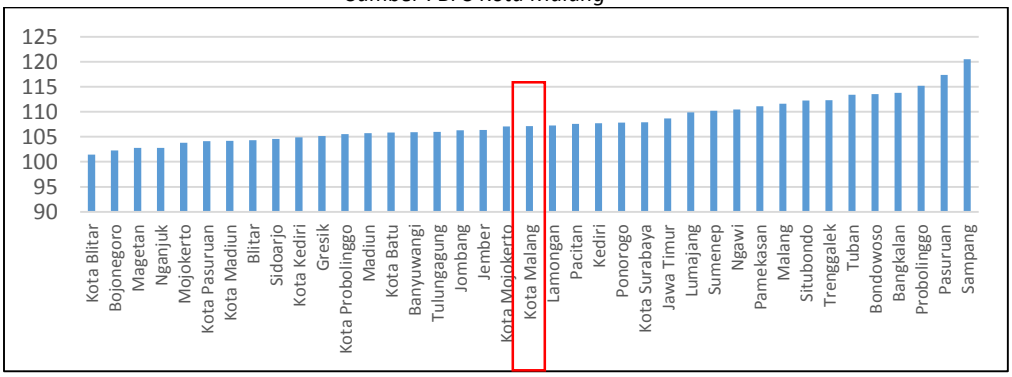

Gambar 4.18 Angka Partisipasi Kasar SD Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2015

Sumber : BPS Kota Malang

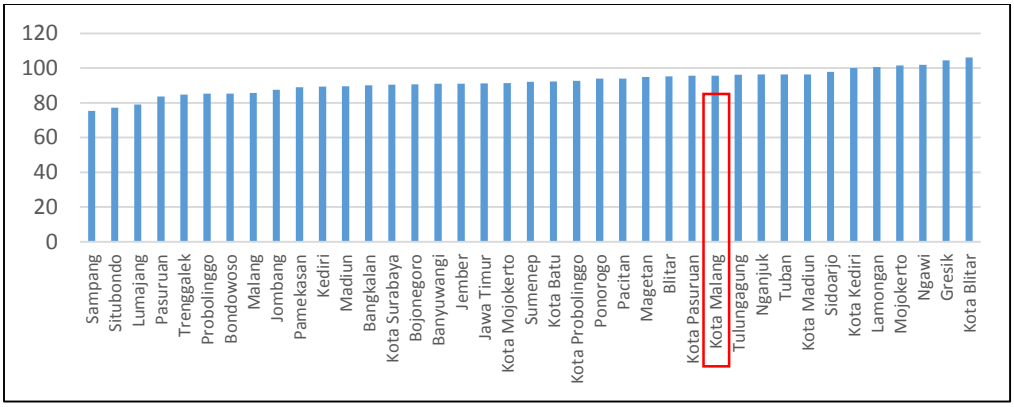

Gambar 4.19 Angka Partisipasi Kasar SMP Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur 2015

Sumber : BPS Kota Malang

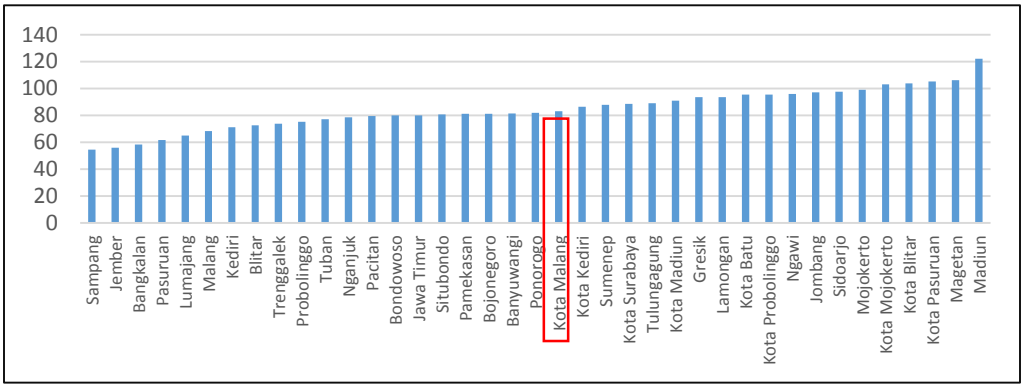

Gambar 4.20 Angka Partisipasi Kasar SMA Kabupaten/Kota Provinsi Jawa TImur Tahun 2015

Sumber : BPS Kota Malang

2. Relefansi dan Efektifitas

Berdasarkan hasil pengolahan analisis relefansi program peningkatan APK antara Kota Malang dan Provinsi Jawa Timur masih belum terlihat relefansi yang signifikan. Pada jenjang SD pada tahun 2014-2015 terjadi peningkatan APK pada Provinsi Jawa Timur namun di Kota Malang malah mengalami penurunan. Relefansi terlihat pada jenjang SMP dimana peningkatan pada Provinsi Jatim juga berdampak pada Kota Malang. Sebaliknya juga terjadi pada jenjang SMA yang belum terjalin relefansinya.

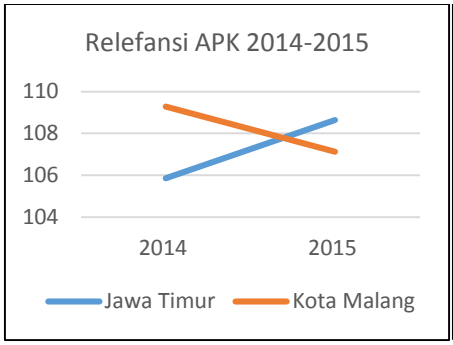

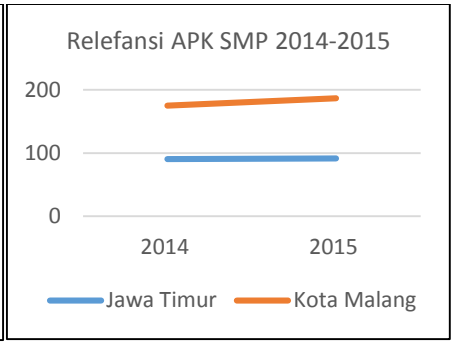

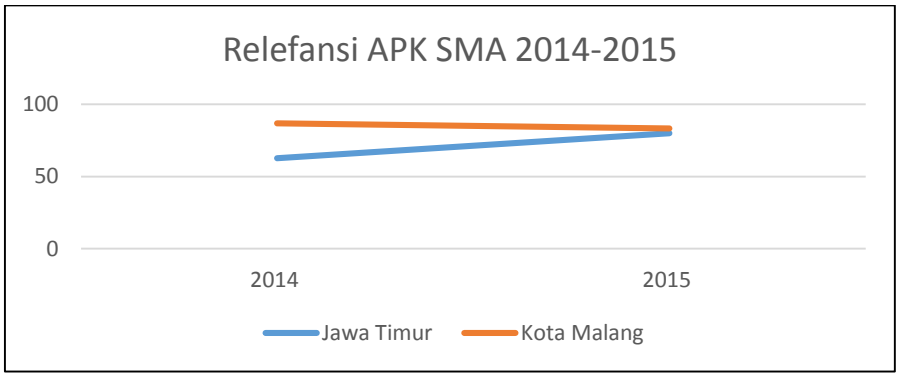

Gambar 4.21 Relefansi APK Tiap Jenjang Pendidikan Kota Malang dan Provinsi Jawa Timur 2014-2015

Sumber : BPS Kota Malang dan BPS Jawa Timur

4.1.4.2 Angka Partisipasi Murni

APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Jika APM = 100, berarti seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu. Angka partisipasi murni diartikan sebagai Proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. Sejak tahun 2007, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan.

1. Analisa perkembangan antar waktu dan posisi relatif antar wilayah

   Angka partisipasi murni Kota Malang pada tahun 2008 hingga 2016 mengalami fluktuasi. Peningkatan rata-rata tiap tahun terjadi pada jenjang SD sebesar 1,18 % pertahun, jenjang SMP 0,56% pertahun dan SMA 1,36% pertahun. Secara posisi relatif terhadap Kabupaten Kota lain pada jenjang SD APM Kota Malang berada di posisi 21 dengan tingkat APM sebesar 97,31%.

Pada jenjang SMP dengan tingkat APM sebesar 86,66% berada pada urutan ke 12 diantara kabupaten kota lain di Provinsi Jawa Timur. Pada jenjang SMA dengan APM sebesar 59,23% berada pada urutan ke 26 diantara kabupaten kota lain di Provinsi Jawa Timur.

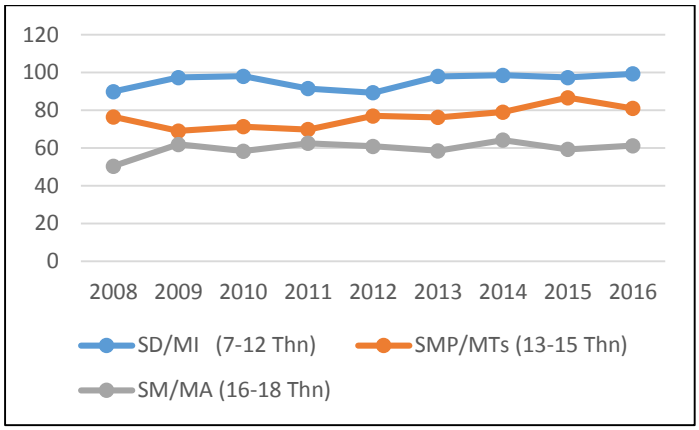

Gambar 4.22 Angka Partisipasi Murni Kota Malang Tahun 2008 – 2016

Sumber : BPS Kota Malang

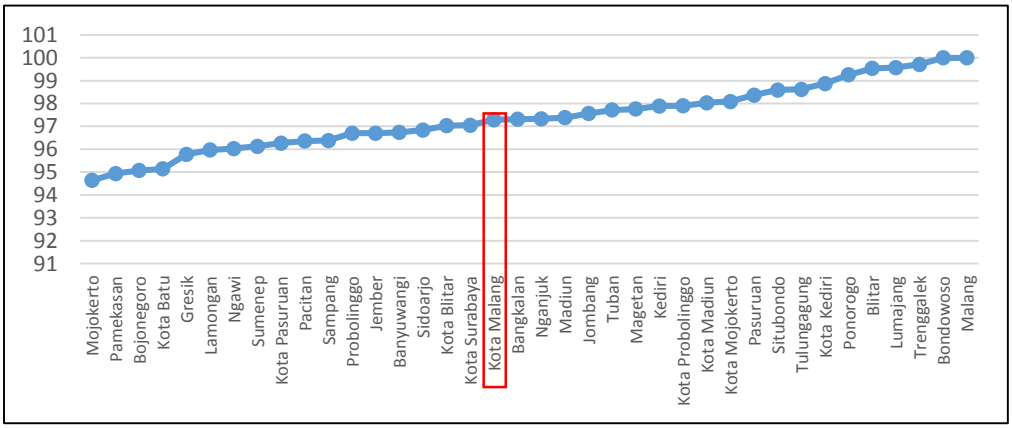

Gambar 4.23 APM SD Kabupaten Kota Provinsi Jatim

Sumber : Sumber : BPS Jawa Timur

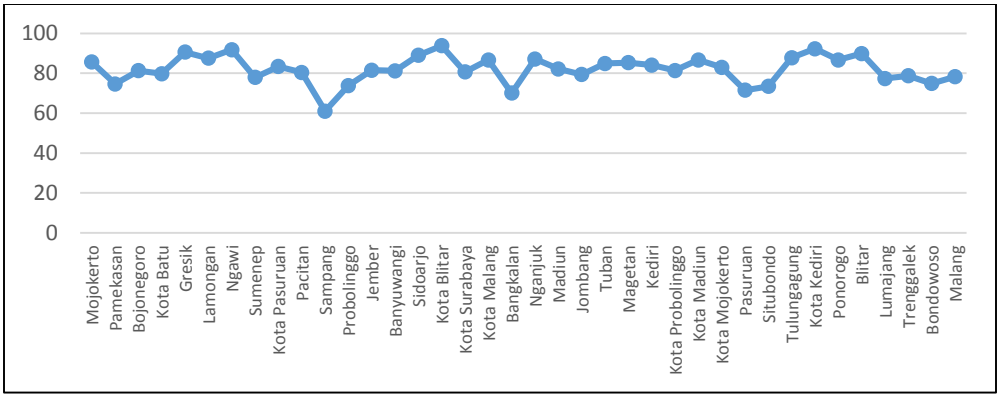

Gambar 4.24 APM SMP Kabupaten Kota Provinsi Jawa Timur

Sumber : BPS Jawa Timur

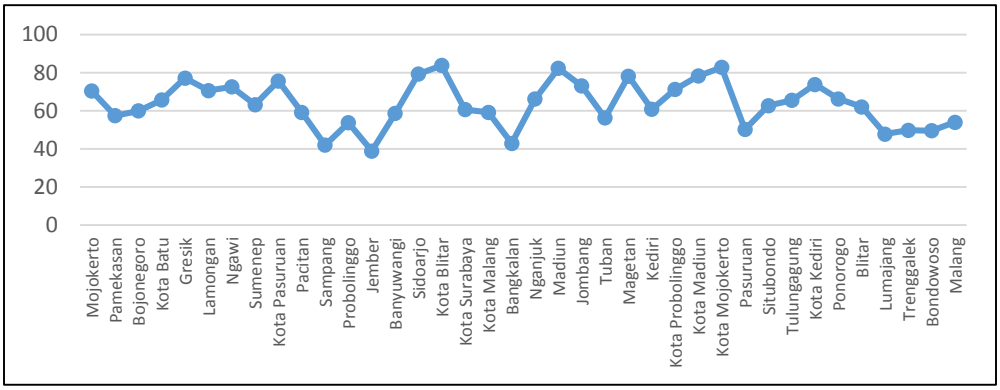

Gambar 4.25 APM SMA Kabupaten Kota Provinsi Jawa Timur

Sumber : BPS Jawa Timur

4.1.4.3 Angka Partisipasi Sekolah

Angka partisipasi sekolah adalah Proporsi dari semua anak yang masih sekolah pada suatu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai. Sejak Tahun 2009, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan. APS yang tinggi menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum. Pada kelompok umur mana peluang tersebut terjadi dapat dilihat dari besarnya APS pada setiap kelompok umur.

1. Analisis Perkembangan antar waktu dan posisi relatif antar wilayah

   Secara posisi relatif dibandingkan dengan Kabupaten Kota lain di Provinsi Jawa Timur Kota Malang masih tertinggal oleh beberapa Kabupaten Kota yang lain di Provinsi Jawa Timur. Namun posisi tersebut sudah cukup baik

melihat angka partisipasi sekolah di Kota Malang pada tingkat SD sebesar 100%, SMP 95,8% dan SMA 78,3%.

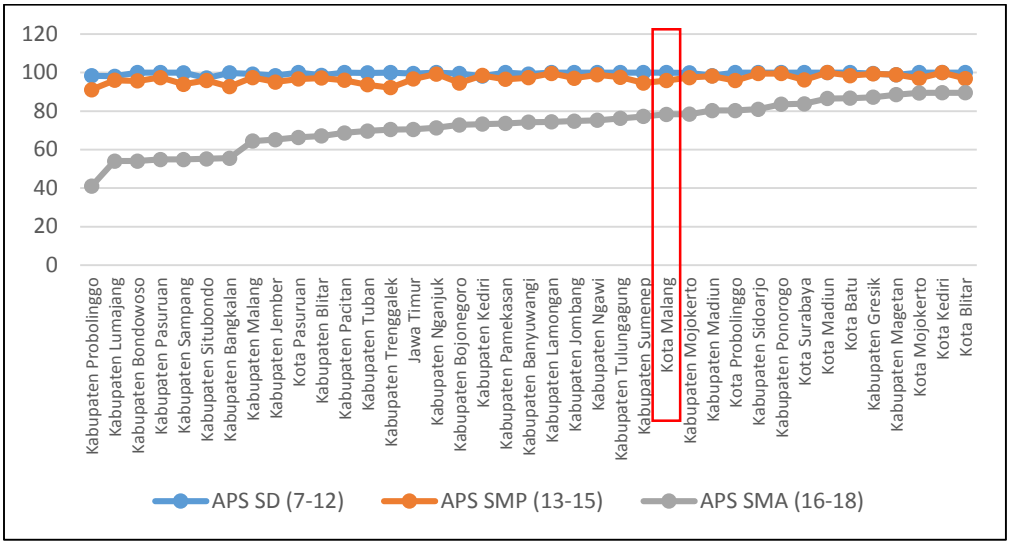

Gambar 4.26 Angka Partisisipasi Sekolah Kabupaten Kota di Provinsi Jawa Timur 2016

Sumber : BPS Jawa Timur

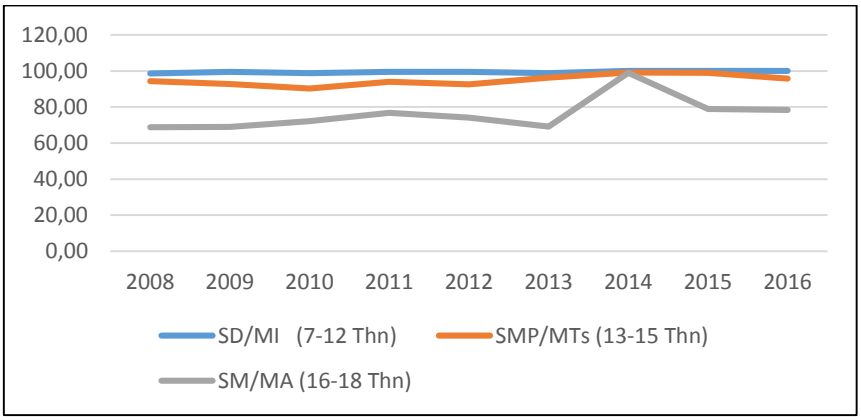

Gambar 4.27 Angka Partisipasi Sekolah Kota Malang Tahun 2006 – 2016

Sumber : BPS Jawa Timur

Secara perkembangan tiap tahun angka partisipasi sekolah cenderung fluktuatif seperti pada angka partisipasi sekolah pada jenjang SMA mengalami peningkatan secara signifikan pada tahun 2014 dan mengalami penurunan yang tajam pula pada tahun selanjutnya. Rata-rata peningkatan

angka partisipasi sekolah pada jenjang SD sebesar 0,17%, jenjang SMP sebesar 0,18% dan jenjang SMA sebesar 1,19% tiap tahun nya.

2. Relefansi dan efektifitas

Secara relefansi program peningkatan APS antara Kota Malang, sedikit relefansi yang terjadi. Relefansi hanya terjadi pada jenjang SMA dimana terjadi peningkatan pada provinsi dan terdampak didalam Kota Malang.

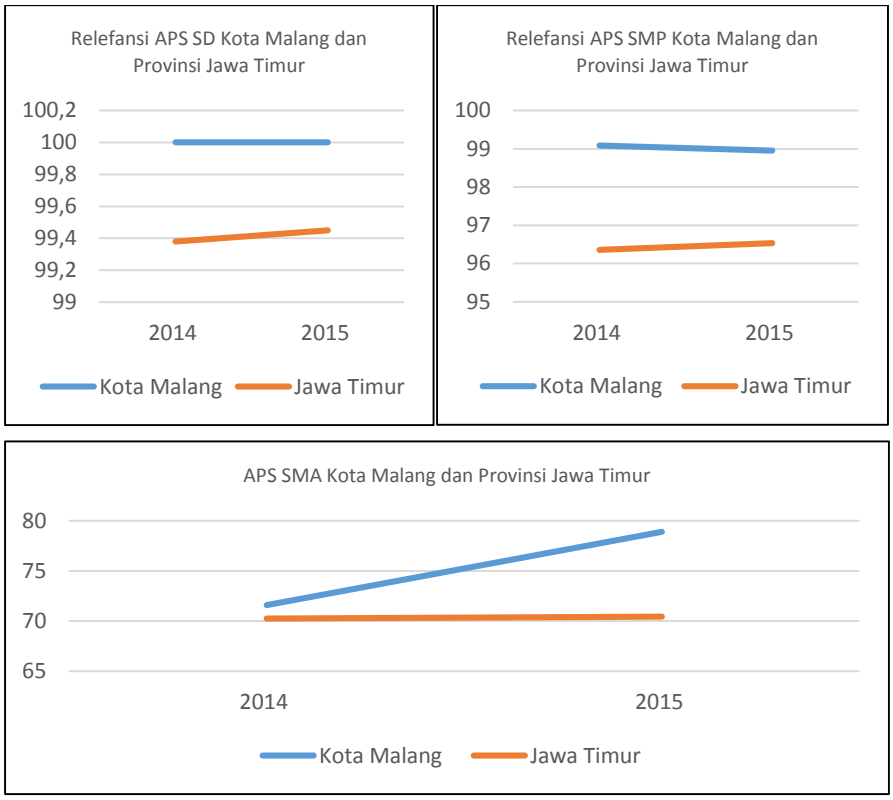

Gambar 4.28 Relefansi APS Kota Malang dan Provinsi Jawa Timur

Sumber : BPS Jawa Timur

4.1.4.4 Rasio Guru Murid SD/MI

1. Perkembangan antar waktu dan posisi relatif antar wilayah

Rasio guru murid pada SD di Kota Malang sebesar 15,91 dimana setiap 15 siswa ditangani oleh 1 guru. Posisi Kota Malang berada di posisi ke 24 diantara kabupaten/kota lain di Provinsi Jawa Timur, lebih rendah dari beberapa Kabupaten/Kota lain. Sedangkan secara real time peningkatan rasio guru SD mengalami fluktuasi sehingga tidak terlihat efektifitas peningkatan rasio guru

di Kota Malang, berbeda dengan rasio guru MI yang terus mengalami peningkatan yang mengindikasikan bahwa efektifitas peningkatan rasio guru terhadap murid mengalami peningkatan yang baik.

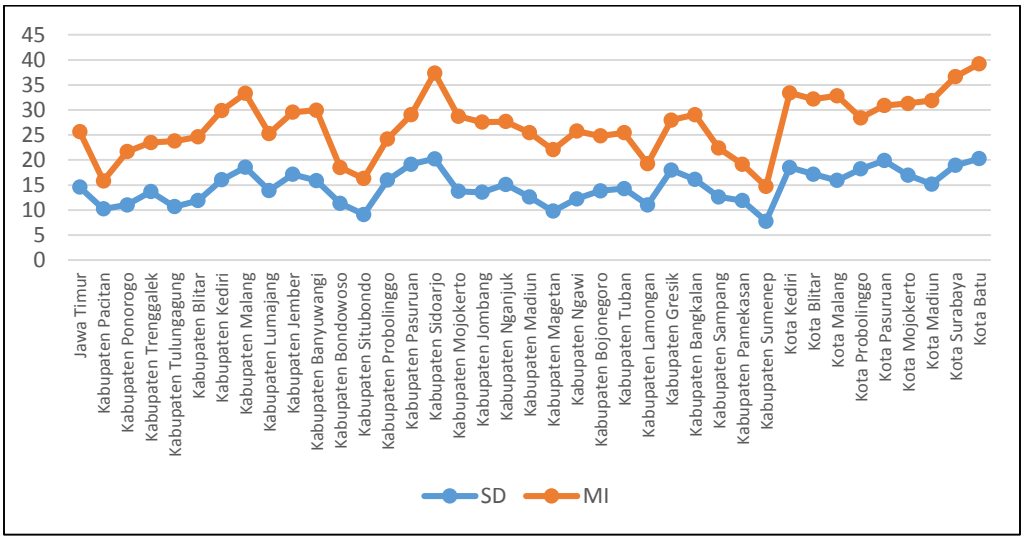

Gambar 4.29 Rasio Murid-Guru SD Kabupaten/Kota Provinsi Jawa TImur Tahun 2017

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

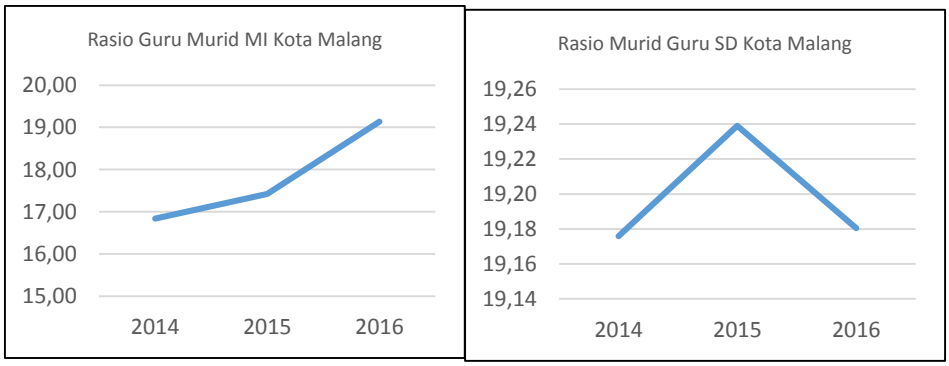

Gambar 4.30 Rasio Guru-Murid SD/MI Kota Malang Tahun 2014 – 2016

Sumber : BPS Kota Malang

4.1.4.5 Rasio Guru Murid SMP

1. Perkembangan antar waktu dan posisirelatif antar wilayah

Rasio murid guru Kota Malang pada jenjang SMP berada pada posisi ke 30 diantara Kabupaten/Kota lain di Provinsi Jawa Timur dengan tingkat rasio sebesar 14,57 yang mana angka tersebut lebih besar dibandingkan dengan rasio murid guru secara keseluruhan di Provinsi Jawa Timur yang sebesar

12,47. Sedangkan pada jenjang MTs sederajat SMP rasio murid guru sebesar 12,33 yang berada di urutan ke 25 diantara Kabupaten/kota lain di Provinsi Jawa Timur.

Secara perkembangan antar waktu rasio murid guru pada sekolah SMP terus mengalami penurunan sejak tahun 2014. Efektifitas peningkatan rasio murid guru di Kota Malang masih kurang dalam meningkatkan rasio murid guru tersebut. Sedangkan pada sekolah MTs, rasio murid guru sempat mengalami peningkatan sebesar 1 angka pada tahun 2015 dan pada tahun 2016 kembali mengalami penurunan sebesar 0,3 angka.

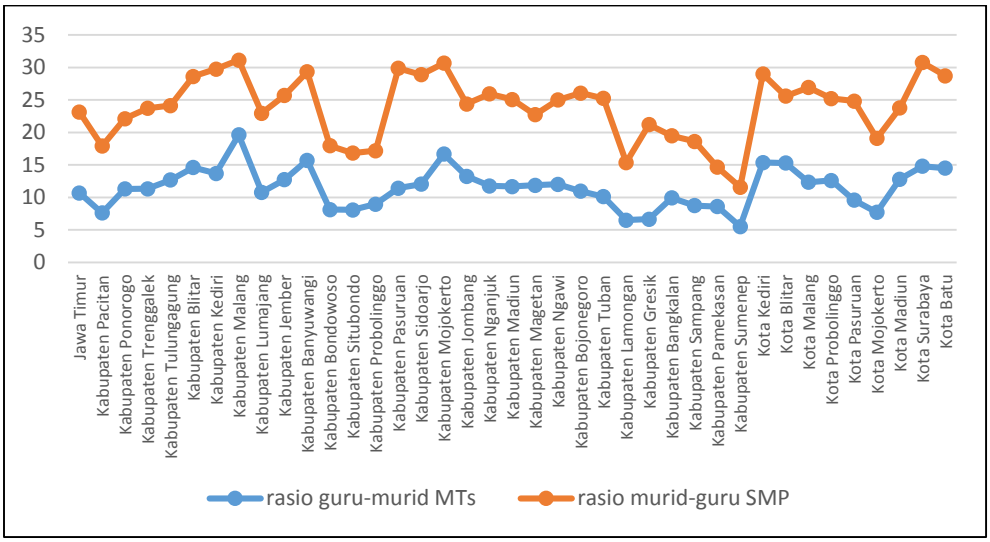

Gambar 4.31 Rasio Guru Murid SMP/MTs Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2017

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

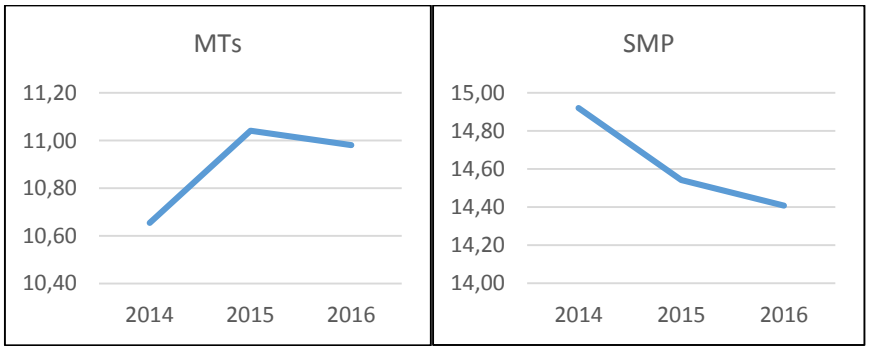

Gambar 4.32 Rasio Guru Murid MTs Kota Malang Tahun 2014-2016

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

4.1.4.6 Rasio Murid Guru SMA

1. Analisa Perkembangan Antar Waktu dan Posisi Relatif Antar Wilayah

Rasio murid guru SMA Kota Malang berada di posisi ke 19 diantara Kabupaten/kota lain di Provinsi Jawa Timur. Angka rasio murid guru SMA sebesar 11,36 yang mana angka tersebut lebih tinggi dari angka total rasio murid guru yang ada di Provinsi Jawa Timur sebesar 11,98. Sedangkan untuk SMK berada di posisi ke 17 dengan nilai 9,51 dan masih lebih tinggi dari rasio murid guru provinsi Jawa Timur yang mencapai 10,29. Rasio murid guru MA di kota Malang sebesar 6,95 berada di posisi ke 5 diantara kabupaten/kota lain.

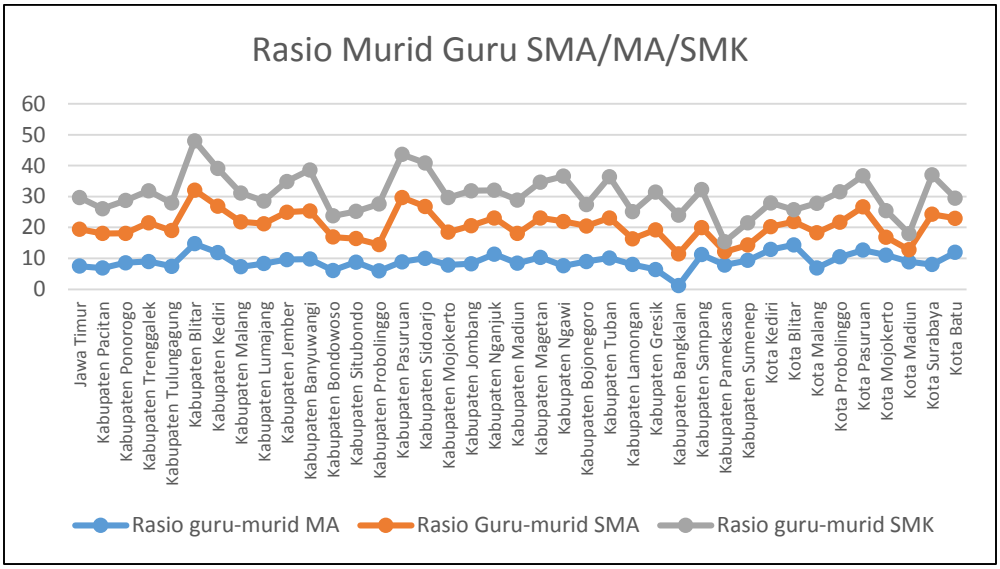

Gambar 4.33 Rasio Guru-Murid SMA/SMK/MA Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2017

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

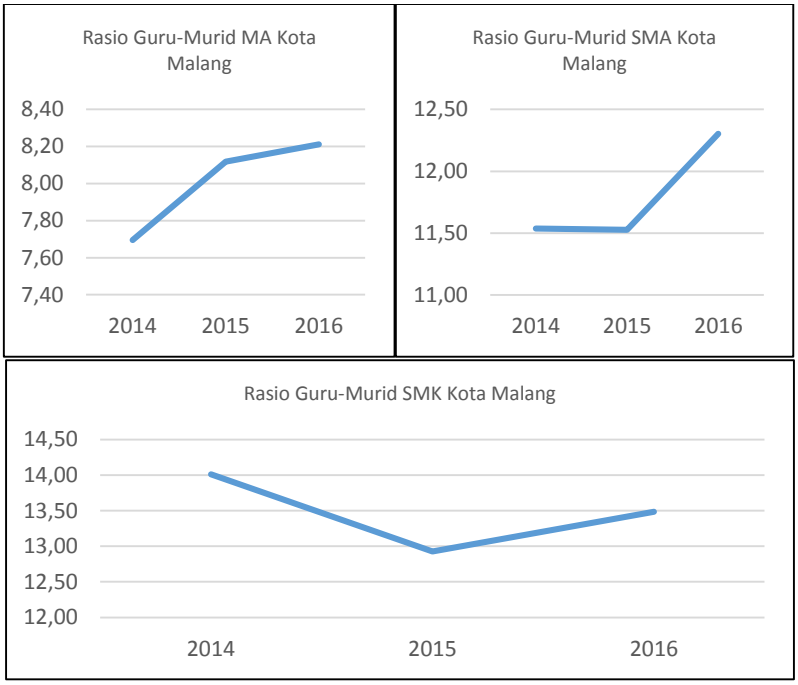

Gambar 4.34 Rasio Guru Murid MA/SMA/SMK Kota Malang Tahun 2014-2016

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

4.1.5 Bidang Perumahan dan Infrastruktur Dasar

4.1.5.1 Luas Lantai Perkapita

Luas perkapita adalah luas lantai rumah dibagi dengan jumlah anggota rumah tanggga(art). Asumsi setiap rumah tangga terdiri dari 5 art dan menurut uu no 1 tahun 2011 tentang perumahan, luas hunian minimum rumah adalah 36 m2, maka luas minimum perkapita adalah 7,2 m2. Semakin besar nilai ini maka cenderung semakin baik tingkat kesejahteraan rumah tangga/masya-rakat.

1. Perkembangan antar waktu dan posisi relatif antar wilayah

   Luas lantai perkapita masyarakat Kota Malang rata-rata sebesar 28,84 dimana secara posisi Kota Malang berada di urutan ke 16 dengan luas lantai perkapita tertinggi di Provinsi Jawa Timur. Secara proporsi luas lantai perkapita di Kota Malang dominasinya adalah masyarakat memiliki luas lantai bangunan lebih dari 8 m2 dengan persentase sebesar 99% dan masyarakat dengan tempat tinggal dengan luas kurang dari 8 m2 perkapita hanya sebesar 1%. Secara realtime perkembangan luas lantai perkapita masyarakat Kota Malang terus

mengalami peningkatan dan secara efektifitas telah tercapai efektifitas peningkatan luas lantai bangunan.

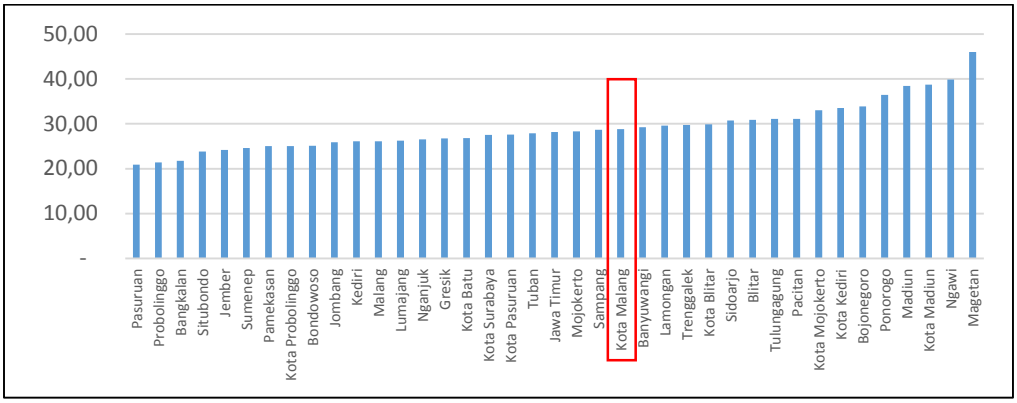

Gambar 4.35 Persentase Rumah Tangga menurut Kabupaten/Kota dan Luas Lantai perkapita di Jawa Timur

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur, 2017

2. Relefansi dan efektifitas

Secara relefansi peningkatan luas lantai perkapita di Kota Malang juga relefan dengan peningkatan luas lantai perkapita di Provinsi Jawa Timur. Peningkatan rasio luas lahan terus berlangsung dari tahun 2009 hingga tahun 2016.

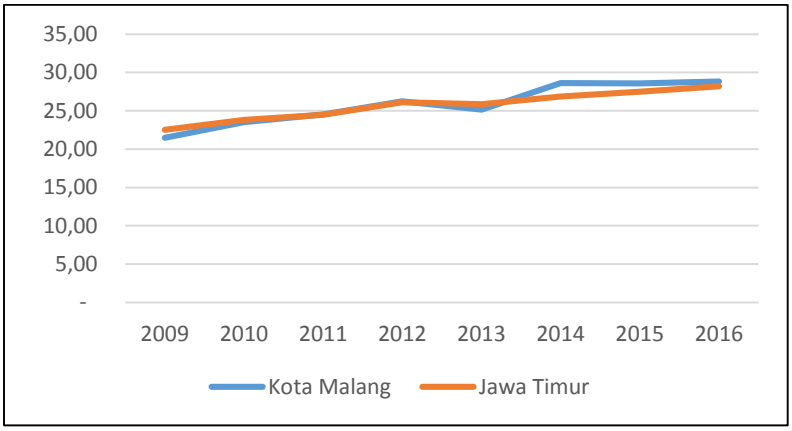

Gambar 4.36 Relefansi Perkembangan Antar Waktu Luas Lantai Perkapita Kota Malang-Provinsi Jawa Timur

Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur

4.1.5.2 Sumber Penerangan

1. Perkembangan antar waktu dan posisi relatif antar wilayah

Tingkat pelayanan sumber energi listrik Kota Malang berada di posisi tertinggi ke empat dengan tingkat pelayanan PLN sebesar 100% atau seluruh masyarakat sudah terlayani listrik PLN. Secara perkembangan antar waktu tingkat pelayanan listrik terus mengalami peningkatan dan cenderung stabil dengna tingkat pelayanan yang sudah 100%. Sehingga hal tersebut telah tercapai efektifitas peningkatan pelayanan listrik di Kota Malang.

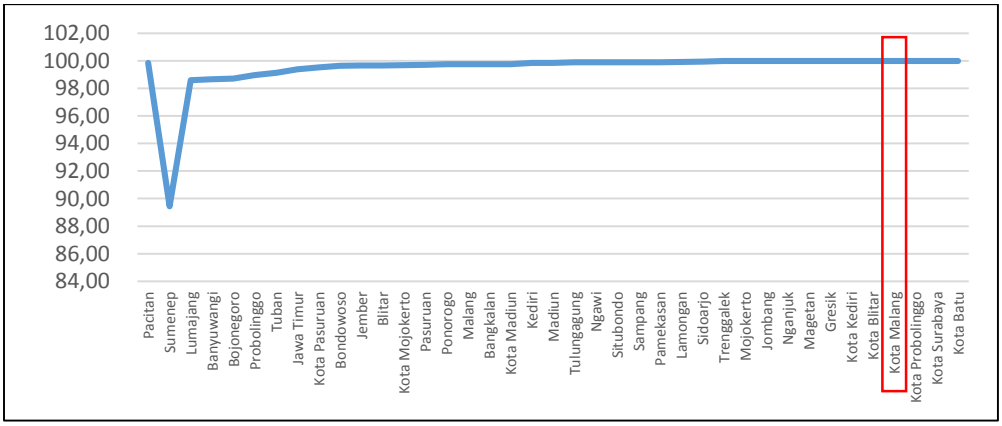

Gambar 4.37 Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Sumber Penerangan di Jawa Timur

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur

2. Relefansi dan efektifitas

Relefansi peningkatan pelayanan listrik Kota malang terhadap provinsi juga cukup baik. Dimana pada tahun 2010 hingga 2011 terjadi peningkatan pelayanan listrik di Kota Malang yang cukup signifikan juga berdampak pada peningkatan pelayanan listrik di Provinsi Jawa Timur.

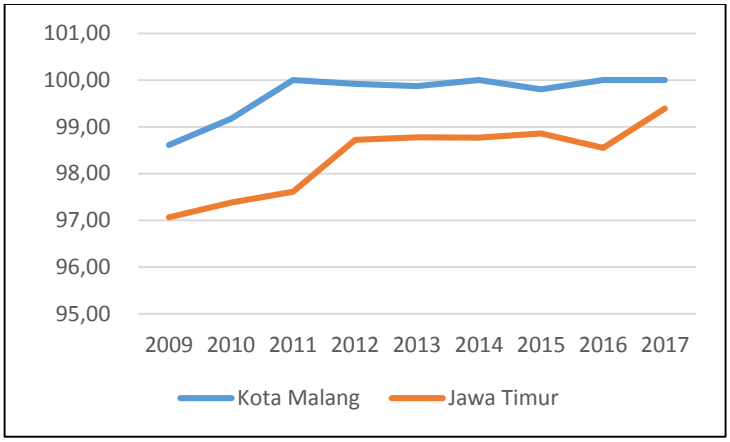

Gambar 4.38 Relefansi Perkembangan Antar Waktu Pelayanan Listrik PLN Kota Malang-Provinsi Jawa Timur

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur

4.1.5.3 Air Minum Layak

1. Perkembangan antar waktu dan posisi relatif antar wilayah

Persentase masyarakat pengguna air minum layak di Kota Malang berada pada posisi yang sangat baik diantara kabupaten/kota lain di Jawa Timur. Persentase rumah tangga yang terlayani air minum layak sebesar 88,48%. Namun jika dilihat secara perkembangan antar waktu angka tersebut mengalami penurunan dari awal tahun 2014 yang mencapai 89%. Secara efektifitas telah gagal dalam peningkatan pelayanan air minum layak di Kota Malang.

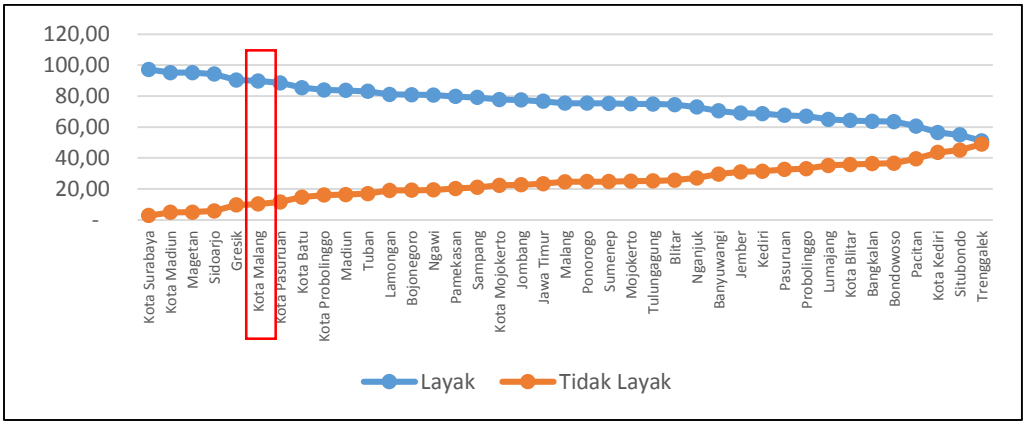

Gambar 4.39 Persentase Rumah Tangga Menurut Penggunaan Sumber Air Minum

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur

2. Relefansi dan efektifitas

Namun ternyata jika dilihat dari efektifitasnya dengan Provinsi Jawa Timur, bahwa terjadi penurunan tingkat pelayanan yang terjadi pada kurun waktu 2014-2015, sehingga berdampak pada penurunan tingkat pelayanan di Kota Malang. Hal ini relefan dengan penurunan yang terjadi di Provinsi Jawa Timur.

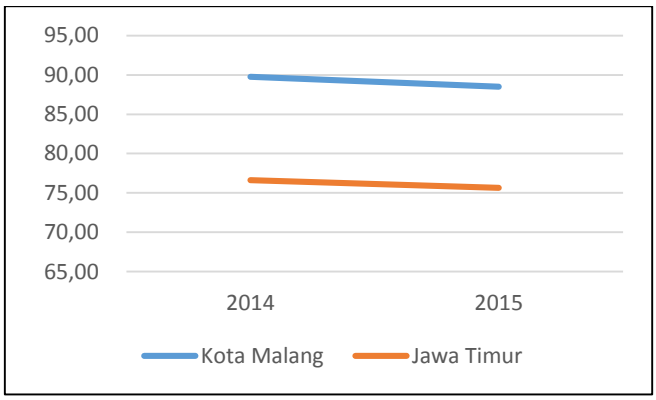

Gambar 4.40 Relefansi Capaian Persentase Rumah Tangga Menurut Penggunaan Sumber Air Minum

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur

4.1.5.4 Sanitasi Layak

1. Perkembangan antar waktu dan Posisi Relatif

Sanitasi adalah sebuah kebutuhan dasar permukiman penduduk. Sanitasi yang layak adalah cerminan dari tingkat kesejahteraan masyarakat didalamnya. Kota Malang sendiri berdasarkan data hasil statistik perumahan dan permukiman Provinsi Jawa Timur sebanyak 83 % penduduknya memiliki sanitasi yang layak dan sisanya sebanyak 17% keluarga di Kota Malang masih belum memiliki sanitasi layak. Berikut adalah grafik posisi Kota Malang diantara Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur terkait jumlah sanitasi layak yang dimiliki oleh penduduknya.

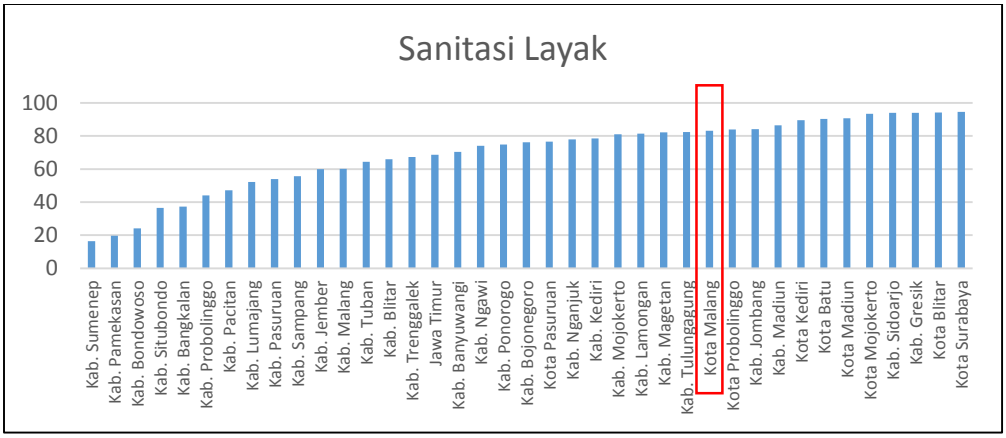

Gambar 4.41 Posisi Relatif Kota Malang diantara Kabupaten/Kota Lain Indikator Kelayakan Sanitasi

Sumber: Statistik Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Timur, 2017

Berdasarkan data diatas bahwa Kota Malang berada di posisi ke 12 diantara kabupaten dan kota lain di Provinsi Jawa Timur dalam persentase sanitasi layak keluarga. Sedangkan dalam perkembangannya dari tahun 2016 hingga 2017 mengalami peningkatan jumlah sanitasi layak yang ada.

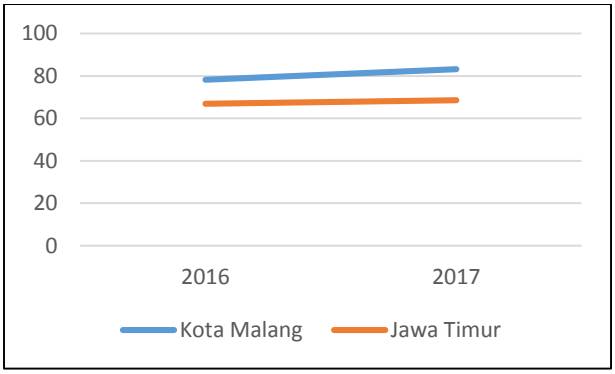

Gambar 4.42 Perkembangan Antar Waktu Sanitasi Layak Provinsi Jawa Timur dan Kota Malang

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur

2. Relefansi dan efektifitas

   Peningkatan persentase sanitasi layak keluarga di Kota Malang mengindikasikan bahwa program peningkatan kualitas sanitasi di Kota Malang sudah berjalan dengan efektif. Relefansi juga terjalin kaitannya

dengan Provinsi Jawa Timur, dimana pada tahun 2016 hingga 2017 terus melakukan peningkatan dalam perbaikan sanitasi layak pada setiap keluarga.

4.2 ANALISIS APBD UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN

4.2.1 Bidang Kemiskinan

Analisis penganggaran dalam bidang kemiskinan diperoleh dari penganggaran dinas sosial Kota Malang tahun 2017. Secara proporsi penganggaran Dinas Sosial Kota Malang sebesar Rp13.502.506.250 dialokasikan untuk belanja langsung yang meliputi peningkatan pelayanan administrasi, peningkatan sarana dan prasarana aparatur dan peningkatan sumberdaya aparatur. Sedangkan sebanyak Rp9.657.756.250 dialokasikan untuk urusan wajib dalam penanggulangan kemiskinan seperti kegiatan penanganan fakir miskin dan pemberdayaan sosial dan program pemberdayaan pelayanan dan rehabilitasi sosial. berikut proporsi anggaran Dinas Sosial tahun 2017.

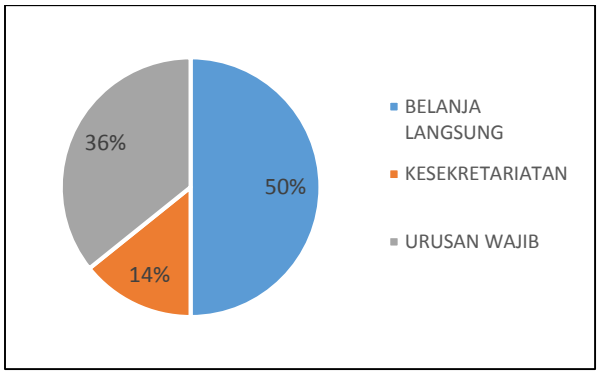

Gambar 4.43 Proporsi Anggaran Dinas Sosial Tahun 2018

Sumber : RKPD Dinas Sosial Kota Malang 2018

Berdasarkan kegiatan yang dijalankan proporsi anggaran dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

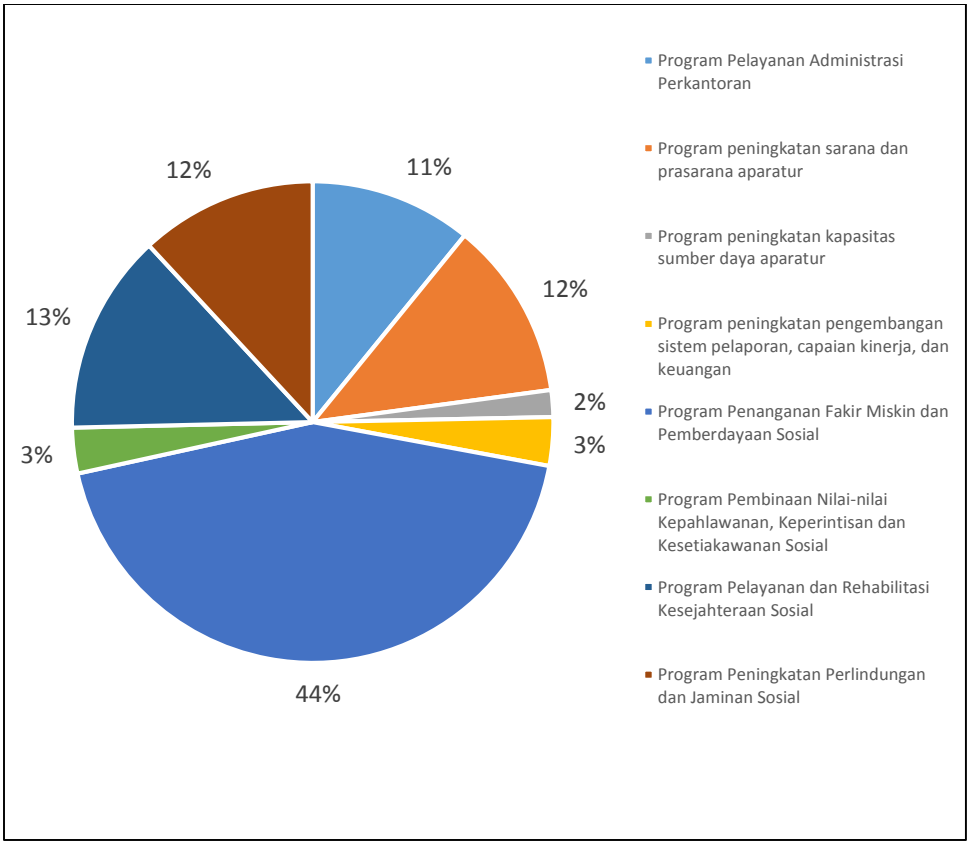

Gambar 4.44 Proporsi Anggaran Dinas Sosial Berdasarkan Kegiatan

Sumber : RKPD Dinas Sosial Kota Malang 2018

Sedangkan dalam penyelenggaraan penyaluran bantuan kepada fakir miskin oleh Dinas Sosial terdapat delapan program bantuan sosial dengan total anggaran sebesar Rp 9.549.593.350. rincian program bantuan sosial yang telah tersalurkan oleh Dinas Sosial dirinci sebagai berikut.

Tabel 4.2 Penyaluran Bantuan Program Sosial Dinas Sosial Kota Malang Tahun 2017

No	Jenis Bantuan	Jumlah Bantuan		
		Penerima	Keterangan	Bantuan (Rp)
1	Program Keluarga Harapan	4.313	keluarga	6.821.176.250
2	Bantuan Sosial Lanjut Usia	50	Jiwa	120.000.000
3	Bantuan Sosial Disabilitas	127	jiwa	1.052.490.000
4	Beras Sejahtera (Rastra)	-		
5	Bantuan Kendaraan Siaga Bencana	1	unit	30.427.100
6	Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA)	219	anak	240.500.000

No	Jenis Bantuan	Jumlah Bantuan		
		Penerima	Keterangan	Bantuan (Rp)
7	Kelompok Usaha Bersama KUBE	230	Jiwa	460.000.000
8	RUTILAHU	55	rumah	825.000.000
JUMLAH		4.995		9.549.593.350

Sumber : Dinas Sosial Kota Malang

Secara efektifitas penganggaran Dinas Sosial pada tahun 2017 dapat dilihat dari pengurangan jumlah penduduk miskin di Kota Malang pada tahun 2017 dan sebelumnya. Jumlah penduduk miskin Kota Malang dari tahun 2012 hingga tahun 2017 telah menurun secara signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa alokasi penganggaran dalam pengurangan angka kemiskinan Dinas Sosial sudah cukup efektif dalam mengurangi angka kemiskinan di Kota Malang. Penurunan jumlah penduduk miskin dalam kurun waktu 2016 – 2017 sebesar 1,15 %. Berikut penurunan jumlah penduduk miskin dan relasinya terhadap alokasi penganggaran Dinas Sosial.

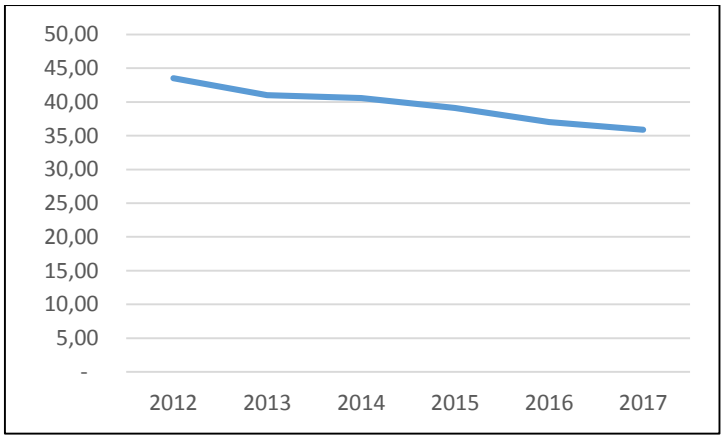

Gambar 4.45 Efektifitas Penganggaran Angka Kemiskinan Kota Malang

4.2.2 Bidang Pendidikan

Bidang pendidikan diperoleh dari proporsi anggaran Dinas Pendidikan Kota Malang tahun 2017. Berdasarkan penganggaran Dinas Pendidikan terbanyak adalah pada penganggaran untuk pendidikan sekolah dasar dengan persentase anggaran mencapai 49% atau sebesar Rp135.401.306.341. Sedangkan secara kelompok program dibedakan menjadi dua yakni urusan wajib dan belanja langsung. Urusan wajib meliputi kegiatan wajib dinas pendidikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kota

Malang, sedangkan belanja langsung meliputi peningkatan administrasi dinas pendidikan dan peningkatan sarana dan prasarana aparatur. Proporsi berdasarkan kelompok program keduanya cukup berimbang yakni 50%:50%.

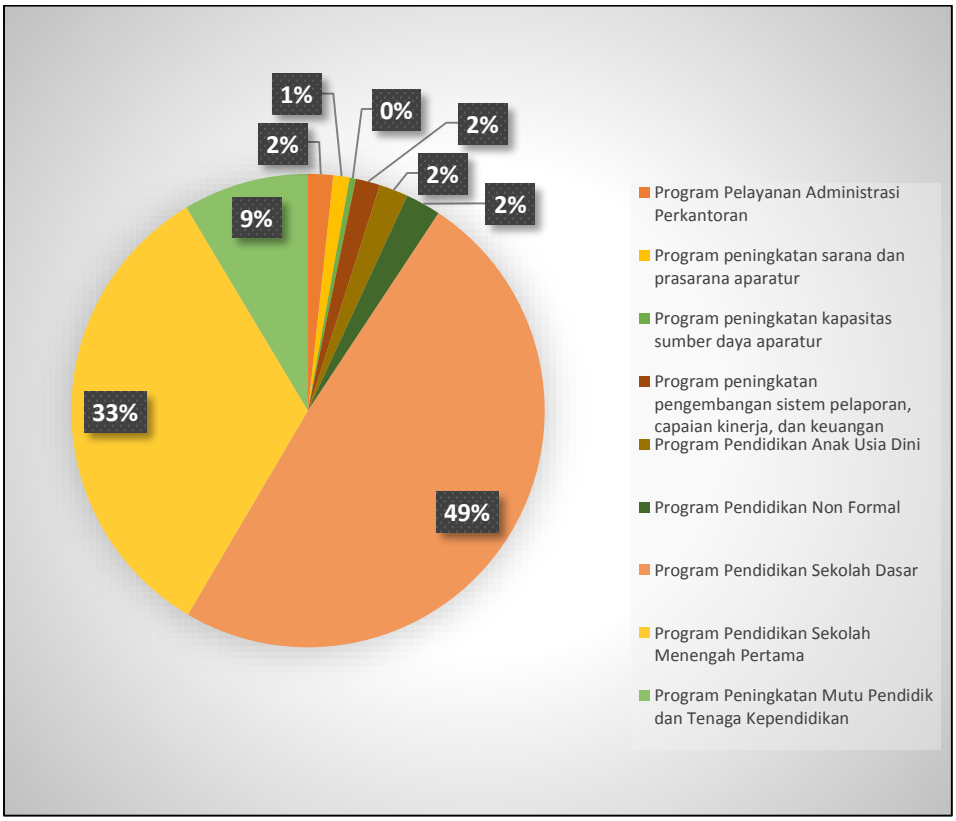

Gambar 4.46 Proporsi Anggaran Dinas Pendidikan Kota Malang Tahun 2018

Sumber : RKPD Dinas Pendidikan, 2018

Alokasi penganggaran Dinas Pendidikan diatas dapat diukur melalui kualitas pendidikan yang dihasilkan. Pengukuran dapat dilakukan dengan membandingkan tingkat angka partisipasi sekolah dan rasio guru-murid SD SMP di Kota Malang. Berdasarkan efektifitas program diketahui bahwa belum dapat meningkatkan angka partisipasi sekolah di Kota Malang secara signifikan. Bahkan terjadi penurunan pada awal tahun terhadap angka partisipasi sekolah Kota Malang.

Sedangkan pada indikator rasio guru murid juga belum dapat meningkatkan angka rasio guru murid yang ada di Kota Malang pada tahun 2017. Hal ini mengindikasikan bahwa pengalokasian anggaran Dinas Pendidikan belum dapat secara efektif meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di Kota Malang secara signifikan.

Perlu adanya penganggaran yang lebih proporsional antara kelompok program urusan wajib dan belanja langsung yang diajukan oleh Dinas Pendidikan Kota Malang pada tahun kedepannya.

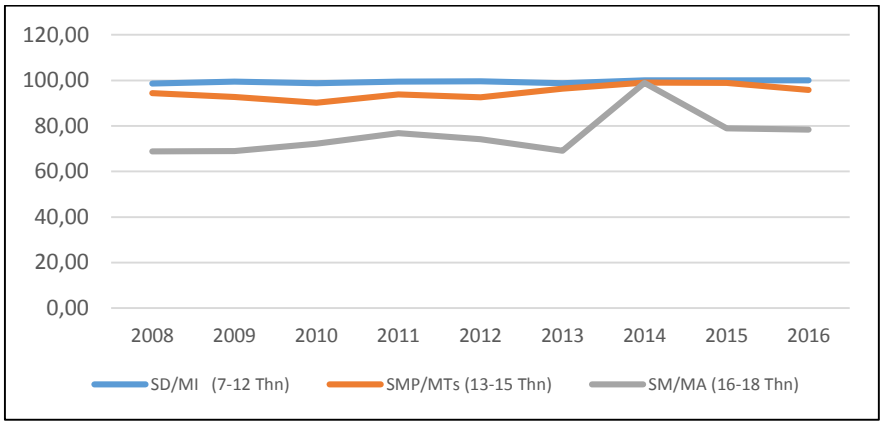

Gambar 4.47 Efektiftias Penganggaran Dinas Pendidikan Kota Malang Tahun 2017

Sumber : BPS Kota Malang

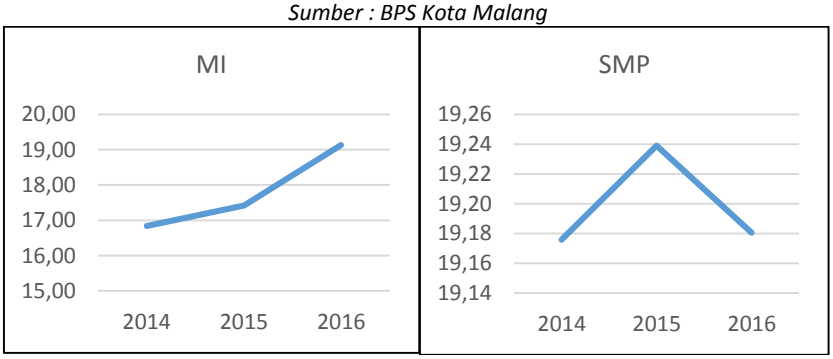

Gambar 4.48 Rasio Guru Murid Jenjang SD terhadap Efektifitas Alokasi Penganggaran Dinas Pendidikan

Sumber : BPS Kota Malang

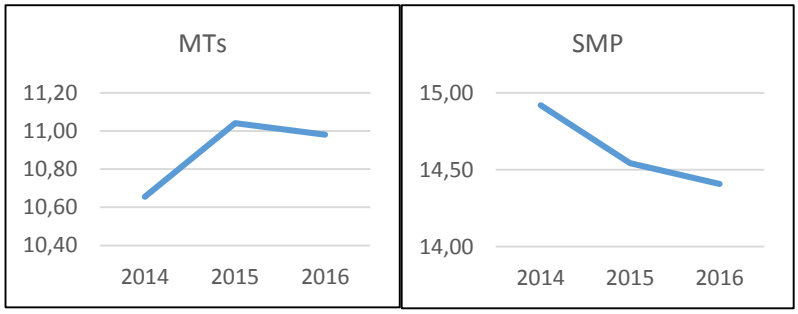

Gambar 4.49 Rasio Guru Murid Jenjang SMP terhadap Efektifitas Alokasi Penanggaran Dinas Pendidikan

Sumber : BPS Kota Malang

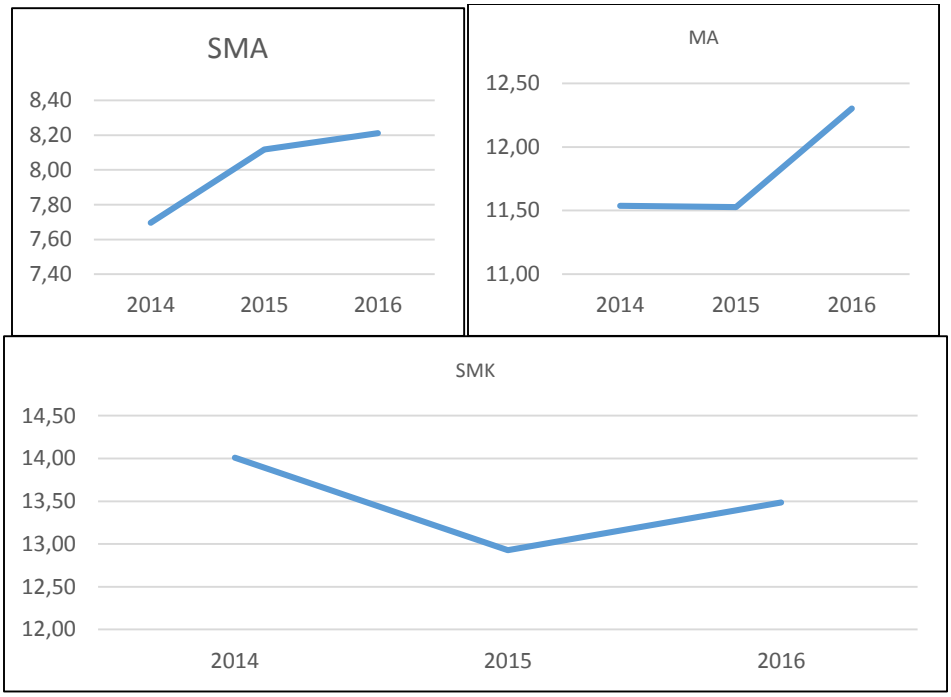

Gambar 4.50 Angka Rasio Guru Murid Jenjang SMA Terhadap Efektifitas Alokasi Penganggaran Dinas Pendidikan

Sumber : BPS Kota Malang

4.2.3 Bidang Ketenagakerjaan

Data alokasi anggaran berdasarkan daripada alokasi anggaran Dinas Ketenagakerjaan Kota Malang Tahun 2017. Alokasi anggaran Dinas Ketenagakerjaan Kota Malang terdiri dari tiga kelompok program yakni belanja langsung, kesekretariatan, dan urusan wajib. Proporsi anggaran ketiga kelompok program dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

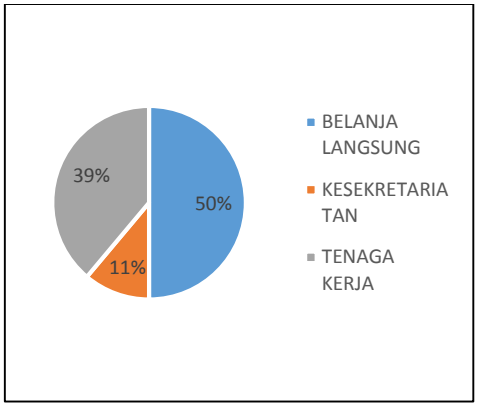

Gambar 4.51 Alokasi Anggaran Dinas Ketenagakerjaan Menurut Kelompok Program

Sumber : RKPD Dinas Ketenagakerjaan 2018

Berdasarkan grafik diatas dapat diketahui bahwa alokasi anggaran 50% atau sebesar Rp2.736.976.000,00 digunakan untuk belanja langsung yang terdiri dari program administrasi, peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dan peningkatan pelaporan kinerja. Sedangkan urusan wajib hanya sebesar 32 % atau sebesar Rp1.731.942.000,00 yang terdiri dari program peningkatan produktifitas tenaga kerja, peningkatan kesempatan kerja dan perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan. Capaian efektifitas alokasi anggaran yang dicanangkan oleh Dinas Ketenagakerjaan dapat diindikasikan dari jumlah penurunan pengangguran yang merupakan masalah kemiskinan utama di Kota Malang. Berikut adalah tingkat pengangguran terbuka di Kota Malang dan relefansinya berdasarkan alokasi anggaran yang diajukan Dinas Tenagakerja.

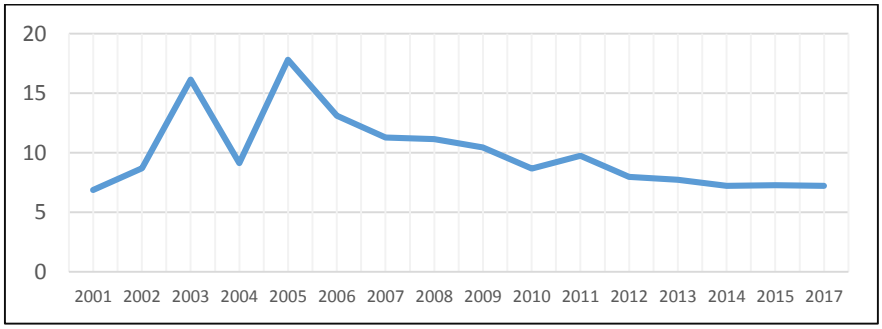

Gambar 4.52 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Malang dan Relefansinya terhadap Alokasi Penganggaran Dinas Ketenagakarjaan Kota Malang

Sumber : Laporan Eksekutif Ketenagakerjaan Kota Malang, 2017

Berdasarkan grafik diatas didapatkan hasil bahwa Dinas Ketenagakerjaan Kota Malang sudah berhasil dalam mengurangi angka pengangguran terbuka dari tahun 2015 sebesar 0,06%. Namun angka tersebut masih belum dapat mengurangi angka pengangguran terbuka di Kota Malang secara signifikan. Masih perlunya peningkatan dan pengalokasian anggaran Dinas Ketenagakerjaan dalam mengurai angka pengangguran terbuka di Kota Malang yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Provinsi Jawa Timur.

4.2.4 Bidang Kesehatan

Data aloksi penganggaran pada bidang kesehatan didapatkan dari hasil pengolahan anggaran Dinas Kesehatan Kota Malang pada tahun 2017. Alokasi penganggaran Dinas Kesehatan dibagi menjadi tiga yakni urusan wajib, belanja langsung dan kesekretariatan. Proporsi anggaran pada setiap kelompok program dapat dilihat pada grafik dibawah ini. dapat diketahui bahwa alokasi penganggaran cukup berimbang dimana kelompok urusan wajib sebesar 49% dan belanja langsung sebesar 50% dan kesekretariatan sebesar 1%.

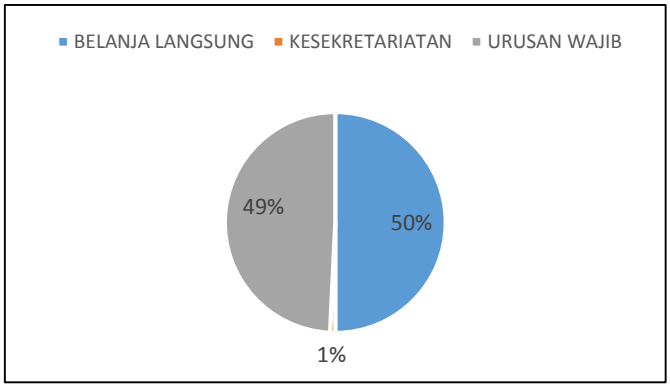

Gambar 4.53 Alokasi Penganggaran Dinas Pendidikan Berdasarkan Kelompok Program Tahun 2018

Sumber : RKPD Dinas Pendidikan, 2018

Alokasi penganggaran tersebut kemudian dapat dilihat efektifitasnya dalam peningkatan angka harapan hidup dan jumlah bayi meninggal di Kota Malang. Berdasarkan data angka harapan hidup meningkat pada akhir tahun dan angka kematian bayi secara stabil terus menurun setiap tahunnya. Hal ini mengindikasikan bahwa

alokasi penganggaran Dinas Kesehatan Kota Malang sudah efektif dalam meningkatkan angka kesehatan di Kota Malang.

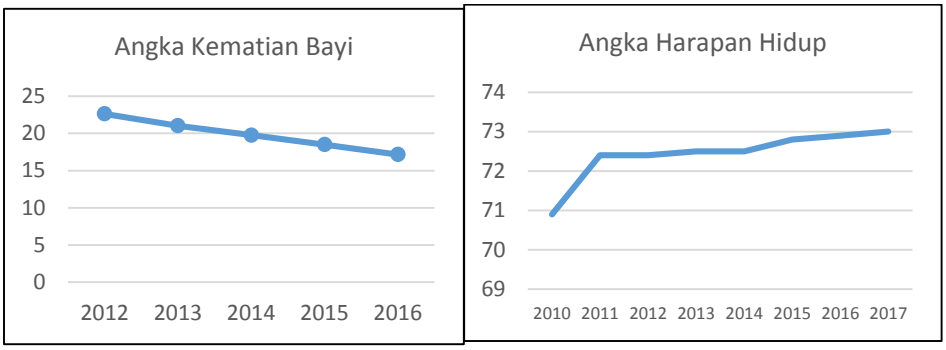

Gambar 4.54 Angka Harapan Hidup dan Angka Kematian Bayi dan Relefansinya terhadap Alokasi Anggaran Dinas Kesehatan

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Malang, 2017

Halaman Ini Sengaja Dikosongkan

BAB 5
PENENTUAN WILAYAH PRIORITAS

Kesimpulan diperoleh dengan melihat hubungan antara hasil pada analisis relevansi dan hasil pada analisis efektivitas program. Analisis relevansi ditujukan untuk melihat sejauh mana pembangunan yang dijalankan didaerah mendukung sasaran provinsi dan nasional. Analisis relevansi dilakukan dengan membandingkan tren indikator utama dengan tren Provinsi dan Nasional. Apabila tren indikator utamanya sejalan dengan tren indikator provinsi dan nasional, maka dapat disimpulkan bahwa pembangunan yang dilakukan oleh Kota Malang mendukung sasaran provinsi dan nasional.

Analisis Efektivitas ditujukan untuk menilai apakah pembangunan yang dilakukan oleh daerah efektif baik dalam mencapai tujuan pembangunan daerah maupun nasional. Efektivitas penanggulangan kemiskinan dapat dilihat dari sejauh mana capaian pembangunan daerah membaik dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Tabel 5.1 Kesimpulan Analisis Relefansi dan Efektifitas

No	Bidang	Indikator Utama	Relevan	Efektif
1.	Kemiskinan dan ketenagakerjaan	Tingkat Kemiskinan	√	√
		Tingkat Pengangguran Terbuka	√	X
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	√	X
2.	Bidang Kesehatan	Angka Kematian Bayi	√	√
		Angka Harapan Hidup	√	√
3.	Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar		
		SD/MI	X	X
		SMP/MTS	√	X
		SMA/MA	√	X
Angka Partisipasi Murni				
		SD/MI	√	√
		SMP/MTS	X	√
		SMA/MA	√	√
Angka Partisipasi Sekolah				
		SD/MI	X	√
		SMP/MTS	X	√

		SMA/MA	√	√
Rasio Murid Guru				
		SD/MI	n.a	√
		SMP/MTS	n.a	√
		SMA/MA	n.a	√
4.	Infrastruktur Dasar	Akses Air Minum Layak	√	√
		Akses energi listri	√	√
		Luas Lantai Bangunan	√	√
		Sanitasi	√	√

Keterangan :

√ : Relevan atau Efektif

X :Tidak Relevan atau Tidak Efektif

n.a (not account) : Data Tidak Tersedia

berdasarkan hasil tersebut didapatkan kesimpulan sebagai berikut :

d. Pada sektor ketenagakerjaan implementasi program dalam penanganan pengangguran dan angka partisipasi angkatan kerja masih kurang efektif dengan masih tingginya angka pengangguran terbuka di Kota Malang dan penurunan angka pengangguran terbuka yang masih sebesar 0,06 % dari tahun 2016 – 2017.
e. Angka partisipasi kasar pada jenjang SD /MI yang masih belum efektif ditangani oleh pemerintah daerah setempat. Kondisi angka partisipasi kasar SD/MI di Kota Malang masih sangat fluktuatif pada setiap tahunnya dan cenderung menurun dibandingkan dengan angka partisipasi kasar pada tahun 2016.
f. Tidak terjalinnya relevansi yang terjadi antara Provinsi Jawa Timur dan Kota Malang dalam peningkatan angka partisipasi kasar sekolah pada setiap jenjang yakni SD, SMP, dan SMA. Hal ini menandakan bahwa perkembangan di Provinsi Jawa Timur tidak berdampak atau tidak diikuti dengan perkembangan yang ada di Kota Malang.
g. Pada bidang kesehatan angka harapan hidup dan angka kematian bayi mendapatkan nilai yang baik dimana program yang dicanangkan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kesehatan cukup efektif dijalankan. Konsumsi masyarakat terhadap kalori dan protein sudah terpenuhi dan lebih tinggi dari batas minimal kecukupan kalori dan protein perkapiita perharinya.
h. Bidang infrastruktur dasar permukiman dan perumahan di Kota Malang sudah sangat baik dalam meningkatkan efektifitas program akses terhadap air minum layak, energi listri dan sanitasi. Dilihat bahwa peningkatan terjadi pada setiap tahunnya hingga seluruh masyarakat di Kota Malang sudah terpenuhi kebutuhan akan infrastruktur dasar permukiman di tahun 2017.

i. Kecamatan Sukun dan Kedungkandang adalah kecamatan dengan jumlah keluarga miskin terbanyak di Kota Malang dengan total 26.996 jiwa dan 26.149 jiwa.
j. Secara penganggaran Kecamatan Kedungkandang mendapatkan penganggaran yang paling sedikit di bidang penanggulangan kemiskinan dibandingkan dengan penganggaran pada kecamatan lain.

Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan arahan prioritas penanganan pada penanggulangan kemiskinan di Kota Malang berdasarkan hasil kesimpulan analisa adalah bahwa sektor ketenagakerjaan adalah sektor yang paling lemah dalam kaitannya penurunan angka kemiskinan di Kota Malang, sedangkan secara penganggaran Kecamatan Kedungkandang dan Kecamatan Sukun kurang memiliki penganggaran yang lebih proporsional dalam penurunan kemiskinan sedangkan angka kemiskinan di kecamatan tersebut terbesar diantara kecamatan lain di Kota Malang. Sehingga penanganan pada rencana aksi nanti akan mengakomodasi dan memperhatikan hasil kesimpulan prioritas penanganan ini.

Halaman Ini Sengaja Dikosongkan

BAB 6
RENCANA AKSI DAERAH

6.1 RENCANA AKSI DAERAH

Rencana Aksi Daerah (RAD) merupakan serangkaian alur pikir sistematis yang menjadi landasan daerah dalam menetapkan program dan kegiatan dalam rangka mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Isu Strategis sebagai bagian dari Perencanaan dan Penganggaran Penanggulangan Kemiskinan yang berbasis hasil.

RAD ini menjadi bagian yang sangat penting, mengingat RAD menjadi acuan bersama bagi Pemerintah Daerah dalam rangka menyusun Program Penanggulangan Kemiskinan di dalam RPJMD dan menjadi pedoman dalam menyusun kegiatan di dalam Renstra, Renja SKPD dan RKPD untuk seluruh SKPD dalam rangka mencapai target kinerja Penanggulangan Kemiskinan di daerah. Rencana aksi daerah dibedakan sesuai dengan kluster program penanggulangan kemiskinan yang diantaranya adalah kluster I, II, dan III.

6.1.1 Target Pengurangan Kemiskinan

Angka kemiskinan Kota Malang pada tahun 2018 sebesar 4,17% dengan tingkat pengurangan angka kemiskinan rata-rata setiap tahun mencapai 0,36%. Dengan memperhatikan tingkap pencapaian pengurangan angka kemiskinan di Kota Malang tersebut sehingga penetapan target pengurangan kemiskinan pada rencana aksi ini hingga tahun 2023 ditetapkan mengurangi angka kemiskinan sebesar 1,8 % menjadi 2,37%.

6.1.2 Kelompok Program I

Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan dan perlindungan sosial yang terdiri atas program-program yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, serta perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin. Kebijakan yang diambil dalam program klaster I penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan dan perlindungan sosial adalah.

1. Jaminan pendidikan kepada masyarakat kurang mampu melalui dana BOS dan siswa berprestasi
2. Bantuan pemenuhan kebutuhan pokok melalui subsidi pangan dan barang pokok
3. Bantuan pemenuhan akses layanan kesehatan bagi masyarakat miskin melalui jaminan kesehatan yang diberikan
4. Pemenuhan infrastruktur dasar perumahan
5. Perluasan akses kesempatan kerja kepada seluruh masyarakat

Secara lebih terinci program yang diusulkan dalam penanggulangan kemiskinan dan sasaran serta target yang diusulkan dapat dilihat pada tabel dibawah ini .

Tabel 6.1 Kelompok Program I Penanggulangan Kemiskinan Berdasarkan Jaminan Sosial dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja					OPD Penanggung Jawab	Lokasi
						2019	2020	2021	2022	2023		
Peningkatan kesejahteraan dan pemenuhan kebutuhan dasar keluarga	kecukupan dan peningkatan mutu pangan	• Terlaksanakannya alternatif pangan • 100 % keluarga miskin telah tersubsidi kebutuhan pangan • Kebutuhan Dasar Fakir Miskin Terpenuhi	Program pengembangan keanekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan	sosialisasi konsumsi pangan alternatif	Tersosialisasi konsumsi pangan alternatif pada tingkat kelurahan	Terlaksana pada tingkat kecamatan	Terlaksana pada tingkat kelurahan				Dinas pertanian dan ketahanan pangan	Kota Malang
				Promosi hasil produksi pertanian	Jumlah promosi yang diselenggarakan sebanyak 2 kali.	Promosi I	Promosi 2				Dinas Pertanian dan ketahanan pangan	Kota Malang
			Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Sosial	Bantuan Sosial pemenuhan kebutuhan pokok bagi lanjut usia terlantar/ tidak potensial dan penyandang disabilitas.	jumlah PMKS lanjut usia telantar/ tidak potensial dan penyandang disabilitas yang diberi bantuan sembako	600 orang	600 orang	600 orang			Dinas Sosial	Kota Malang
				Bantuan Kebutuhan Dasar Fakir Miskin	Persentase Fakir Miskin Mendapatkan Bantuan Kebutuhan Dasar	5,59%	6,21%	6,82%	7,44%	8,05%	Dinas Sosial	Kota Malang
				Pembagian RASDA	Persentase keluarga miskin yang mendapatkan beras dari total jumlah	6819 KK	6819 KK	6819 KK			Dinas Sosial	Kota Malang

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja					OPD Penanggung Jawab	Lokasi
						2019	2020	2021	2022	2023		
					keluarga pra sejahtera sebanyak 6819 KK							
	peningkatan akses layanan pendidikan	• Meningkatnya angka partisipasi SMA dari 78,32% menjadi 95% pada 2023 • Meningkatnya angka partisipasi murni SMP dari 86,6% hingga 93 % pada 2023 • Meningkatnya angka partisipasi murni SMA/sederajat dari 59,23 %	Progrma Pendidikan Sekolah Dasar	Bantuan Operasional Sekolah	Persentase dana BOS yang tersalurkan	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Pendidikan	SD Negeri di Kota Malang
				Pengadaan sarana dan prasarana sekolah dasar dan menengah.	Jumlah pembangunan sarana dan prasarana sekolah.	5 Unit						SD Negeri di Kota Malang
				Pembangunan/ Rehabilitasi Sedang/ Berat Bangunan Sekolah Dasar (SD)	Jumlah unit bangunan SD yang dibangun/ direhabilitasi	100 unit						SD Negeri di Kota Malang
			Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Bantuan Operasional Sekolah Menengah Pertama	Persentase dana BOS yang tersalurkan	100%	100%	100%	100%	100%		SMP Negeri di Kota Malang
				Pembangunan/ Rehabilitasi Sedang/ Berat Bangunan Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Jumlah unit bangunan SMP yang dibangun/ direhabilitasi	10 Unit	10 Unit	10 Unit				SMP Negeri di Kota Malang

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja					OPD Penanggung Jawab	Lokasi
						2019	2020	2021	2022	2023		
		hingga 85 % pada 2023		Pengadaan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama (SMP) (DAK)	Jumlah sarana prasarana yang tersedia	5 Unit	5 Unit	5 Unit				SMP Negeri di Kota Malang
			Program Pendidikan Non Formal	Ketrampilan dan kewirausahaan bagi peserta didik paket A, B dan C	Jumlah peserta didik paket A. B dan C yang mengikuti pelatihan	100	100	100	100	100		Kota Malang
			peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan	Bimbingan teknis perangkat pembelajaran yang inovatif guru SD dengan model blended learning	Jumlah peserta bimbingan teknis	80	120	160	160	160		SMP Negeri Kota Malang
				Bimbingan teknis perangkat pembelajaran yang inovatif guru SMP dengan model blended learning	Jumlah peserta bimbingan teknis	80	120	160	160	160		SMP Negeri Kota Malang
				Peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga	Jumlah PTK Non ASN yang memperoleh insentif	1246	1246	1246	1246	1246		Kota Malang

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja					OPD Penanggung Jawab	Lokasi
						2019	2020	2021	2022	2023		
				kependidikan Non ASN jenjang TK, SD dan SMP								
	peningkatan akses layanan kesehatan	• Menurunnya angka kematian bayi dari 1,4 % / 17 kematian tiap 1000 kelahiran hingga 5 kematian tiap 1000 kelahiran • Persentase balita gizi buruk < 0,45% • Masyarakat miskin 100% mendapatkan jaminan kesehatan	pencegahan dan pengendalian penyakit	Peningkatan pelayanan imunisasi	Persentase Imunisasi Dasar Lengkap	90%	93%	95%			dinas kesehatan	setiap rumah sakit, Puskesmas, PUSTU dan setiap kelurahan.
			perbaikan gizi masyarakat	sosialisasi konsumsi pangan sehat	Cakupan kelurahan yang mendapatkan sosialisasi	Kelurahan di kecamatan klojen, blimbing dan sebagian kedungkandang	Kelurahan di kecamatan sukun dan lowokwaru				dinas kesehatan	setiap kelurahan
				Pelayanan kesehatan/ Skrining anak usia sekolah	Jumlah siswa SD yang diskrinning ; Jumlah guru UKS yang dibina ; Jumlah kantin yang dibina	100% siswa SD, 1 kali pe tahun , 250 guru, 100 kantin,						sekolah dasar dan menengah

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja					OPD Penanggung Jawab	Lokasi
						2019	2020	2021	2022	2023		
						14.616 buku rapor kesehatanku						
			Program Peningkatan Kesehatan Lingkungan	Pengembangan lingkungan sehat	Jumlah peserta penyuluhan dalam rangka menciptakan lingkungan tempat pengelolaan makanan (TPM) ; Monitoring evaluasi dan pelaporanprogram pengembangan lingkungan sehat ; Jumlah sampel air yang diperiksa ; Jumlah peserta pertemuan penyelenggara air minum	200 orang penjamah makanan ; 24 orang petugas kesling 15 orang kapusk ; 630 sampel ; 100 orang ; 5 narasumber ; 25 orang ; 25 orang					Dinas Kesehatan	Kota Malang
				Pembinaan Kampung Lingkungan Hidup	Jumlah RW yang memenuhi indikator Kampung	5 RW	20 RW	35 RW			Dinas Lingkungan Hidup	Kota Malang

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja					OPD Penanggung Jawab	Lokasi
						2019	2020	2021	2022	2023		
					Lingkungan Hidup							
			promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin	Jumlah masyarakat miskin yang mendapatkan jaminan kesehatan (SPM)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	dinas kesehatan	Kota Malang
				Pemberdayaan masyarakat dengan kelurahan siaga	Jumlah kelurahan siaga aktif	57 Kelurahan	57 Kelurahan	57 Kelurahan	57 Kelurahan	57 Kelurahan	dinas kesehatan	
				Bina Kesertaan KB	Jumlah masyarakat miskin mendapat pelayanan KB gratis	300 Orang	400 Orang	500 Orang	600 Orang	700 Orang	DP3AP2KB	Kota Malang
	Pemerataan akses kesempatan kerja dan berusaha		Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan keterampilan dan Produktivitas	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan peningkatan keterampilan dan produktivitas	90 Orang	90 Orang	90 Orang	90 Orang	90 Orang	Dinas Ketenagakerjaan	Kota Malang
				Pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi Penyandang Masalah	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan ketrampilan	25 orang	100 Orang	150 Orang	150 Orang	150 Orang	Dinas Sosial dan	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja					OPD Penanggung Jawab	Lokasi
						2019	2020	2021	2022	2023		
				Kesejahteraan Sosial (PMKS)								
		• Menurunnya angka pengangguran terbuka dari 7,28 % hingga 3% pada tahn 2023 • Pemberian jaminan sosial kepada pekerja informal		Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat	Jumlah peserta Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyaraka	150 orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	Dinas Ketenagakerjaan	Kota Malang
			Program Pembinaan Lingkungan Sosial di bidang Ketenagakerjaan Sektor Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	Pelayanan Perluasan Kesempatan Kerja bagi Pencari Kerja	Jumlah perusahaan peserta Job Market Fair	60 perusahaan	60 perusahaan	60 perusahaan	60 perusahaan	60 perusahaan	Dinas Ketenagakerjaan	Kota Malang
				Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja bagi Pencari Kerja	Jumlah peserta Pembinaan Bursa Kerja AKAD	500 orang	500 orang	500 orang	500 orang	500 orang	Dinas Ketenagakerjaan	Kota Malang
			jaminan sosial pekerja informal	pemberian jaminan sosial pekerja informal	Cakupan pekerja informal yang mendapatkan jaminan sosial		10%	30%	30%	30%	Dinas sosial dan DISPENDUKCAPIL	Setiap kecamatan
				regulasi perlindungan pekerja informal	Terselenggarakannya regulasi perlindungan pekerja informal		Terbentuknya regulasi perlindungan				Dinas Sosial, Dinas Tenagakerja Bagian Hukum,da	Kota Malang

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja					OPD Penanggung Jawab	Lokasi
						2019	2020	2021	2022	2023		
							pekerja informal				n Bagian kesejahteraan	
	akses layanan perumahan	• 100% kampung kumuh tertangani	Program Pengendalian dan Pengawasan Perumahan dan Permukiman	Penanganan kampung kumuh	Cakupan kampung kumuh yang tertangani hingga 100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas perumahan dan kawasan permukiman.	Kelurahan yang masuk dalam SK Kumuh
				Fasilitas Kegiatan Malang Kota Tanpa Kumuh	Jumlah Kegiatan Kota Tanpa Kumuh yang Terfasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas perumahan dan kawasan permukiman	
	Pemenuhan layanan infrastruktur dasar permukiman bagi masyarakat miskin		Peningkatan layanan infrastruktur dasar permukiman	Peningkatan pelayanan sanitasi	Rumah tangga memiliki sanitasi sehat hingga 90 %		85%	87%	88%	90%	DISPERKIM	Kota Malang
				Peningkatan layanan air minum layak	Akses layanan air minum layak hingga 100 %		100%	100%	100%	100%	DISPERKIM	
				Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni	Penurunan rumah tidak layak huni hingga 100 %		40%	30%	30%		DISPERKIM	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja					OPD Penanggung Jawab	Lokasi
						2019	2020	2021	2022	2023		
	Pemenuhan akses terhadap pengetahuan dan informasi umum	• Meningkatnya angka literasi masyarakat kota malang hingga 20 %	Peningkatan literasi masyarakat dan anak-anak	Pembangunan perpustakaan desa/kelurahan	Terbangunnya perpustakaan pada setiap kelurahan		20%	20%	30%	30%	Dinas pendidikan, kantor perpustakaan dan arsip daerah, DPP3AP2KB, Pemerintah Kecamatan, DISPORA, DISKOMINFO dan BARENLITBANG	setiap kecamatan
				Sosialisasi baca kepada anak-anak	Cakupan kelurahan yang mendapatkan sosialisasi		20%	20%	30%	30%		setiap kecamatan
				Pengembangan rumah pintar	Terbangunnya rumah pintar pada tingkat kecamatan		Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Tahap 4		setiap kecamatan
				Pengembangan perpustakaan berjalan Kota Malang	Terselenggarakannya perpustakaan berjalan Kota Malang		Pengembangan perpustakaan berjalan	Operasionalisasi perpustakaan berjalan				setiap kecamatan

6.1.3 Kelompok Program II

Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat yang terdiri atas program-program yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat. Strategi dalam penanggulangan kemiskinan yang masuk dalam program klaster II adalah

1. Pemberdayaan wanita dan difabel melalui musrenbang tematik guna menciptakan pembangunan yang inklusif
2. Pemberdayaan PMKS
3. Pemerdayaan masyarakat wisata melalui kelompok sadar wisata guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pariwisata.

Sehingga berikut pada tabel dibawah ini adalah penjabaran setiap program dan kegiatan pada kelompok program/program klaster II dalam penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat.

Tabel 6.2 Kelompok Program II Penanggulangan Kemiskinan Melaluil Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja					OPD Penanggung Jawab	Lokasi
						2019	2020	2021	2022	2023		
Pemberdayaan masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan	Pemberdayaan kaum wanita	• Indeks keterwakilan perempuan hingga 80 %	Program perencanaan pembangunan manusia, masyarakat, sosial dan budaya	Musrenbang tematik	Jumlah Pelaksanaan Musrenbang	4 Musrenbang	4 Musrenbang	4 Musrenbang	4 Musrenbang	4 Musrenbang	BARENLITBANG	Kota Malang
			Program Pemberdayaan Perempuan	Pengembangan industri rumahan untuk menguatkan perempuan pelaku usaha	Jumlah peserta sosialisasi	125 Orang	200 Orang	200 Orang			DP3AP2KB	Kota Malang
				Fasilitasi Organisasi Wanita (GOW) Dikota Malang	Jumlah peserta sosialisasi, seminar, pelatihan	100 orang, 100 orang, 100 orang	200 orang, 200 orang, 200 orang	200 orang, 200 orang, 200 orang			DP3AP2KB	Kota Malang
				Pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi	Cakupan Perempuan yang mendapat pelatihan dan Pembinaan	275 Orang	275 Orang	300 Orang	300 Orang	300 Orang	DP3AP2KB	Kota Malang

				perempuan di Kota Malang								
			Peningkatan kesejahteraan Ibu rumah tangga berpenghasilan rendah	pemberian stimulus bantuan wirausaha ibu rumah tangga	Cakupan ibu rumah tangga yang mendapatkan bantuan usaha		30%	30%	30%		Dinas Sosial	setiap kelurahan
				bimbingan dan monitoring wirausaha ibu rumah tangga	Cakupan ibu rumah tangga yang mendapatkan bimbingan		30%	30%	30%			Setiap kelurahan
	Pemberdayaan masyarakat difabel	Masyarakat difabel 80 % terberdayakan	Inklusifitas ruang kota bagi difabel	Peningkatan aksesbilitas infrastruktur terhadap difabel	Terbangunnya akses difabel pada setiap sarana dan prasarana umum kota		Pembangunan tahun 1	Pembangunan tahun 2	Pembangunan tahun 3	Pembangunan tahun 4	Dinas PU	Kota Malang
			Peningkatan fasilitas difabel	bantuan alat bantu bagi difabel	Jumlah difabel penerima alat bantu dari total : - 544 anak difabel - 395 masyarakat difabel		- 163 - 79	- 163 - 95	- 163 - 158	-54 -63	Dinas Sosial	Kota Malang
			Difabel Mandiri	pelatihan ketrampilan bagi difabel	Jumlah masyarakat difabel yang		395	395	395	395	Dinas Sosial, Dinas Ketenaga	Kota Malang

					menerima pelatihan						kerjaan dan Dinas Koperasi dan UMKM	
			Peningkatan Kesempatan Kerja Bagi Dfabel	perluasan akses kerja bagi difabel	Cakupan difabel yang diterima dalam perusahaan swasta dan pemerintah minimal 10 % dari total pelamar kerja yang memenuhi kualifikasi.		10%	10%	10%	10%	Dinas Ketenaga kerjaan	Kota Malang
				bimbingan dan monitoring kerja difabel	Cakupan difabel yang mengikuti bimbingan dan monitoring		100%	100%	100%	100%	Dinas Ketenaga kerjaan	Kota Malang
			Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Pentas seni untuk anak jalanan dan tuna netra	Jumlah anak jalanan dan tuna netra yang ikut pentas seni	25 orang	50 Orang	50 Orang			Dinas Sosial	
	Pengentasan dan pemberdayaan PMKS	80 % PMKS tertangani		rehabilitasi anak jalanan	Jumlah anak jalanan yang terehabilitasi dari jumlah 108 anak jalanan		108 anak				Dinas Sosial	Kota Malang
				Pelatihan keterampilan bagi Eks.	Jumlah Eks. NAPZA/ ODGJ/ ODHA yang mendapat	25 orang	25 orang	25 orang			Dinas Sosial	

				NAPZA/ ODGJ/ ODHA	pelatihan keterampilan							
				jaminan sekolah anak jalanan	Jumlah anak jalanan yang mendapatkan jaminan sekolah		108 anak				Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan	Kota Malang
				Pelatihan keterampilan anak jalanan	Jumlah anak jalanan yang mendapat pelatihan keterampilan	25 Anak	103 Anak	108 Anak			Dinas Sosial	Kota Malang
				Pendampingan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Jumlah anak yang didampingi	10 anak	103 Anak	108 Anak			Dinas Sosial	Kota Malang
	Pemberdayaan masyarakat wisata	• Semua kampung tematik wisata telah memiliki kelompok sadar wisata • Partisipasi masyara	Program Pengembangan Destinasi dan Sumber Daya Pariwisata	Pengembangan Kelompok Sadar Wisata	Jumlah peserta bimtek sadar wisata yang paham dalam mempromosikan wisata Kota Malang	10 kelompok	10 kelompok	10 kelompok			Dinas Pariwisata , Sat Pol PP dan BPBD	kampung tridi, kampung warna-warni, kampung desakumenanti dan kampung tematik wisata lain

		kat kampung tematik wisata		bimbingan dan monitoring kelompok	Cakupan kelompok sadar wisata yang mendapatkan monitoring		10 kelompok	10 kelompok	10 kelompok		Dinas Pariwisat	kampung tridi, kampung warna-warni, kampung desaku menanti dan kampung tematik wisata lain
				peningkatan kesejahteraan kelompok	Cakupan kelompok sadar wisata yang mendapatkan bantuan peningkatan kesejahteraan		10 kelompok	10 kelompok	10 kelompok		Dinas Pariwisata	kampung tridi, kampung warna-warni, kampung desaku menanti dan kampung tematik wisata lain
				sosialisasi sadar wisata	Cakupan penduduk yang mendapatkan sosialisasi		50%	50%			Dinas Pariwisata dan BPBD	kampung tridi, kampung warna-warni, kampung desaku menanti dan

												kampung tematik wisata lain
			Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Fasilitasi Program Desaku Menanti	Jumlah KK warga binaan sosial dilokasi Desaku Menanti yang dibina	40 KK, 160 jiwa	40 KK, 160 jiwa				Dinas Sosial	Desaku Menanti

6.1.4 Kelompok Program III

Program klaster 3 adalah kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil terdiri atas program-program yang bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil. Strategi penanggulangan kemiskinan yang masuk dalam program klaster III meliputi.

1. Peningkatan kualitas produksi UKM dan IKM Kota Malang menuju industri kreatif dan produktif
2. Peningkatan akses pemodalan melalu mekanisme pembiayaan pinjaman dan koperasi kepada usaha rakyat
3. Managemen sistem informasi pemasaran UKM dan IKM
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas produksi UKM dan IKM Kota Malang melalui peningkatan SDM Industri dan dukungan teknologi industri

Berdasarkan perumusan strategi tersebut dapat dijabarkan ke dalam program dan kegiatan sebagai berikut.

Tabel 6.3 Kelompok Program III Penanggulangan Kemiskinan Dengan Pemberdayaan UMK

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja					OPD Penanggung Jawab	Lokasi
						2019	2020	2021	2022	2023		
peningkatan kualitas dan daya saing produk-produk UKM	meningkatkan modal usaha bagi UKM dan IKM	• Modal usaha yang tersalurkan kepada kelompok UKM • Terbangunnya klaster bisnis Kota Malang	Perkuatan permodalan bagi koperasi, usaha mikro dan kecil	Fasilitasi pembiayaan usaha rayat	Terlaksanakannya fasilitasi/sosialisasi pembiayaan usaha rakyat		Terlaksananya sosialisasi				Dinas Koperasi dan UKM	setiap kecamatan
				Pengelolaan Koperasi UKM	Terlaksanakannya pengelolaan koperasi UKM di Kota Malang			Pengembangan koperasi UKM Kota Malang			Dinas Koperasi dan UKM	Kota Malang
			Perluasan Akses Permodalan UKM dan IKM Baru	Fasilitasi pembiayaan modal UKM dan IKM dengan perbank-an	Jumlah fasilitasi yang diselenggarakan		2 kali	2 kali	2kali		Dinas Koperasi dan UKM	Kota Malang
			Peningkatan iklim usaha kecil menengah yang progresif	Fasilitasi pengembangan usaha kecil menengah	Terlaksanakannya fasilitasi pengembangan usaha kecil menengan		Fasilitasi pengembangan usaha kecil	Fasilitasi pengembangan usaha kecil	Fasilitasi pengembangan usaha kecil	Fasilitasi pengembangan usaha kecil	Dinas Koperasi dan UKM	setiap kecamatan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja					OPD Penanggung Jawab	Lokasi
						2019	2020	2021	2022	2023		
			Program Pengendalian dan Promosi Penanaman Modal	Promosi Penanaman Modal	Jumlah keukutsertaan dalam pameran investasi	2 Kali	3 Kali	3 Kali	3 Kali	3 Kali	DPMPTSP	Kota Malang
			Program pengembangan usaha mikro	Sosialisasi perijinan, penerapan, standarisasi dan sertifikasi serta penguatan / perlindungan bagi Usaha Mikro	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi perijinan,penerapan, standarisasi dan sertifikasi serta penguatan / perlindungan bagi Usaha Mikro	180 Peserta	180 Peserta	180 Peserta	180 Peserta		Dinas Koperasi dan UKM	Kota Malang
				Klinik Usaha Mikro	Jumlah UKM yang difasilitasi dengan Pendampingan klinik	60 Usaha Mikro	60 Usaha Mikro	60 Usaha Mikro	60 Usaha Mikro			
	meningkatkan kualitas dan kuantitas produks	• Persentase peningkatan	peningkatan infrastruktur UKM dan IKM	bantuan pengadaan infrastruktur IKM dan UKM	Jumlah kelompok industri yang mendapatkan bantuan infrastruktur industri			10 kelompok	10 kelompok	10 kelompok	Dinas Koperasi dan UKM	setiap sentra industri dan UKM

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja					OPD Penanggung Jawab	Lokasi
						2019	2020	2021	2022	2023		
	i UMKM dan IKM	pendapatan dari sektor UKM dan IKM di Kota Malang meningkat		subsidi alat pengolahan IKM dan UKM	Jumlah kelompok yang mendapatkan subsidi alat pengolahan industri			10 kelompok	10 kelompok	10 kelompok	Dinas Koperasi dan UKM	setiap sentra industri dan UKM
			Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Industri Agro, Kimia, Makanan dan Minuman (Cukai)	Pembinaan dan Pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat melalui pelatihan berbasis kompetensi dan uji kompetensi sektor industri agro, kimia, makanan dan minuman	Jumlah kegiatan berbasis kompetensi dan jumlah peserta yang memiliki sertifikat kompetensi	20 IKM	22 IKM	24 IKM	26 IKM	28 IKM	Disperin	Kota Malang
			Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang	Pembinaan dan Pelatihan ketrampilan kerja	Jumlah kegiatan dan Jumlah IKM binaan yang menerapkan	50 IKM	55 IKM	60 IKM	65 IKM	72 IKM	Disperin	Kota Malang

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja					OPD Penanggung Jawab	Lokasi
						2019	2020	2021	2022	2023		
			Industri Agro, Kimia, Makanan dan Minuman (Cukai)	bagi tenaga kerja dan masyarakat di sektor industri agro dan hasil hutan	pengembangan teknologi							
				Pembinaan dan Pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat di sektor industri kimia	Jumlah kegiatan pengembangan inovasi dan persentase IKM binaan yang mampu mengembangkan inovasi	50 IKM	50 IKM	60 IKM	65 IKM	72 IKM	Disperin	Kota Malang
				Pembinaan dan Pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat melalui	Jumlah kegiatan berbasis kompetensi dan jumlah peserta yang memiliki sertifikat kompetensi	20 IKM mendapat sertifikat kompetensi	22 IKM mendapat sertifikat kompetensi	24 IKM mendapat sertifikat kompetensi	26 IKM mendapat sertifikat kompetensi	29 IKM mendapat sertifikat kompetensi	Disperin	Kota Malang

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja					OPD Penanggung Jawab	Lokasi
						2019	2020	2021	2022	2023		
				pelatihan berbasis kompetensi dan uji kompetensi sektor industri agro, kimia, makanan dan minuman								
	mengingkatkan sistem pemasaran	• Terselenggaranya sistem pemasaran digital yang efektif dan efisien	Pengembangan sistem informasi dan teknologi digital dalam menunjang pemasaran produk UKM dan IKM	penyediaan sistem informasi pasar	Tersedianya sistem informasi pasar		Pengembangan sistem informasi pasar				DISKOMINFO	Kota Malang
				penyediaan pemasaran dan promosi digital (*E-Marketing*)	Terlaksanakannya sitem promosi digital		Terlasanakannya promosi digital				DISKOMINFO	Kota Malang
			Program Pengembangan Industri Kreatif Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi,	Pencitraan Produk Industri Kreatif Elektronika dan Telematika	Jumlah jenis media branding produk industri	2 jenis media	2 jenis media	2 jenis media			DISPERIN	Kota Malang

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja					OPD Penanggung Jawab	Lokasi
						2019	2020	2021	2022	2023		
			Elektronika, Telematika, Tekstil dan Aneka									
			Program Pengembangan Industri Kreatif Agro, Kimia, Makanan dan Minuman	Pencitraan Produk Industri kreatif Makanan dan Minuman	Jumlah media pencitraan	2 Media	2 Media	2 Media			DISPERIN	Kota Malang

Halaman Ini Sengaja Dikosongkan

BAB 7
SISTEM MONITORING DAN EVALUASI

Sesuai dengan Permendagri No.54 tahun 2010 sebagai pelaksanaan dari PP No.8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, salah satu tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dari setiap lembaga/instansi pemerintah tersebut adalah Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi, tupoksi tersebut dijabarkan menjadi:

a. Pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan di daerah.
b. Pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan di daerah.
c. Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan di daerah.

Sejalan dengan kebijakan tersebut, Permendagri No. 42 tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) mengamanatkan seluruh TKPKD diharuskan menyusun SPKD, dimana didalamnya juga mengatur salah satu fungsi dari TKPKD, yaitu fungsi Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi. Sistem monitoring dan evaluasi dalam program penanggulangan kemiskinan diperlukan dalam rangka mengetahui informasi kemajuan dan kualitas pelaksanaan program dan kegiatan, mengidentifikasi masalah dan potensi masalah dalam pelaksanaannya, memberikan penilaian keberhasilan dari sisi keluaran, kegunaan, dan dampaknya. Adanya rencana sistem monitoring dan evaluasi akan membantu menyediakan bukti-bukti yang menunjukkan efektif atau tidaknya pelayanan dan program yang dijalankan, baik dari segi input (masukan), process (aktifitas), output (keluaran), dan outcome (hasil) dari goals (tujuan) yang ingin dicapai.

Monitoring dan evaluasi juga akan membantu dalam memutuskan apakah kebijakan dan program yang ada layak dilanjutkan, dikembangkan, atau dihentikan. Selain itu, system M&E juga membantu mengidentifikasi masalah dan kesulitan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan. Manfaat lain dari pelaksanaan monitoring dan evaluasi adalah meningkatkan transparansi dan

akuntabilitas dengan menunjukkan bukti bagaimana pemerintah mengelola sumber daya publik. Secara lebih jelas, komplementaritas Sistem monitoring dan evaluasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Monitoring ← KOMPLEMENTER →	Evaluasi
Memastikan apa tujuan program	Menganalisis mengapa tujuan program (tidak) tercapai
Menghubungkan kegiatan dan sumberdaya dengan tujuan program	Menelusuri secara spesifik pengaruh kegiatan terhadap hasil yang dicapai
Menerjemahkan tujuan program kedalam indikator kinerja dan menetapkan target	Menguji proses pelaksanaan program
Mengumpulkan data secara rutin menyangkut indikator di atas dan membandingkan capaian yang ada dengan target	Mengkaji hasil yang tidak diharapkan
Melaporkan perkembangan program kepada pengambil keputusan dan menyadarkannya akan masalah yang ditemukan	Menyediakan pembelajaran, menggarisbawahi sumber potensial keberhasilan program, dan menawarkan rekomendasi perbaikan

Gambar 7.1 Sistem Monitoring dan Evaluasi

7.1 FOKUS MONITORING DAN EVALUASI

Dalam setiap tahapan kegiatan monitoring dan evaluasi terdapat fokus pengamatan dengan indikator yang berbeda-beda. Sebagai contoh, dalam tahapan perencanaan, fokus pengamatan adalah masukan (input) program dengan indikator yang mencakup anggaran, sumberdaya manusia dan rencana kerja. Dalam tahapan pelaksanaan, fokus pengamatan adalah proses (kegiatan, program) dengan indikator seperti pencapaian sasaran, penerapan prosedur dan regulasi. Sedangkan dalam tahap paska pelaksanaan, fokus pengamatan adalah hasil program dan dampak program, dengan indikator hasil keluaran (output) dan dampak (impact) program.

Dengan demikian, proses monitoring dan evaluasi akan mengamati pencapaian indikator program dan kegiatan dalam tahapan sebagai berikut :

1. Masukan (input)
2. Kegiatan (process)
3. Keluaran (output)

4. Sasaran (outcome)
5. Tujuan (goals)

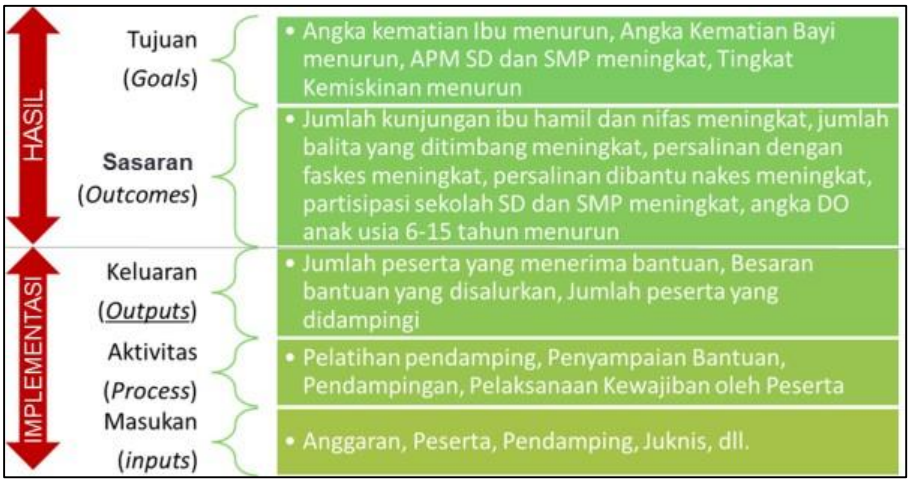

Gambar 7.2 Fokus Monitoring SPKD

7.2 TAHAP MONITORING

Dalam melakukan monitoring dan evaluasi perlu memperhatikan setiap tahapan baik pada aspek implementasi dan aspek hasil. Perlu untuk mendefinikan kebutuhan pada setiap tahapan agar dalam pelaksanaan lebih baik.

a. Inputs, perlu perencanaan anggaran, sumberdaya
b. manusia dan kebutuhan lainnya yang akan terlibat dalam melakukan monev.
c. Activities, mendefinisikan setiap tugas dan tanggung jawab sumber daya manusia yang dilibatkan untuk menlakukan hal-hal yang sudah didefinikan sebagai input sehingga menghasilkan output yang diharapkan.
d. Outputs, tahapan ini harus menghasilkan produk atau jasa yang bersumber dari setiap input.
e. Outcomes, produk dan jasa yang dihasilkan harus berguna bagi pengguna dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama.
f. Goals, tujuan akhir yang berdampak terhadap kondisi tertentu.

Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi di daerah harus desesuikan terhadap Renstra (Rencana Strategi) dan Renja (Rencana Kerja) yang memuat target untuk setiap program yang sedang berjalan, sehingga ada kesesuaian antara aspek implementasi dan hasil.

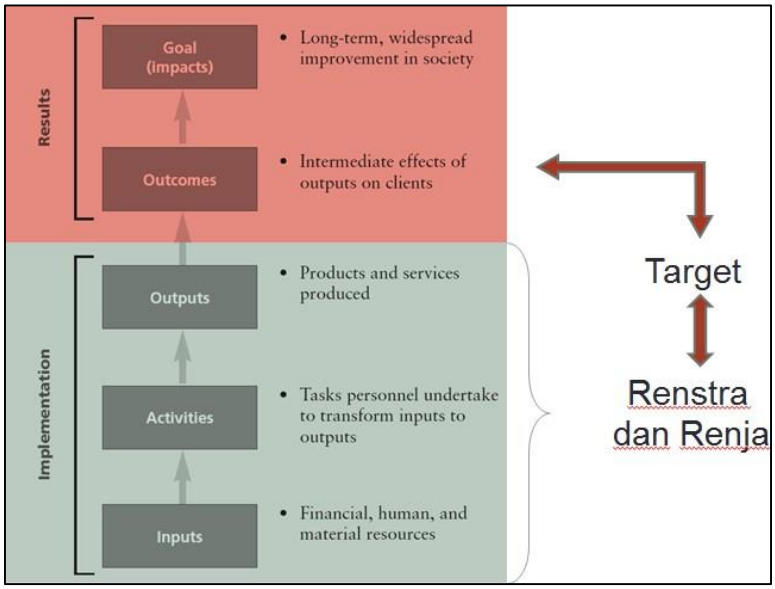

Gambar 7.3 Tahap Monitoring SPKD

BAB 8
PENUTUP

Bahwasannya kemiskinan adalah permasalahan yang telah menjadi permasalahan strategis nasional yang perlu untuk ditangani. Sehingga dalam penanggulangan permasalahan kemiskinan pada tingkat nasional diatur dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan dijabarkan kembali dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional pada setiap periode kemudian diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.42 Tahun 2010 Tentang TKPK Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Strategi Penanggulangan Kemiskinan Kota Malang (SPKD) Tahun 2019-2023 sesuai dengan amanah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.42 Tahun 2010 Tentang TKPK Provinsi dan Kabupaten/Kota perlu disusun untuk koordinasi antar lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan secara terpadu dan berkesinambungan. Sehingga dengan tersusunnya buku Strategi Penanggulangan kemiskinan Daerah Kota Malang Tahun 2019-2023 diharapkan dapat menjadi acuan kepada seluruh *stakeholder* yang berkepentingan dalam usaha percapatan penanggulangan kemiskinan Kota Malang.

Halaman Ini Sengaja Dikosongkan